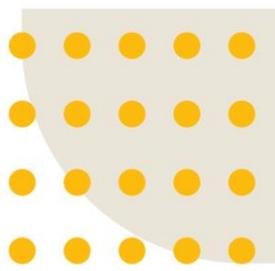




**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA
REPUBLIK INDONESIA**



LAPORAN KINERJA

20 21





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2021 disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kemenpora tahun 2021 ini merupakan laporan atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021. Seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2021 merupakan bagian dalam upaya menjalankan mandat yang diemban sejalan dengan kebijakan dan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan yang terus berubah.

Laporan Kinerja ini berisi informasi capaian tujuan dan sasaran, kinerja dan analisis capaian, pengukuran, kendala yang dihadapi dan upaya perbaikan ke depan yang diuraikan dan dijelaskan pada 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2021.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk perbaikan program dan kegiatan yang akan datang dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing kepemudaan dan keolahragaan serta mengoptimalkan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2021.

Jakarta, 25 Februari 2022
Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia



Dr. Zainudin Amali, M.Si



Dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, Kementerian Pemuda dan Olahraga berkewajiban melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 sebagai salah satu elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Ringkasan Eksekutif ini memberikan informasi singkat tentang capaian sasaran strategis, indikator kinerja, dan target serta capaian realisasi sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021. Berikut tingkat ketercapaian sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 pada Tabel Capaian Sasaran Strategis Kemenpora Tahun 2021.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 tergolong Baik dengan rata-rata capaian sebesar 114,58%. Salah satunya pencapaian terbaik pada pencapaian jumlah medali emas pada ajang *Paralympic Games* dengan realisasi 2 emas dari target 1 emas melalui cabang olahraga Para Bulutangkis. Terdapat 2 (dua) indikator yang masih belum memenuhi target dan 4 (empat) indikator yang tidak dapat diukur karena pelaksanaan *event* kegiatan ditunda di tahun 2022 dan data capaian yang belum tersedia di tahun 2021.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja utama di atas dijumpai beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, khususnya pandemi Covid-19 yang menuntut adanya metode pelaksanaan kegiatan yang lebih kreatif dan mengikuti standar protokol kesehatan. Pada bidang kepemudaan, isu koordinasi lintas sektor dengan para stakeholder kepemudaan serta internalisasi terhadap ukuran pembangunan dirasa masih perlu di optimalkan. Sedangkan di bidang keolahragaan lahirnya Desain Besar Olahraga Nasional menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pencapaian prestasi olahraga Nasional.

Oleh karenanya, kedepannya Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan terobosan-terobosan baru agar pelaksanaan kegiatan memperoleh hasil yang maksimal serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat secara luas.

Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis Kemenpora Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,59	54,00	98,92
2	Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	70%	107,7%	153,86
		Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di Tingkat Pusat dan Provinsi yang Terbentuk	25%	25%	100,00
		Persentase Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan	25%	25%	100,00
3	Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga	35,40%	32,83%	92,74
		Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>	1	1	100,00
		Jumlah perolehan medali emas <i>Paralympic Games</i>	1	2	200,00
		Peringkat pada <i>SEA Games</i>	3	N/A	N/A
		Peringkat pada <i>ASEAN Paragames</i>	1	N/A	N/A
4	Meningkatnya manajemen tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	73,1	N/A	N/A
		Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga	4,00	N/A	N/A
		Opini BPK	WTP	WTP	100,00



PERNYATAAN REVIU INSPEKTORAT

Kami telah mereviu Laporan Kinerja (LKJ) Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi yang memuat data/informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Reviu ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

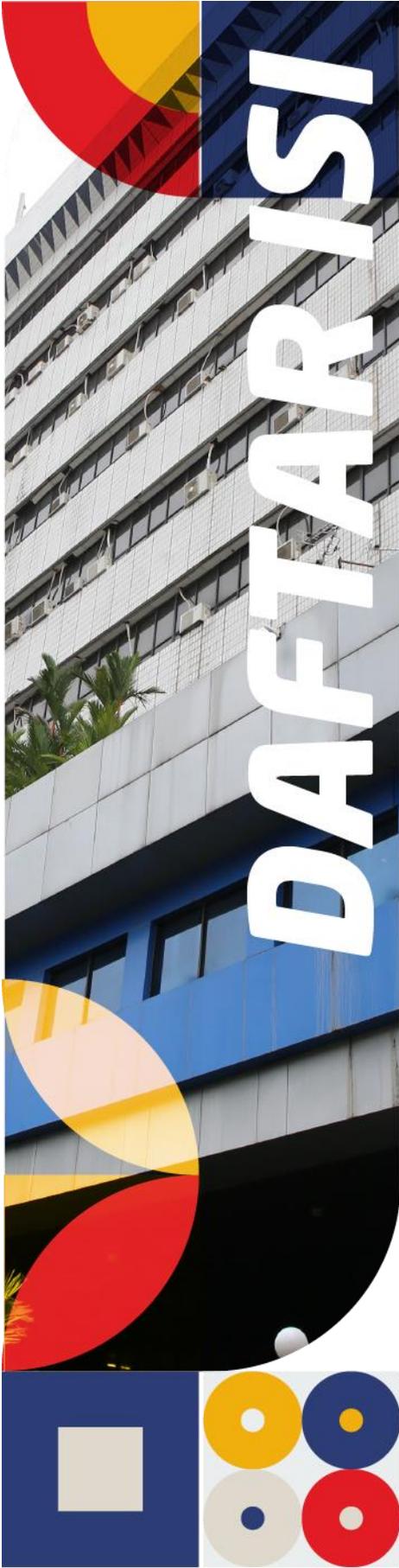
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan data/informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2022

Inspektur Kementerian
Pemuda dan Olahraga



Agus Widaryanto, Ak., M.M.
NIP. 196711281988031001



DAFTAR ISI

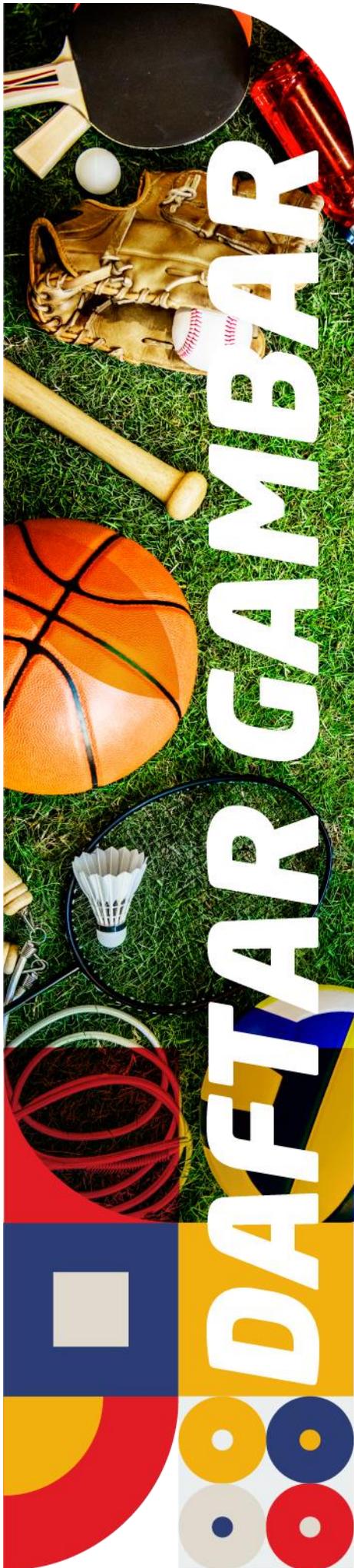
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
PERNYATAAN REVIU INSPEKTORAT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	6
C. Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur.....	8
D. Potensi Permasalahan Pemuda Dan Olahraga	12
E. Sistematika Pelaporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Strategis Kemenpora (Renstra).....	16
B. Indikator Kinerja Utama	19
C. Perjanjian Kinerja Kementerian Pemuda Dan Olahraga Tahun 2021	21
D. Postur Anggaran	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Pengukuran Kinerja	26
B. Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja	27
• Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan.....	28
• Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Keolahragaan.....	70
• Analisis Dan Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Kesekretariatan	116
C. Realisasi Anggaran	138
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya	140
BAB IV PENUTUP	144



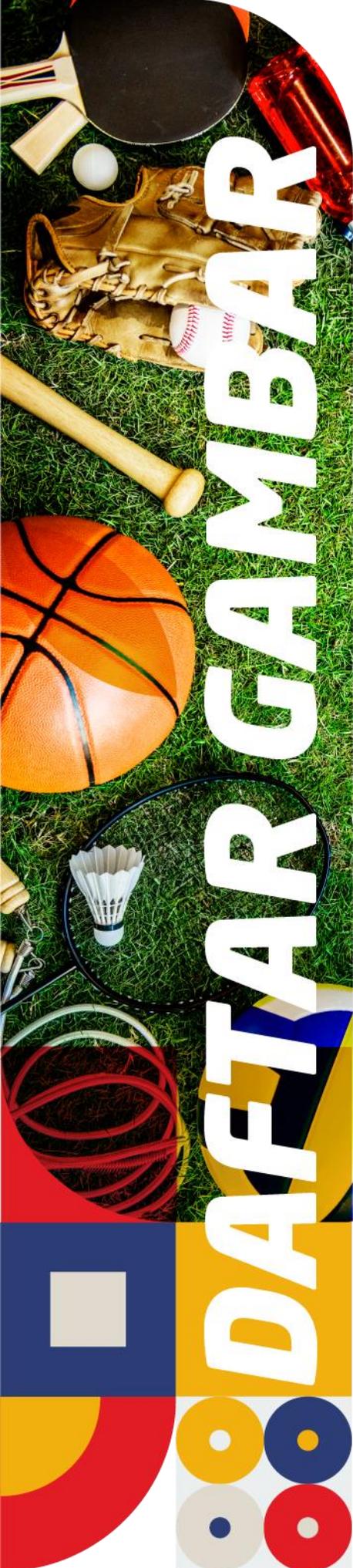
1	Tabel Capaian Sasaran Strategis Kemenpora Tahun 2021	iv
1.1	Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin SDM pada setiap unit kerja	8
1.2	Jumlah Pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan SDM Tahun 2021	9
1.3	Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Golongan Kepangkatan Setiap Unit Kerja	10
1.4	Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Eselon Setiap Unit Kerja	11
1.5	Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan Pada Setiap Unit Kerja Tahun 2021	11
2.1	Indikator Kinerja Utama Kemenpora 2021	19
2.2	Pagu Kemenpora Tahun 2021	23
2.3	Alokasi Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021	24
3.1	Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator	26
3.2	Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda	29
3.3	Jumlah Kader Pemuda Anti Narkoba	42
3.4	Jumlah Kader Pemuda Pelatihan Peningkatan Kesehatan Reproduksi	43
3.5	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	48
3.6	Jumlah wirausaha muda yang memperoleh fasilitasi akses permodalan	50
3.7	Kegiatan Tematik Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	52
3.8	Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	58
3.9	Capaian Kinerja Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di Tingkat Pusat dan Provinsi yang Terbentuk	60
3.10	Capaian Kinerja Persentase Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan	63
3.11	Capaian Kinerja pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	66
3.12	Realisasi Anggaran pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	66
3.13	Capaian Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	67
3.14	Realisasi Anggaran Deputi 2	68
3.15	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Melakukan Olahraga Tahun 2018-2021	71
3.16	Pagu dan Realisasi Anggaran Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga	72



3.17	Capaian Kegiatan Kampanye dan Festival Olahraga Pendidikan Tahun 2021	82
3.18	Perolehan Medali POTRADNAS VIII Tahun 2021	85
3.19	Capaian Kinerja Perolehan Medali Emas pada <i>Olympic Games XXXII</i>	89
3.20	Kontingen Indonesia dalam <i>Olympic Games XXXII</i>	89
3.21	Perolehan Medali dari 3 (Tiga) Cabor yang Berkontribusi dalam Ajang <i>Olympic Games</i>	90
3.22	Dukungan Kegiatan Dalam Mendukung Pencapaian Target <i>Olympic Games XXXIII</i>	95
3.23	Capaian Kinerja Perolehan Medali Emas <i>Paralympic Games</i>	96
3.24	Perolehan Medali Pada <i>Paralympic Games</i> Tahun 1976-2020	98
3.25	Realisasi Capaian Kinerja Peringkat Pada <i>SEA Games</i>	103
3.26	Perolehan Medali Emas dalam <i>SEA Games</i> Tahun 2001-2019	104
3.27	Rekapitulasi Potensi Perolehan Medali Emas <i>SEA Games 2022</i>	105
3.28	Capaian Kinerja Indikator Peringkat pada <i>Asean Paragames</i>	106
3.29	Capaian indeks RB tahun 2018-2020 Kemenpora per Area Perubahan	118
3.30	Indeks Hasil Antara	119
3.31	Rincian Bobot pada Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Kemenpora	120
3.32	Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	121
3.33	Hasil Evaluasi atas Usulan Zona Integritas Kemenpora	122
3.34	Nilai indeks pelayanan publik dan kategori	124
3.35	Capaian dan Target Indeks Pelayanan Publik Kemenpora	124
3.36	Capaian dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kemenpora tahun 2021	126
3.37	Capaian Kinerja Opini BPK	128
3.38	Laporan Keuangan Kemenpora tahun 2021	130
3.39	Rekomendasi Temua Pada Laporan Keuangan Kemenpora TA 2020	134
3.40	Penyediaan SDM Pengawasan Pelaporan Keuangan dan BMN	136
3.41	Unit Pelaksanaan Capaian Opini BPK Beserta Anggaran	137
3.42	Rincian realisasi anggaran per satker tahun 2021	138
3.43	Definisi Operasional dan Perhitungan Efisiensi	141



1.1	Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga	7
2.1	Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga Tahun 2021	22
3.1	Capaian IPP Tahun 2015 s.d.2021	29
3.2	Capaian IPP Per-Provinsi Tahun 2021	30
3.3	Arah Kebijakan hubungan agenda Prioritas Nasional dengan IKU Kemenpora Bidang Kepemudaan	31
3.4	Kerangka Kerja IPP Indonesia	34
3.5	Metode Pengukuran IPP	34
3.6	Domain dan Indikator-Indikator Penyusun IPP	35
3.7	Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tahun 2020-2021	37
3.8	Kegiatan Pilot Project Implementasi kebijakan	39
3.9	Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tahun 2020-2021	41
3.10	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Tahun 2021	42
3.11	Capaian Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Tahun 2020-2021	44
3.12	Infografis Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (Sumber <i>World Economic Forum ASEAN Youth Survey 2019</i>)	45
3.13	Infografis Persentase Pemuda Yang Ingin Menjadi Wiraswasta	46
3.14	Grafik Rendahnya Jiwa Wirausaha	46
3.15	Isu Kebijakan dalam Kewirausahaan Pemuda (Stranas Kewirausahaan)	47
3.16	Fasilitasi Akses Permodalan Bagi WMP	49
3.17	Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Tahun 2020-2021	51
3.18	Fasilitasi Partisipasi Pemuda dan Kepemimpinan	56
3.19	Capaian Domain Gender dan Diskriminasi Tahun 2020-2021	56
3.20	Sinergitas Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2021	59
3.21	Diagram Keterlibatan Dalam Berolahraga Tahun 2021	73
3.22	Grafik Berolahraga Dalam Seminggu	74
3.23	Grafik Tingkat Partisipasi Olahraga Berdasarkan Propinsi (%) Tahun 2021	75
3.24	Pelaksanaan Pekan Olahraga Masyarakat Melalui Program Indonesia Bugar	76



3.26	Alur Olahraga Pendidikan	80
3.27	Pelaksanaan Festival Olahraga Pendidikan di 22 Provinsi Tahun 2021	83
3.27	Provinsi Peserta POTRADNAS VIII	84
3.28	Pelaksanaan POTRADNAS VIII di Belitung	85
3.29	Perbandingan Peringkat <i>Olympic Games</i> Tahun 2016 dan 2020	91
3.30	Kontingen Indonesia dalam Paralympic Games Tokyo	97
3.31	Perolehan Medali Paralympic Games	100
3.32	Arahan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Olahraga Nasional pada Tanggal 9 September 2020	109
3.33	Keterkaitan DBON dengan Visi Misi Presiden dan Kemenpora	110
3.34	Sinergitas DBON dan SDI	111
3.35	Fungsi Akselerasi SDI dan DBON	112
3.36	Proses Pengukuran SDI	114
3.37	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020	121
3.38	Grafik Opini BPK atas LK Kemenpora	129
3.39	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	132
3.40	Grafik Efisiensi Anggaran Kemenpora Tahun 2018-2021	142
3.41	Nilai monev KIP tahun 2021	143



LAPORAN KINERJA 2021

BAB I

PENDAHULUAN





Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu Kementerian Negara yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan kelanjutan dari Perpres nomor 57 tahun 2015. Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. Lingkup tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga

mencakup bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga.

Terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang menjadi prioritas nasional bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020-2024, menuju Indonesia berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan, antara lain yaitu:

1. (PN1) memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas meliputi (PP2) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui (KP1) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha;
2. (PN3) meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing meliputi (PP3) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui (KP4) pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat, (PP5) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda melalui (KP3) Peningkatan kualitas pemuda, dan (PP7) Peningkatan produktivitas dan daya saing melalui (KP4) Peningkatan Prestasi Olahraga;
3. (PN4) membangun kebudayaan dan karakter bangsa meliputi (PP1) revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila melalui (KP1) Revolusi mental dalam sistem pendidikan;
4. (PN7) memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik meliputi (PP5) menjaga stabilitas keamanan nasional melalui (KP4) peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Adapun yang menjadi Program Prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain yaitu:

PROGRAM PRIORITAS KEMENPORA



KEMENPORA RI
MEMPERBAIKI TATA KELOLA, MENYEDERHANAKAN REGULASI, MENYESUAIKAN BIROKRASI, DAN MENINGKATKAN KECEPATAN PELAYANAN PUBLIK



MEMBERDAYAKAN PEMUDA MENJADI KREATIF, INOVATIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING SERTA MENUMBuhkan SEMANGAT KEWIRAUSAHAAN;



MENGUATKAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER SERTA BUDAYA BANGSA DI KALANGAN PEMUDA



MEMASSALKAN DAN MEMASYARAKATAN OLAHRAGA YANG MENIMBULKAN KEDEMARAN UNTUK HIDUP LEBIH SEHAT DAN BUGAR DI MASYARAKAT



MEMBINA USIA DINI DAN MENINGKATKAN PRESTASI ATLET YANG TERENCANA DAN BERKESINAMBUNGAN





Dalam rangka menyikapi terjadinya *pandemi Covid-19* pemerintah melakukan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, pemerintah melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran);
2. Mempercepat *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan;
3. Melakukan pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19) dengan melibatkan LKPP dan BPKP;
4. Melakukan pengadaan barang dan jasa alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan Covid-19 dengan memperhatikan barang dan jasa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan beberapa hal sebagai berikut: (i). Mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat percepatan penanganan Covid-19 (*refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran); (ii). Kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19 mengacu pada Protokol Penanganan Covid-19 dan Rencana Operasional Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19; (iii). Pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19 dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran; (iv). Revisi Anggaran dilakukan secara cepat, sederhana dan akuntabel.

Refocusing kegiatan dan realokasi anggaran penanganan Covid-19 digunakan untuk kegiatan Internal K/L dan Eksternal K/L.

Kegiatan internal meliputi: Pembersihan prasarana kantor seperti penyemprotan disinfektan, Pembelian alat penunjang kesehatan bagi pegawai untuk keperluan pelayanan internal dan eksternal, dan Penguatan fungsi klinik internal (PPITKON dan RSON) seperti pengadaan obat-obatan, vitamin, rapid test bagi pegawai. Sedangkan kegiatan eksternal meliputi: Pembelian Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *hand sanitizer*, dll; Pembelian alat Rapid Tes, *Reagen*, dan *Virus Transfer Media* (VTM) bagi para atlet, relawan, serta dukungan bagi relawan Covid-19.





B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR

1. Tugas Kemenpora

Berdasarkan Peraturan Presiden 106 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

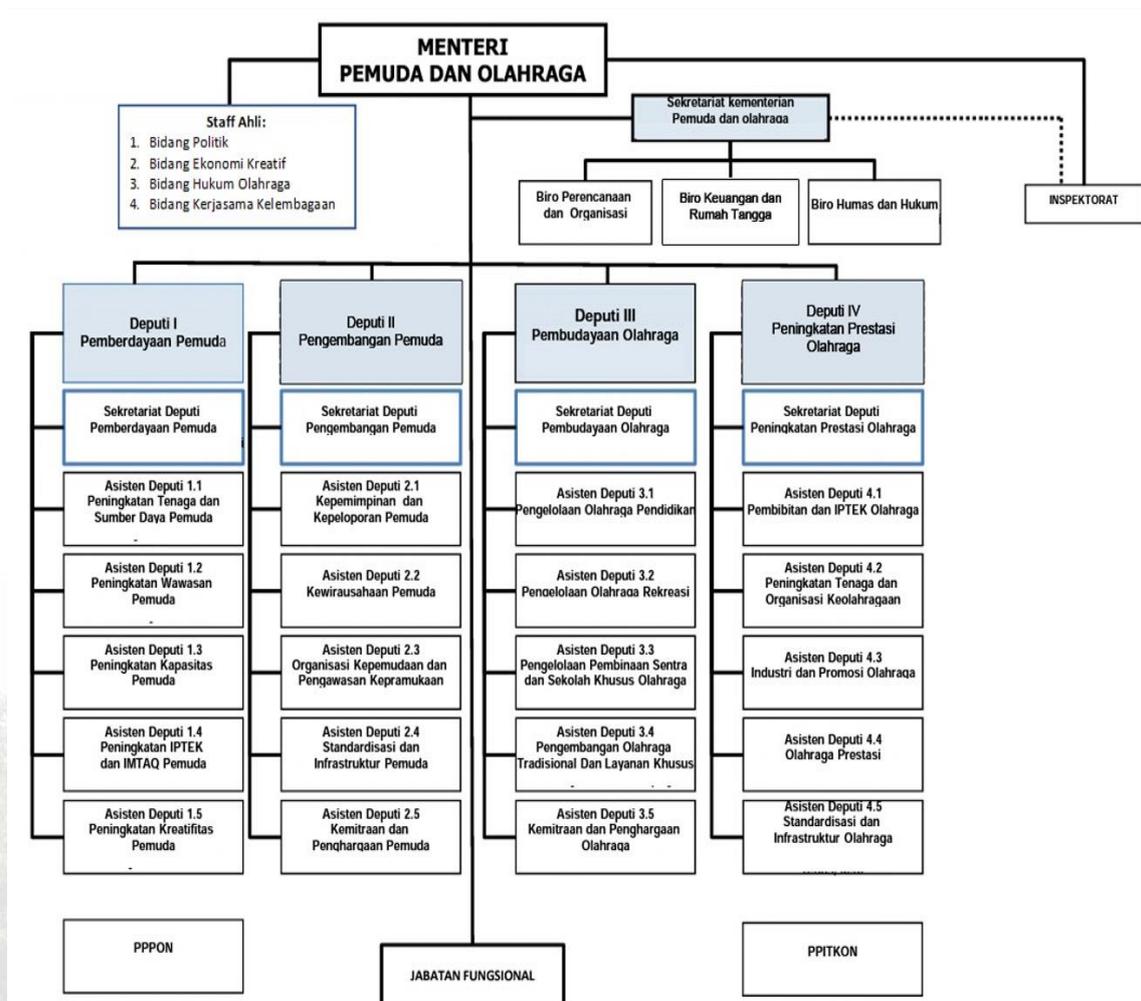
2. Fungsi Kemenpora

Kemenpora dalam rangka mencapai tujuannya memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- b) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- c) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
- e) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
- f) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga

3. Struktur Organisasi Kemempora

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, struktur organisasi dan tata kerja, struktur organisasi Kemempora tertuang dalam Permenpora Nomor 1516 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga disajikan sebagai berikut



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga



C. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Untuk mengemban tugas menjalankan visi dan misi dalam mendukung capaian hasil diperlukan sumber daya manusia yang kuat dan profesional. Pada tahun 2021, Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki total pegawai sebanyak 1.362 orang yang terdiri dari 1.094 orang Pegawai Negeri Sipil dan 268 orang honorer. Di bawah ini kondisi sumber daya manusia Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin SDM pada setiap unit kerja

UNIT KERJA	PNS		HONORER	
	JENIS KELAMIN		JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Sekretariat	106	154	138	34
Deputi 1	34	62	17	9
Deputi 2	32	50	18	6
Deputi 3	34	58	10	6
Deputi 4	266	298	16	14
Total	472	622	199	69

Berdasarkan data sampai dengan tanggal 28 Desember 2021, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga berjumlah 1.094 pegawai yang terdiri dari Laki-laki (43,14%) dan Perempuan (56,86%). Sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja sebagai berikut (23,77%) Kesekretariatan, (8,78%) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, (7,50%) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, (8,41%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, (51,55%) Deputi Bidang

Peningkatan Prestasi Olahraga. Jumlah tenaga honorer yang ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga berjumlah 268 pegawai yang terdiri dari Laki-laki (74,25%) dan Perempuan (25,75%). Sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja sebagai berikut (64,18%) Kesekretariatan, (9,70%) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, (8,96%) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, (5,97%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, (11,19%) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Terkait dengan tingkat Pendidikan, kondisi sumber daya manusia pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN						
	SD	SMP	SMA	DIPLOMA	SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
Sekretariat	1	1	23	79	111	41	4
Deputi 1	-	1	14	5	46	23	7
Deputi 2	-	0	7	4	34	33	4
Deputi 3	-	1	10	4	45	29	3
Deputi 4	-	0	330	9	173	45	5
Total	3	3	384	101	409	171	23

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan SDM Tahun 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat diketahui bahwa pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (37,39%) Sarjana, (35,10%) SMA/Sederajat, (15,63%) Magister, (9,23%) Diploma, (2,10%) Doktor, (0,55%) pendidikan di bawah SMA/Sederajat. Terkait dengan kondisi golongan kepangkatan, sumber daya manusia pada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Golongan Kepangkatan Setiap Unit Kerja

UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	I	II	III	IV	
Sekretariat	2	95	138	25	260
Deputi 1	1	14	53	28	96
Deputi 2	0	7	46	29	82
Deputi 3	1	13	55	23	92
Deputi 4	2	331	200	31	564
Total	6	460	492	136	1.094



Tabel 1.4 Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Eselon Setiap Unit Kerja

Unit Kerja	ESELON				Jumlah
	I	II	III	IV	
Sekretariat	4	4	12	39	59
Deputi 1	1	4	21	43	69
Deputi 2	1	5	19	38	63
Deputi 3	1	6	18	39	64
Deputi 4	1	4	22	40	67
Total	8	23	92	199	322

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai (PNS) Berdasarkan Jabatan Pada Setiap Unit Kerja Tahun 2021

Unit Kerja	Jabatan		Jumlah
	Struktural	Fungsional	
Sekretariat	59	201	260
Deputi 1	69	27	96
Deputi 2	63	19	82
Deputi 3	64	28	92
Deputi 4	67	497	564
Total	322	772	1.094

Adapun komposisi jabatan pada setiap unit Kementerian Pemuda dan Olahraga (18,32%) Kesekretariatan Struktural, (26,04%) Kesekretariatan Fungsional, (21,43%) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Struktural, (3,50%) Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda fungsional, (19,57%) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Struktural, (2,46%) Deputi Bidang Pengembangan Pemuda fungsional, (19,88%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, (3,63%) Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga fungsional, (20,81%) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, (64,38%) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga fungsional.



D. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi kepemudaan saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pemuda terbilang besar. Hampir seperempat penduduk Indonesia adalah pemuda yang mencapai 64,19 juta jiwa (BPS, 2019)

Sedangkan permasalahan kepemudaan saat ini yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Masih terdapat kesenjangan daya serap jenjang pendidikan pada kelompok usia tertentu.
2. Globalisasi budaya barat membawa dampak negatif pada karakter dan jati diri pemuda.
3. Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas.
4. Pelaksanaan pelayananan kepemudaan lintas sektor belum sinergi.

Berbagai potensi keolahragaan saat ini antara lain yaitu:

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan nasional sebagai basis legalitas pengembangan keolahragaan nasional.
2. PPLP sebagai sentra olahraga serta wadah pembibitan olahragawan yang tersebar di 34 Provinsi.
3. Anggaran yang memadai yang bersumber dari APBN dan APBD terutama dalam mendukung kompetisi olahraga regional dan internasional.
4. Dukungan penuh dari KONI dan KOI serta Pengurus Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat pusat dan daerah dalam pembinaan atlet nasional.
5. *Political will* dari pemerintah untuk mengembangkan sarana dan prasarana olahraga melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan GOR di 40 kab/kota sejak tahun 2019.
6. Olahraga sebagai industri yang terus berkembang.

Beberapa permasalahan keolahragaan saat ini yang masih perlu ditangani secara serius antara lain yaitu:

1. Tingkat Kebugaran Jasmani masyarakat yang rendah.
2. Literasi fisik hanya sebesar 24 % dengan fasilitasi publik sebesar 15%.
3. Faktor miskinnya talenta pada atlet.
4. Sarana dan Prasarana yang belum ideal (sentra unggulan hanya ada di beberapa kota).
5. Kualitas SDM pelatih masih rendah (hanya 11 % yang berijazah sarjana olahraga/ bersertifikasi).



E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Kemenpora Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum terkait dengan latar belakang, dasar hukum, tugas dan wewenang, struktur organisasi, kondisi sumber daya manusia aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga, potensi dan permasalahan bidang pemuda dan olahraga, serta sistematika penyajian.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan rencana kerja dan anggaran Kemenpora 2021, serta perjanjian kinerja Kemenpora Tahun 2021.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja Kemenpora beserta pencapaian realisasi anggarannya dalam rangka pencapaian kinerja dan capaian kinerja lainnya.

4. BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas Laporan Kinerja Kemenpora Tahun 2021 beserta rekomendasinya sebagai perbaikan di masa yang akan datang.



LAPORAN KINERJA 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. RENCANA STRATEGIS KEMENPORA TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Kementerian dalam menjabarkan RPJMN Tahun 2020-2024 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda pada berbagai bidang pembangunan, sedangkan pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga.

Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu Kementerian Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 106 tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan pengganti dari Perpres Nomor 57 tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga. Lingkup tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga mencakup bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga



Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024 mengacu pada visi misi Presiden yakni “*Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong*”.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan serangkaian aksi dalam rangka melaksanakan prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian dan mendukung prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional.
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi dimaksud, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam periode lima tahun, yaitu:

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila;
2. Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
3. Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Lebih lanjut Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan identifikasi *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* serta analisis matriks SWOT, sehingga diperoleh faktor kunci internal dan eksternal untuk membentuk strategi spesifik dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang dapat menjawab tantangan dalam lima tahun mendatang. Berkenaan dengan hal tersebut maka arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga diarahkan dalam memperkuat peran dan kewenangan melalui 5 (lima) program prioritas





B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran program atau kinerja organisasi, diperlukan adanya Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Jumlah keseluruhan IKU Kemenpora pada tahun 2021 adalah sebanyak 12 IKU, lebih banyak dibandingkan dengan IKU pada tahun 2020 sebanyak 11 IKU, hal ini dikarenakan adanya perbaikan dan dinamisasi pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021. IKU Kemenpora tahun 2021 dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kemenpora 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda
2	Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
		Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di Tingkat Pusat dan Provinsi yang Terbentuk
		Persentase Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan
3	Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga
		Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Jumlah perolehan medali emas <i>Paralympic Games</i>
		Peringkat pada <i>SEA Games</i>
		Peringkat pada <i>ASEAN Paragames</i>
4	Meningkatnya manajemen tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Opini BPK





C. PERJANJIAN KINERJA (PK) KEMENPORA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima

:

amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Perjanjian kinerja ditandatangani oleh Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai bentuk komitmen pencapaian sasaran strategis yang harus dicapai. Uraian Perjanjian Kerja Kemenpora dapat dilihat berikut ini





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	54,59
2	Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	70%
		Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di Tingkat Pusat dan Provinsi yang Terbentuk	25%
		Persentase Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan	25%
3	Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga	35,40%
		Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>	1
		Jumlah perolehan medali emas <i>Paralympic Games</i>	1
		Peringkat pada <i>SEA Games</i>	3
		Peringkat pada <i>ASEAN Paragames</i>	1
4	Meningkatnya manajemen tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	73,1
		Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga	4,00
		Opini BPK	WTP

Kegiatan

1. Program Keolahragaan
2. Program Kepemudaan
3. Program Dukungan Manajemen

Jumlah**Anggaran**

Rp. 1.566.164.422.000
 Rp. 118.694.371.000
Rp. 315.411.875.000
Rp. 2.000.270.668.000

Jakarta, Maret 2021

**Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia,**

Dr. H. Zainudin Amali, M.Si

Gambar 2.1 Dokumen Perjanjian Kinerja Menteri Pemuda dan Olahraga
Tahun 2021



Pagu Kemenpora dalam rentang januari s/d Desember tahun 2021 tersaji pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pagu Kemenpora Tahun 2021

Kode	Program	Pagu Definitif	Refocusing Tahap I (15 Februari 2021)	Refocusing Tahap II (27 Mei 2021)	Refocusing Tahap III (13 Juli 2021)	Refocusing Tahap IV (20 Juli 2021)	Pagu Akhir (setelah refocusing) =3+4+5+6+7	Tambahan BA-BUN PON dan Peparnas	Perubahan Pagu BLU	Pagu Akhir (setelah tambahan BABUN dan BLU) =8+9+10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
092.WA	Dukungan Manajemen	315.411.875.000	-	(7.562.672.000)	(2.000.000.000)	(5.500.000.000)	300.349.203.000	-		300.349.203.000
092.DA	Keolahragaan	1.888.664.422.000	(322.500.000.000)	-	(21.779.340.000)	(147.548.955.000)	1.396.836.127.000	831.869.575.000	36.000.000.000	2.264.705.702.000
092.DB	Kepemudaan	118.694.371.000	-	-	(4.000.000.000)	(10.444.546.000)	104.249.825.000	-		104.249.825.000
Total		2.322.770.668.000	(322.500.000.000)	(7.562.672.000)	(27.779.340.000)	(163.493.501.000)	1.801.435.155.000	831.869.575.000	36.000.000.000	2.669.304.730.000

Keterangan:

1. *Refocusing* Tahap I, diambilkan dari anggaran PON dan Piala Dunia FIFA U-20 yang ditunda pelaksanaannya.
2. *Refocusing* Tahap II, diambilkan dari Gaji dan Tunkin ke-13
3. *Refocusing* Tahap III, diambilkan dari blokir dekon dan lain-lain (sesuai hasil SKP 5 Juli 2021)
4. *Refocusing* Tahap IV, diambilkan dari dana Sea Games Vietnam dan lain-lain
5. Tambahan BA-BUN untuk PON XX dan Peparnas XVI Papua

Pada Pagu Alokasi TA 2021, terjadi perubahan Pagu BLU pada Satker LPDUK, dimana terdapat perubahan target PNBPN yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dari awalnya sebesar Rp34 Milyar di Pagu Indikatif, dinaikkan menjadi Rp70 Milyar (atau terdapat kenaikan sebesar Rp36 Milyar) dan Rp1 Milyar yang bersumber dari anggaran Rupiah Murni.

Dalam rangka memastikan ketercapaian indikator kinerja utama Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah disusun rincian program dan kegiatan yang disampaikan melalui rencana kerja anggaran setiap satuan kerja. Selanjutnya secara rinci pengalokasian anggaran per unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

NO	UNIT ESELON II	PAGU ANGGARAN
1	Sekretariat Kemenpora	280.142.595.000
2	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	36.689.566.000
3	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	73.460.259.000
4	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	206.638.151.000
5	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1.897.423.435.000
6	Unit Pelayanan Terpadu (UPT)	19.690.000.000
7	LPDUK	71.000.000.000
8	Dekonsentrasi	84.260.724.000
TOTAL		2.669.304.730.000

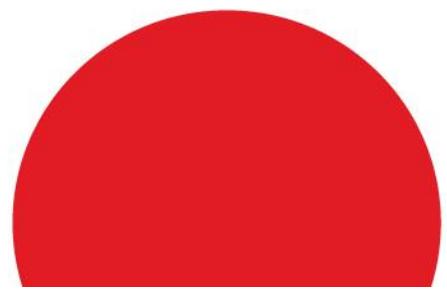
Alokasi anggaran terbesar adalah Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yaitu sebesar 1.897.423.435.000 rupiah atau sebesar 71,08% dari total pagu Kemenpora tahun 2021 yang diantaranya dialokasikan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan PON XX dan Papernas XVI Papua tahun 2021 dan dukungan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dalam peningkatan prestasi olahraga.



LAPORAN KINERJA 2021

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian mengukur realisasinya. Pengukuran kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dan capaian realisasi pada setiap indikator kinerja utama (IKU). Penilaian atas ketercapaian target indikator kinerja menggunakan skala ordinal seperti yang terlihat pada tabel berikut

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian Ketercapaian Target Indikator

RENTANG CAPAIAN	KATEGORI PENILAIAN CAPAIAN	KETERANGAN
Capaian \geq 100	Sangat baik	Capaian diperoleh dari persentase capaian hasil pengukuran setiap indikator kinerja
90 s.d capaian < 100	Baik	
80 s.d capaian < 90	Cukup	
Capaian < 80	Kurang	

Sumber Data: Kemenpan RB

B. ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Laporan atas akuntabilitas kinerja dimulai dengan melakukan analisis dan pengukuran kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya, baik mengenai uraian rencana pencapaian kinerja atau target dan kemudian melakukan pengukuran realisasinya. Adapun pembahasan secara mendalam terkait capaian kinerja Kemenpora di tahun 2021 akan diuraikan berdasarkan 3 (tiga) bidang, yaitu kepemudaan, keolahragaan, dan kesekretariatan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen PK tahun 2021.

ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG KEPEMUDAAN

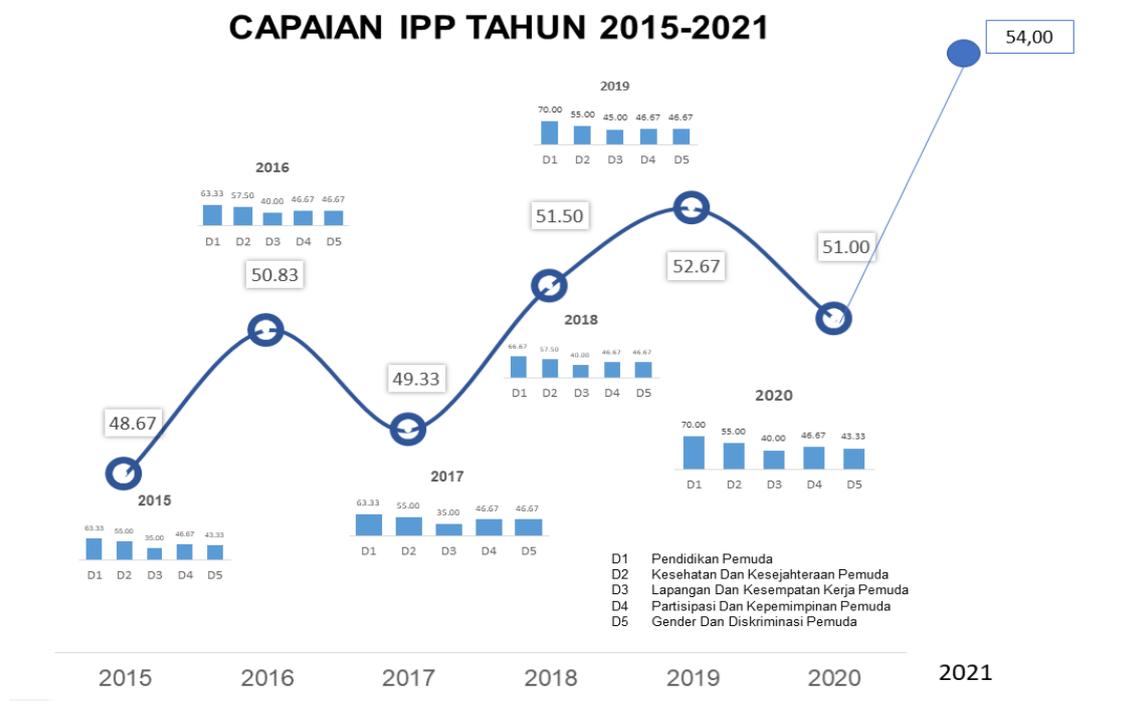


SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan
INDIKATOR KINERJA
Indeks Pembangunan Pemuda

Tabel 3.2 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Pemuda

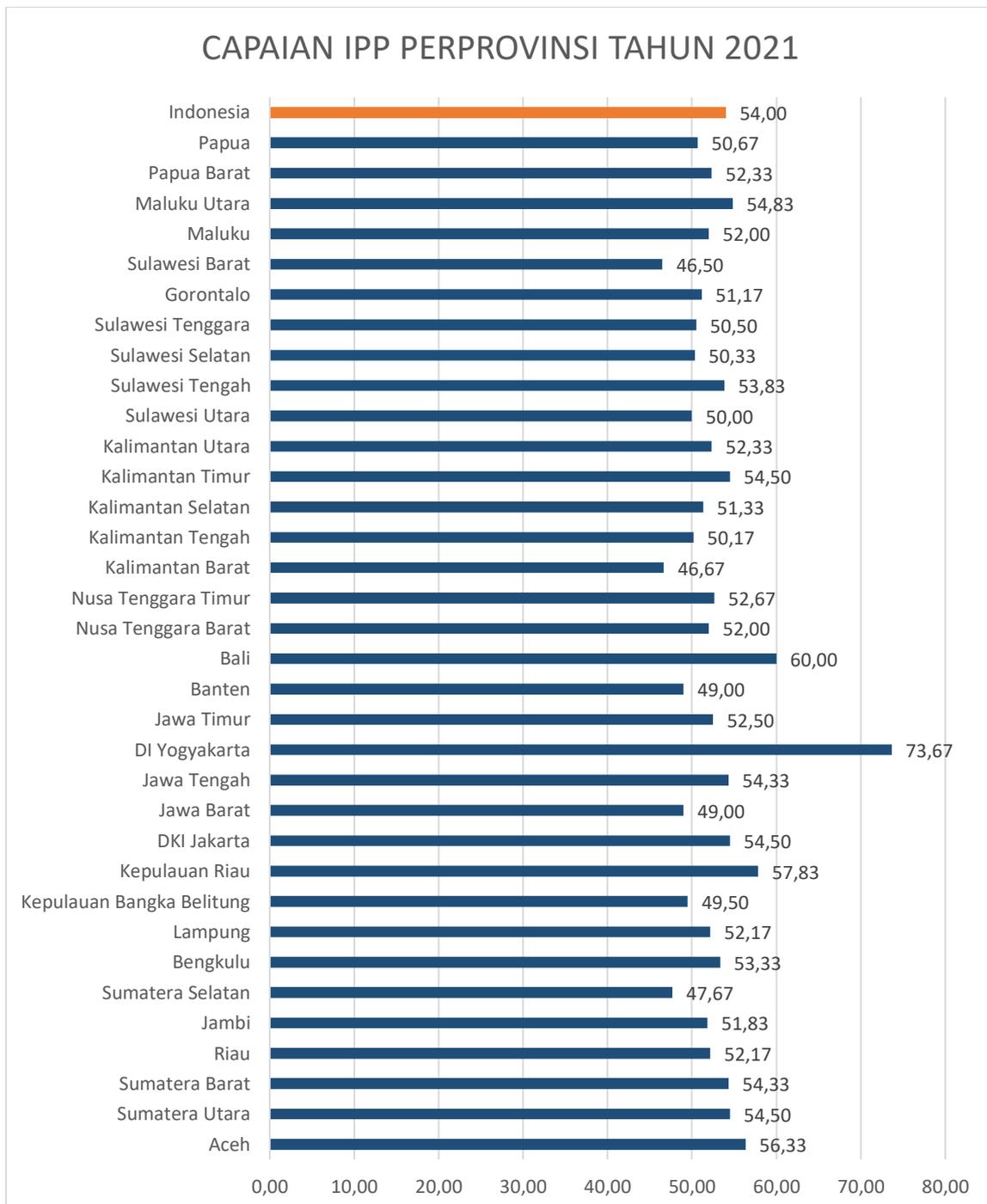
Indikator	Target 2021	Realisasi	Capaian%
Indeks Pembangunan Pemuda	54.59	54.00	98.92

Secara nasional capaian Indeks Pembangunan Pemuda dari tahun 2015 s.d 2021 mengalami fluktuasi dalam perolehan nilainya. Dan di tahun 2021 perolehan nilai IPP adalah 54.00, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan pada indikator-indikator pembentuknya yang memberikan dampak pada peningkatan domain IPP yaitu pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan dan domain Gender dan Diskriminasi. Di atas tergambar untuk capaian atas indicator kinerja Indeks Pembangunan Pemuda tahun 2021. Adapun capaian IPP 7 (tujuh) tahun terakhir tergambar sebagai berikut.



Gambar 3.1 Capaian IPP Tahun 2015 s.d.2021

Apabila kita telaah capaian IPP Indonesia dari tahun 2015-2021, maka nilai IPP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat minim dan hampir stagnan, yaitu dari 48,67 pada 2015 menjadi 51,00 pada 2020, nilai 51 ini turun dari angka 52,67 untuk perolehan pada tahun 2019. kemudian pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 54,00.

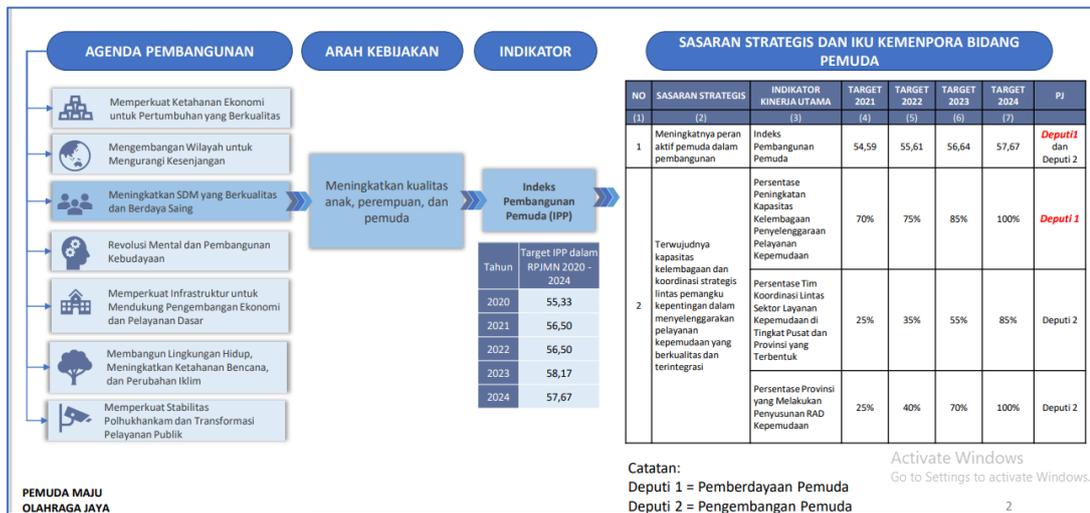


Gambar 3.2 Capaian IPP Per-Provinsi Tahun 2021

Namun peningkatan tersebut belum terjadi di setiap provinsi secara merata. Pandemi Covid-19 menghambat perkembangan indikator pembentuk IPP dan menjadi faktor utama turunnya IPP tahun 2020 (dibandingkan tahun 2019) menjadi hampir sama dengan kondisi tahun 2017-2018, sehingga target capaian IPP dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 56,57 menjadi semakin berat.

Capaian IPP Indonesia ini tentu saja perlu diimbangi oleh perbaikan

nilai IPP di sejumlah provinsi, namun demikian justru terdapat 20 provinsi yang memberikan capaian sebaliknya atau adanya penurunan dibandingkan di tahun 2020. Meskipun capaian perprovinsi ini perlu di evaluasi kembali, mengingat masih terdapat beberapa data yang belum dimutakhirkan. Dalam memetakan hubungan agenda Prioritas Nasional dengan IKU Kemenpora (IPP) dapat terlihat jelas pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Arah Kebijakan hubungan agenda Prioritas Nasional dengan IKU Kemenpora Bidang Kepemudaan

Dari gambar di atas terlihat ada agenda Pembangunan ke 3 yaitu Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan arah kebijakan Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda ditunjukkan melalui indikator IPP yang diwujudkan Kemenpora ke dalam 2 Sasaran Strategis dan 4 indikator.

Untuk mengukur Pembangunan Kepemudaan adalah melalui Indeks Pembangunan Pemuda yang dirumuskan melalui

serangkaian proses panjang melibatkan pemangku kepentingan pemuda secara luas dan telah menjadi indikator pembangunan bidang pemuda dalam RPJMN 2020-2024 dan RKP dan diluncurkan bersama-sama oleh 3 Menteri: Menko PMK, Menpora, dan MenPPN/Kepala Bappenas. IPP menjadi amanat Perpres 66/2017 dan diharapkan menjadi acuan dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan dengan *leading sector* Kemenpora.

Internalisasi IPP pada bidang kepemudaan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga diupayakan melalui internalisasi pembagian domain yang menjadi tanggungjawab masing-masing Deputi Bidang Kepemudaan sesuai tugas dan fungsinya, yaitu:

A. DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

1. Angka kesakitan Pemuda
2. Persentase Pemuda korban Kejahatan
3. Persentase Pemuda Merokok
4. Persentase /remaja perempuan sedang hamil
5. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda
6. Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir
7. Perkawinan usia anak
8. Persentase Pemuda Perempuan sedang bersekolah SMA keatas



B. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

1. Rata-rata lama sekolah
2. Angka Partisipasi Kasar SMP + SM (Sekolah Menengah)
3. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
4. Persentase Pemuda Berusaha White collar
5. Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir
6. Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut.
7. Persentase pemuda perempuan bekerja di sector formal





Tugas dan Tanggung jawab Kedeputusan bidang Kepemudaan yang ada di Kemenpora dalam upaya percepatan peningkatan IPP adalah dengan berupaya terus meningkatkan kapasitas SDM Kemenpora di bidang Kepemudaan melalui peningkatan *Capacity Building IPP* dan membagi indikator-indikator yang ada pada IPP menjadi tanggungjawab 2 kedeputusan bidangkepemudaan.

Peningkatan *Capacity Building IPP* di internal Kemenpora rutin dilaksanakan sejak tahun 2020 untuk meningkatkan kapasitas SDM Kemenpora dalam pemahaman IPP, yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan:

1. Kegiatan *capacity building IPP* dengan fokus *transfer knowledge* metode penghitungan IPP *capacity building* dan pemahaman konsep strategi untuk meningkatkan IPP melalui program/kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring tanggal 3 s.d 5 Desember 2020 dan diikuti para pemangku kepentingan dari pemerintah di tingkat pusat yaitu Kemenpora, Kemenko PMK, Kemendagri, BPS, dan Kementerian/Bappenas(serta didukung oleh Kerjasama RI-UNFPA).
2. Kegiatan internal Kemenpora untuk membahas terkait metodologi perhitungan IPP setiap indikator dalam lingkup nasional maupun provinsi, dilaksanakan secara daring pada bulan April 2021 dan diikuti oleh perwakilan semua unit eselon II pada Deputi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda,

Terkait dengan dinamika pengukuran IPP, maka ada beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain:

1. Perlu adanya kajian terkait metodologi IPP
2. Perlu adanya kajian muatan domain dan indikator IPP yang lebih relevan dengan kondisi Kepemudaan terkini
3. Perlu adanya rumusan yang jelas terkait dengan langkah atau intervensi Program kegiatan untuk meningkatkan dan memperbaiki nilai indikator
4. Perlu penguatan, koordinasi dan peningkatan kapasitas lembaga pengelola dan *stakeholder* kepemudaan melalui mekanisme penyusunan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

5. Perlu adanya kesepakatan terkait dengan target IPP tahun 2022 - 2024 karena adanya potensi dampak dari pandemi Covid-19.

IPP merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran mengenai status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan domain, yaitu: (1) pembangunan individu; (2) pembangunan penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dan diskriminasi sebagaimana terdapat pada Skema IPP Indonesia pada Gambar 1.1.

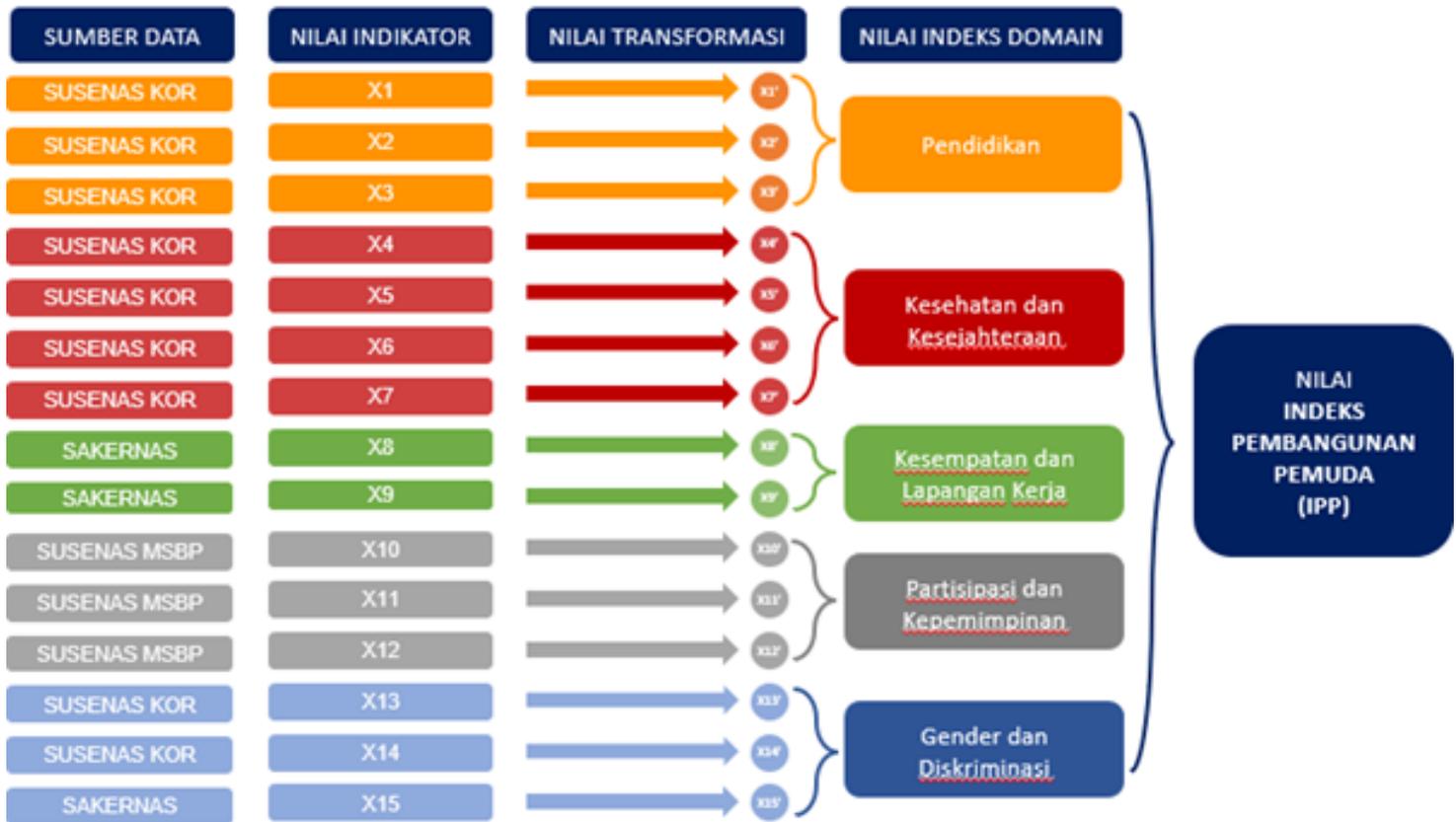
Ketiga lapisan ini mencerminkan komponen yang diperlukan dalam rangka mengejawantahkan konsep pembangunan manusia seutuhnya, yaitu kebebasan untuk memilih, kemampuan untuk memperluas pilihan-pilihannya serta keluasan untuk meningkatkan kemampuannya.



Gambar 3.4 Kerangka Kerja IPP Indonesia



Gambar 3.5. Metode Pengukuran IPP



Gambar 3.6 Domain dan Indikator-Indikator Penyusun IPP

Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wiraswasta kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan

yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

Pembangunan kualitas pemuda menentukan optimalisasi pemanfaatan bonus demografi, terutama dalam hal mendukung percepatan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Strategi utamanya adalah dengan merealisasikan bonus demografi. Tentu pemuda juga lah yang menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan visi ini. Mereka diharapkan menjadi pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga Indonesia dapat lolos dari jebakan

negara berpendapatan menengah (middle income trap). Untuk mewujudkan hal itu, ekonomi kita harus tumbuh 6-7 persen. Pandemi Covid-19 menyebabkan disrupsi yang salah satunya berpengaruh pada terjadinya penurunan IPP di tahun 2020. Wabah ini menimbulkan krisis multidimensi yang mengancam berbagai capaian, terutama target-target pembangunan manusia dan kepemudaan.

Berikut ini adalah analisa perkembangan domain pembentuk IPP dan intervensi dan upaya Kemenpora dalam mengkoordinasikan kebijakan dan fasilitasi kegiatan dalam internalisasi IPP di lingkungan Kemenpora secara khusus dan upaya peningkatan nilai IPP secara umum.



DOMAIN PENDIDIKAN

Disparitas akses terhadap pendidikan di kalangan pemuda masih terjadi antara perkotaan dan perdesaan namun dalam rentang yang tidak terlalu tinggi, di mana Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di perkotaan berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2020 sudah mencapai 11,37 tahun (setara kelas

2 SMA). Pada saat yang sama RLS pemuda di perdesaan baru mencapai 9,97 tahun atau setara kelas 3 SMP (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020). Disparitas pendidikan juga terjadi antara pemuda penyandang disabilitas (7,11 tahun) dengan pemuda bukan disabilitas (10,81 tahun) (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020).

EXERCISE DOMAIN PENDIDIKAN TAHUN 2021

CAPAIAN DOMAIN PENDIDIKAN TAHUN 2020-2021



NILAI TRANSFORMASI RATA-RATA LAMASEKOLAH

Nilai Transformasi	Batas Bawah	Batas Atas
1	0	1,5
2	1,51	3
3	3,01	4,5
4	4,51	6
5	6,01	7,5
6	7,51	9
7	9,01	10,5
8	10,51	12
9	12,01	13,5
10	13,51	15

NILAI TRANSFORMASI APK SM DAN APK PT

Nilai Transformasi	Batas Bawah	Batas Atas
1	0	10
2	10,1	20
3	20,1	30
4	30,1	40
5	40,1	50
6	50,1	60
7	60,1	70
8	70,1	80
9	80,1	90
10	90,1	100



Gambar 3.7 Capaian Domain Pendidikan Tahun 2020-2021



Setiap Indikator pada domain Pendidikan tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020. *Exercise* domain Tahun 2021 adalah 70, secara domain tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, Hal ini karena nilai transformasi pada setiap indikator masih berada dalam interval yang sama. Agar adanya peningkatan pada domain pendidikan maka diperlukan:

- a. Nilai rata-rata lama sekolah di atas 12 tahun
- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SM) di atas 90
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) di atas 40

Beberapa kegiatan yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang secara tematik memiliki keterkaitan dengan domain pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Peningkatan Potensi Akademik Pemuda Kader Tingkat Nasional adalah pelatihan tes uji Bahasa Inggris (TOEFL) serta Tes Potensi Akademik (TPA) guna meningkatkan *softskill* pemuda guna mempermudah mendapat peluang beasiswa dan karir yang lebih baik. Penjelasan. Adapun metode tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemaparan materi pelatihan peningkatan potensi akademik pemuda kader tingkat nasional tahun 2021 dari narasumber;
 - b. Diskusi peningkatan potensi kepemudaan antara peserta dengan narasumber;
 - c. Simulasi tes uji bahasa Inggris (TOEFL) dan tes potensi akademik (TPA);
 - d. Pelaksanaan tes uji bahasa Inggris (TOEFL) dan tes potensi akademik (TPA);
 - e. Evaluasi dan review hasil *Assesment* dan pemetaan potensi peserta.
2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Potensi Akademik Pemuda Kader Tingkat Nasional Tahun 2021 dilaksanakan di tiga kota, yakni Bandung (15-19 Juni 2021), Lombok (27 Juni – 1 Juli 2021) dan Semarang (6 – 10 Oktober 2021).



3. Kegiatan Bimbingan teknis dan Sosialisasi NSPK Pemuda Kader Penggerak IPTEK dan Strategi Capaian IPP yang dilanjutkan dengan *Pilot Project* implementasi kebijakan yakni berupaya lebih fokus pada melaksanakan koordinasi lintas sektor di 3 Provinsi dengan menggunakan pendekatan NSPK itu dengan melakukan strategi koordinasi dalam pencapaian peningkatan IPP dengan pendekatan 2 permenpora mengenai Sentra Pemberdayaan Pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan di 3 provinsi, yaitu :
 - a. Banten, tanggal 5 s.d 7 Desember 2021
Fokus kegiatan pada pemanfaatan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang telah ada di Banten dengan pemanfaatan budidaya bambu
 - b. DIY, tanggal 8 s.d 10 Desember 2017
Fokus kegiatan pada strategi kolaborasi kegiatan lintas opd dalam mendorong terciptanya pemuda kader penggerak IPTEK melalui sentra Pemberdayaan Pemuda.
 - c. Bangka Belitung, tanggal 16 s.d 18 Desember 2021
Fokus kegiatan pada strategi peningkatan koordinasi lintas OPD dalam menggerakkan Sentra Pemberdayaan Pemuda sebagai upaya menumbuhkan pemuda kader penggerak IPTEK yang menjadi bagian strategi peningkatan IPP.
4. Pelatihan Peningkatan Karakter Pemuda dalam era digital berupa pelatihan dengan materi keahlian digital dan materi mengenai pembangunan karakter pemuda yang unggul.

Gambar 3.8 Kegiatan *Pilot Project* Implementasi kebijakan



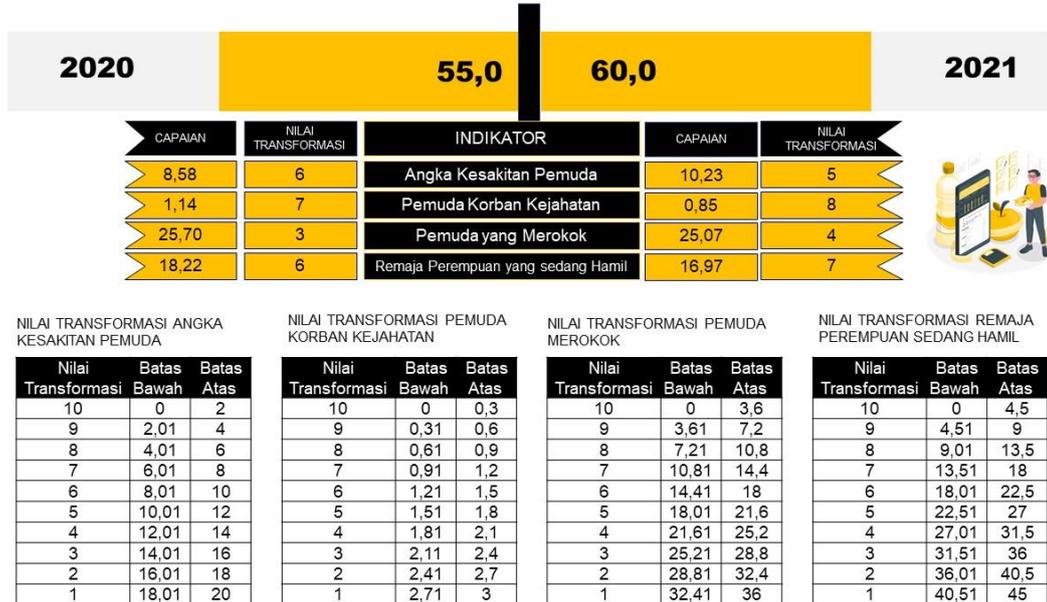


DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

Isu bidang kesehatan pemuda ditandai dengan masih tingginya prevalensi merokok pada pemuda, yaitu 25,70 persen pada 2020. Karena rokok identik dengan berbagai penyakit berbahaya, maka tingginya prevalensi merokok berpotensi menghambat penurunan angka kesakitan pemuda. Angka kesakitan di masa pandemi juga terkait erat dengan persentase remaja perempuan yang sedang hamil, yang angkanya meningkat dari 17,92 pada 2019 menjadi 18,22 persen di tahun 2020. Kenaikan angka tersebut cukup

mengkhawatirkan karena hamil pada usia remaja diasosiasikan dengan meningkatnya risiko penyakit terkait kesehatan reproduksi. Disisi lain, pandemi Covid-19 menimbulkan potensi adanya kasus HIV baru yang tidak terdeteksi mengingat terbatasnya layanan kesehatan di berbagai daerah. Selain itu, pembatasan aktivitas dan meningkatnya intensitas penggunaan gawai sebagai dampak pandemi, telah meningkatkan beban fisik dan risiko *sedentary lifestyle* di kalangan pemuda.

Exercise Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tahun 2021

CAPAIAN DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN
TAHUN 2020-2021

Gambar 3.9 Capaian Domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tahun 2020-2021

Indikator pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan tahun 2021 mengalami perbaikan kecuali indikator angka kesakitan Pemuda dari tahun 2020. *Exercise* perhitungan domain Kesehatan dan Kesejahteraan Tahun 2021 adalah 60, terdapat peningkatan dari tahun sebelumnya

Terkait dengan beberapa kegiatan yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang secara tematik memiliki keterkaitan dengan domain kesehatan dan kesejahteraan adalah sebagai berikut:

1. Program Kader Pemuda Anti Narkoba

Dalam RPJMN strategi peningkatan kualitas pemuda yang diemban oleh Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda terdapat pada indikator ke-3, yaitu Pencegahan Perilaku Beresiko (Bahaya Kekerasan, Perundungan, Penyalahgunaan Napza, Minuman Keras, HIV/AIDS, dan Penyakit Menular Lainnya). Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 program ini berhasil mencetak lebih dari 76.429 kader pemuda anti narkoba, Kemenpora memfasilitasi kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yaitu yang bertujuan untuk menyiapkan leader Pemuda Anti Narkoba yang mampu memberikan sosialisasi/ advokasi/ penyuluhan penanggulangan bahaya destruktif narkoba dalam memfasilitasi peningkatan

kapasitas pemuda dalam upaya pencegahan terhadap pengaruh bahaya destruktif narkoba.

Tabel 3.3 Jumlah Kader Pemuda Anti Narkoba

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
KIPAN	1.300	1.199	600	600	2.297	3.400
KOPAN	26.000	30.000	5.917	3.316		1.800
Total Kader	27.300	31.199	6.517	3.916	2.297	5.200

Pelaksanaan pelatihan KIPAN (Kader Inti Pemuda Anti Narkoba) di tahun 2021 karena masih pandemi Covid 19 maka tetap dilaksanakan melalui daring/online, dengan sasaran lokus 34 Provinsi. Dengan total peserta 3400 orang

GELOMBANG I 9 SD 11 JUNI 2021

Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung, Bali, NTT, dan NTB. Dengan total peserta 1100 orang atau 100 orang per provinsi.

GELOMBANG II 14 SD 16 JUNI 2021

Provinsi Banten, Jakarta, Kalbar, Kaltara, Kalteng, Kaltim, Sulbar, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Dengan total peserta 1100 orang atau 100 orang per provinsi.

GELOMBANG III 17 SD 19 JUNI 2021

Provinsi Jabar, Maluku, Jateng, Yogyakarta, Jatm, Riau, Kepri, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulut, dan Kalsel. Dengan total peserta 1200 orang atau 100 orang per provinsi.

Gambar 3.10 Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba Tahun 2021

2. Tanggal 8-9 November 2021, dilaksanakan workshop bersama Bareskrim dan Kementerian Kesehatan melalui rapat pembahasan Perumusan Kegiatan dan Sasaran Kegiatan berbasis indikator IPP domain Kesehatan dan Kesejahteraan disesuaikan dengan Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran
3. Pelatihan Peningkatan Kesehatan Reproduksi. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran pemuda akan kesehatan reproduksi melalui seminar dan diskusi aktif. Outcome kegiatan ini meningkatkan awareness pemuda terhadap kesehatan reproduksi sehingga pemuda lebih mampu untuk bersikap benar dan tepat dalam menjaga kesehatan reproduksi.

Tabel 3.4 Jumlah Kader Pemuda Pelatihan Peningkatan Kesehatan Reproduksi

NO.	KESPRO	WAKTU DAN TEMPAT	PESERTA
1	Bidang Kepelajaran	21 s.d. 23 Juni 2021 (Bangka Belitung)	150
2	Bidang Kemahasiswaan	21 s.d. 23 Juni 2021 (Bangka Belitung)	150
3	Bidang Kepemudaan	21 s.d. 23 Juni 2021 (Bangka Belitung)	150
4	Bidang Pramuka	10 s.d. 11 Oktober 2021 (Labuan Bajo)	150
5	Bidang Kepemudaan	10 s.d. 11 Oktober 2021 (Labuan Bajo)	150
6	Bidang Kemahasiswaan	4 November 2021 (Zoom – Daring)	450
7	Bidang Kemahasiswaan	6 s.d. 7 November 2021 (Bandung)	100
8	Bidang Kepelajaran	11 November 2021 (Daring)	450
9	Bidang Kepemudaan	29 November 2021 (Daring)	450
Total			2.200 orang

DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA

Isu utama ketenagakerjaan pemuda masih tetap didominasi oleh tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda, yang pada 2020 angkanya mencapai 15,23 persen berdasarkan Survei Angkatan Kerja nasional (SAKERNAS) bulan Agustus 2020. TPT tersebut meningkat dari 13,03%

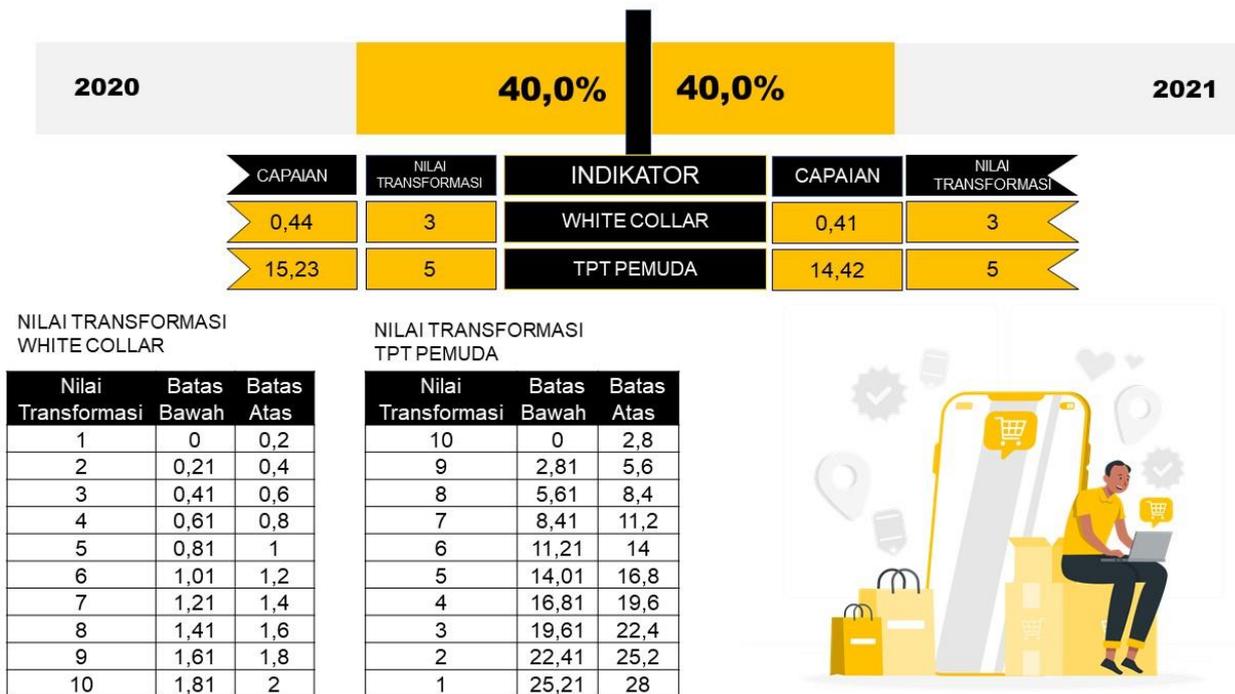
pada 2019 akibat pembatasan aktivitas dan PHK selama pandemi. Kondisi tersebut juga berkontribusi pada peningkatan informalitas pekerjaan di kalangan pemuda. Banyaknya pekerja lepas (freelance) merupakan salah satu bentuk informalitas di pasar kerja. Aktivitas kerja di sektor informal tersebut

terpaksa dilakukan sebagai strategi bertahan hidup mengingat pekerjaan berstatus formal sangat sulit didapat pada saat pandemi. Hal ini penting untuk perencanaan ketenagakerjaan

di masa mendatang mengingat animo pemuda untuk terlibat dalam kewirausahaan mengalami peningkatan

EXERCISE DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA TAHUN 2021

CAPAIAN DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA TAHUN 2020-2021



Gambar 3.11 Capaian Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja Tahun 2020-2021

Indikator Persentase pemuda wirausaha kerah putih mengalami penurunan dari tahun 2020 dan tingkat pengangguran terbuka pun mengalami penurunan Namun, secara domain tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 40, hal ini karena nilai transformasi pada setiap indikator Domain 3 masih berada dalam interval yang sama

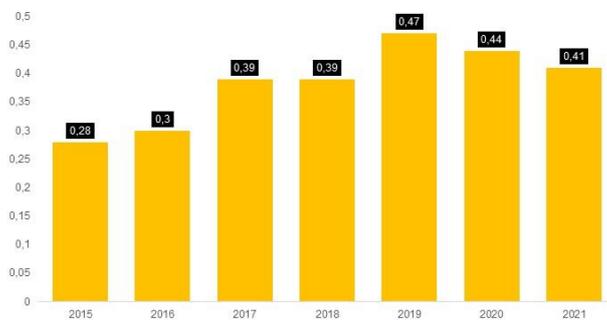
Agar adanya peningkatan pada domain lapangan dan kesempatan kerja pemuda maka diperlukan:

- a. Persentase pemuda wirausaha kerah putih di atas 0,6
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di bawah 14%

Tingginya TPT pemuda telah terjadi sejak sebelum pandemi COVID-19, salah satu penyebabnya adalah rendahnya daya saing pemuda di pasar kerja. Lulusan sekolah menengah juga sering dianggap belum siap kerja. Selain itu, belum selarasnya kebutuhan

keterampilan dengan penawaran di pasar kerja juga berkontribusi pada tingginya TPT pemuda. Namun di satu sisi, indikator persentase pemuda wirausaha kerah putih secara konsisten meningkat pada periode 2015-2019

**PERSENTASE PEMUDA (USIA 16-30TAHUN)
WIRAUSAHA KERAH PUTIH (WHITE COLLAR)**



Setiap tahun rata-rata persentase pemuda wirausaha kerah putih mengalami peningkatan sebesar 0,048 poin persentase. Akan tetapi, pandemi COVID-19 mendisrupsi tren positif pemuda wirausaha kerah putih dengan penurunan menjadi 0,44 persen di tahun 2020.

“ Persentase pemuda wirausaha kerah putih secara konsisten meningkat pada periode 2015-2019. ”



Gambar 3.12 Infografis Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (Sumber *World Economic Forum ASEAN Youth Survey 2019*)

Tentu hal ini harus menjadi perhatian mengingat laporan World Economic Forum (WEF) ASEAN Youth Survey 2019 menyebutkan persentase pemuda (usia 15-35 tahun) Indonesia yang ingin menjadi wiraswasta adalah yang tertinggi (35,5 persen) di antara enam negara ASEAN yang disurvei. Survei WEF ini juga menyebutkan, para pemuda yang bergairah tinggi menjadi pengusaha ini terinspirasi oleh meledaknya perusahaan start-up

unicorn (yang mencapai valuasi 1 miliar dolar AS). Tokoh muda yang menjadi inspirasi para pemuda ini di antaranya Ferry Unardi (pendiri Traveloka), Nadiem Makarim (pendiri Gojek), William Tanuwijaya (pendiri Tokopedia) dan Ahmad Zaky (Bukalapak). Figur-figur tersebut dinilai mampu mengubah perusahaan digital masing-masing menjadi bernilai miliaran dolar dalam waktu yang relatif singkat.

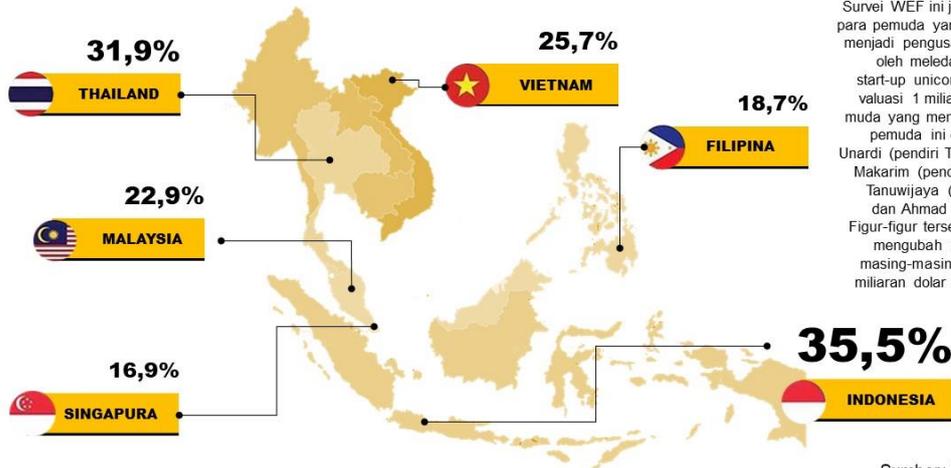
**PERSENTASE PEMUDA (USIA 15-35 TAHUN)
INDONESIA YANG INGIN MENJADI WIRASWASTA**

Indonesia menjadi Negara ASEAN yang tertinggi (35,5 persen) di antara 6 (enam) negara ASEAN yang disurvei.



1 DARI 3

pemuda Indonesia bercita-cita untuk berwirausaha.

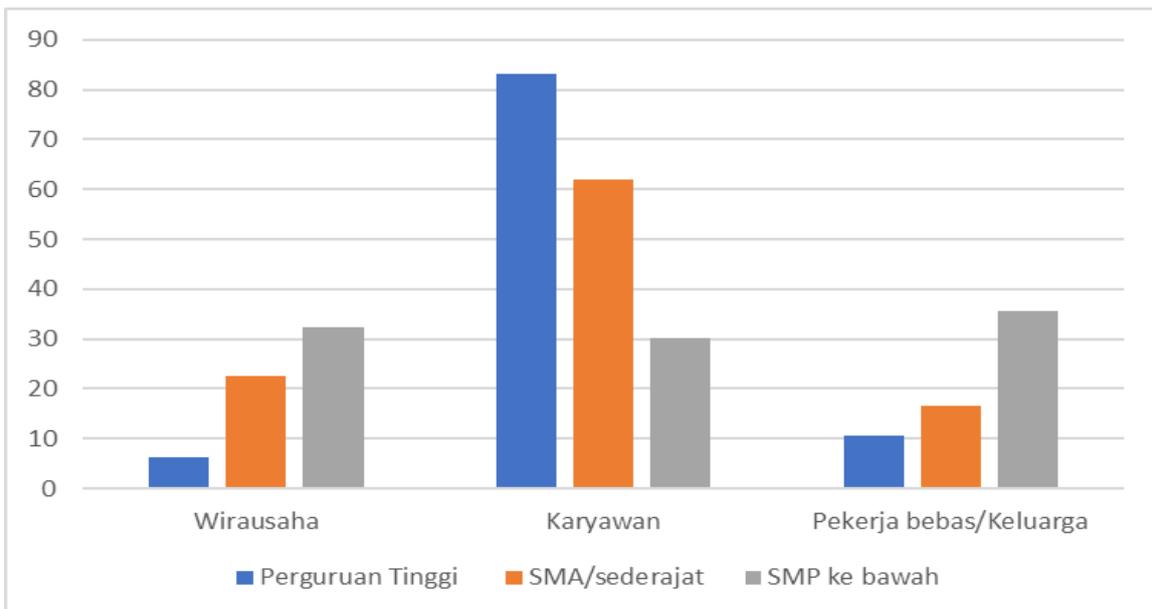


Survei WEF ini juga menyebutkan, para pemuda yang bergairah tinggi menjadi pengusaha ini terinspirasi oleh meledaknya perusahaan start-up unicorn (yang mencapai valuasi 1 miliar dolar AS). Tokoh muda yang menjadi inspirasi para pemuda ini di antaranya Ferry Unardi (pendiri Traveloka), Nadiem Makarim (pendiri Gojek), William Tanuwijaya (pendiri Tokopedia) dan Ahmad Zaky (Bukalapak). Figur-figur tersebut dinilai mampu mengubah perusahaan digital masing-masing menjadi bernilai miliaran dolar dalam waktu yang relatif singkat.

Sumber: World Economic Forum (WEF) ASEAN Youth Survey 2019

Gambar 3.13 Infografis Persentase Pemuda Yang Ingin Menjadi Wiraswasta (Sumber *World Economic Forum ASEAN Youth Survey 2019*)

Tantangan yang saat ini dihadapi terkait kebijakan kewirausahaan pemuda adalah belum adanya data spesifik mengenai kewirausahaan pemuda, walaupun program-program relevan kewirausahaan pemuda sudah dijalankan.

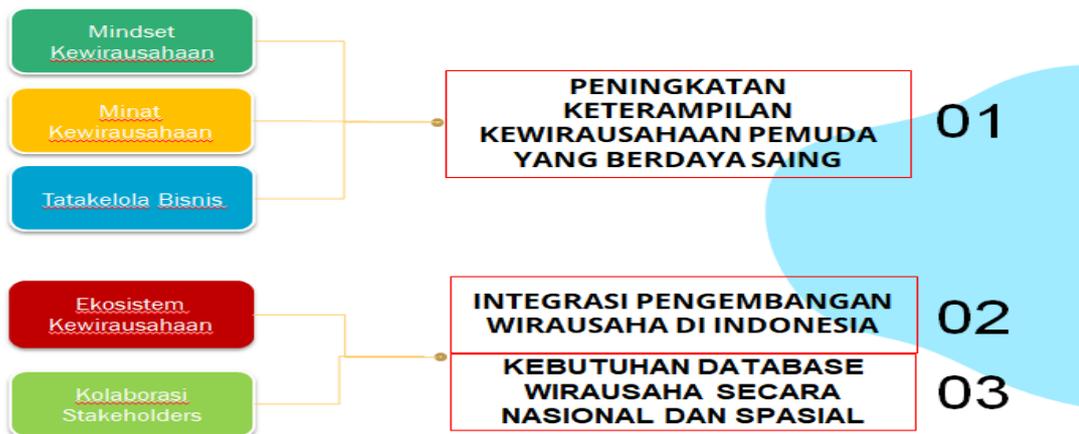


Gambar 3.14 Grafik Rendahnya Jiwa Wirausaha (Sumber : BPS (2020))

Grafik tersebut menunjukkan minat lulusan sarjana untuk menjadi wirausaha (jiwa kewirausahaan) masih rendah, hal ini dikarenakan para lulusan sarjana memiliki *mindset* untuk bekerja di perusahaan setelah lulus.

Dalam konteks pengembangan kewirausahaan bagi pemuda, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai *leading sector* pembangunan kepemudaan di Indonesia, mendesain dan melaksanakan berbagai program pelatihan, pendampingan, promosi

dan akses permodalan dengan tujuan utama menumbuhkan minat dan karakter pemuda untuk berwirausaha; mengubah *mindset* kebanyakan pemuda bahwa bekerja tidak melulu dimaknai sebagai upaya mencari pekerjaan (*job seeker*) tetapi terutama dimaknai sebagai penciptaan lapangan kerja (*job creator*); mendampingi dan memfasilitasi kegiatan usaha produktif yang sedang dirintis pemuda agar dalam proses dan dinamikanya kemudian berkembang menjadi pengusaha muda mapan.



Gambar 3.15 Isu Kebijakan dalam Kewirausahaan Pemuda (Stranas Kewirausahaan)

Intervensi yang dilakukan Kemenpora dalam cakupan area pengembangan kewirausahaan pemuda begitu luas, sehingga pada Kementerian Pemuda dan Olahraga lebih memfokuskan pada upaya intervensi kepada kelompok pemuda fase pra wirausaha. Bentuk intervensi pada fase prawirausaha dilakukan dengan upaya:

1. Menumbuhkan wirausaha pemula di kalangan pemuda melalui penumbuhan minat, pembentukan *mindset*, dan pengembangan kompetensi wirausaha;
2. Memperbaiki lingkungan atau ekosistem pengembangan kewirausahaan Pemuda.

Fasilitasi kemenpora dalam penumbuhan minat adalah dengan memfasilitasi pemuda sebagai sebagai kader kewirausahaan terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

a. Kuliah Kewirausahaan Pemuda,

Kegiatan Kuliah kewirausahaan Pemuda dilaksanakan dengan bekerja sama dengan 26 Perguruan Tinggi dan Lembaga pengembangan kewirausahaan. Kegiatan ini memiliki beberapa tahap yaitu mulai dari Kick Off Kuliah Kewirausahaan, kuliah kewirausahaan tahap I, II dan III gelar produk. Kick Off Kuliah kewirausahaan ini dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi dan pembahasan pelaksanaan teknis dengan perguruan tinggi/Lembaga pengembangan kewirausahaan mitra program.

b. Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda

Kegiatan Penumbuhan Minat Kewirausahaan di Kalangan Pemuda ini dilaksanakan dalam bentuk workshop yang berlangsung sehari penuh. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga lokasi yaitu Jayapura, Kalimantan Timur, dan Semarang. Target peserta ini lebih dikhususkan untuk pemuda yang berasal dari daerah setempat dengan latar belakang apapun.

c. Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur.

Program Pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Pesantren/Pesantrenpreneur. Merupakan program pemberian bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Lembaga pesantren. Program tersebut dimaksudkan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kegiatan entrepreneurship di kalangan pesantren untuk meningkatkan kemandirian para santri. dukungan pemerintah berupa bantuan uang tunai yang diberikan kepada kelompok masyarakat/organisasi/ lembaga/yayasan/pesantren yang memiliki kepedulian dan kompetensi dalam pengembangan kewirausahaan pemuda yang dialokasikan senilai Rp. 1.300.000.000 untuk 13 paket. Program ini menjangkit 1.352 peserta dari 13 Pesantren yang mendapatkan fasilitasi kegiatan pesantrenpreneur.

Tabel 3.5 Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN (ORANG)				CAPAIAN 2021		
	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	8.340	4.050	5100	43.823	5000 Orang	64.294 Orang	643

Untuk mendorong serta memperbaiki lingkungan atau ekosistem pengembangan kewirausahaan Pemuda, Kemenpora memberikan Fasilitas Akses Permodalan bagi WMP adalah kegiatan memberikan bantuan modal kepada para pemuda, baik secara perorangan dalam bentuk dana hibah (cash) yang dapat digunakan oleh WMP penerima bantuan untuk mengembangkan usahanya.



Gambar 3.16 Fasilitas Akses Permodalan Bagi WMP

Alokasi bantuan pemerintah bagi WMP tahun 2021 berubah dari 475 paket menjadi 515 paket seiring penambahan pagu dengan varian nilai bantuan Rp. 10.000.000 dan Rp. 15.000.000 untuk setiap paketnya. Bantuan ini diberikan kepada usaha perorangan yang diajukan dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur melalui Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Nomor 12.28.11 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Wirausaha Muda Pemuda,

Sociopreneur Dan Sentra Kewirausahaan Pemuda Tahun 2021.

Hingga batas waktu yang ditentukan, terdapat sebanyak 3470 proposal permohonan bantuan WMP yang masuk. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Juknis, terhadap seluruh proposal yang masuk dilakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dan penilaian usaha. Proposal yang dinyatakan lulus seleksi dan diberikan dana bantuan sebanyak 570 orang.

Tabel 3.6 Jumlah wirausaha muda yang memperoleh fasilitasi akses permodalan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN (ORANG)				CAPAIAN 2021		
	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Jumlah wirausaha muda yang memperoleh fasilitasi akses permodalan	NA	987	957	1072	500 Orang	570 Orang	114

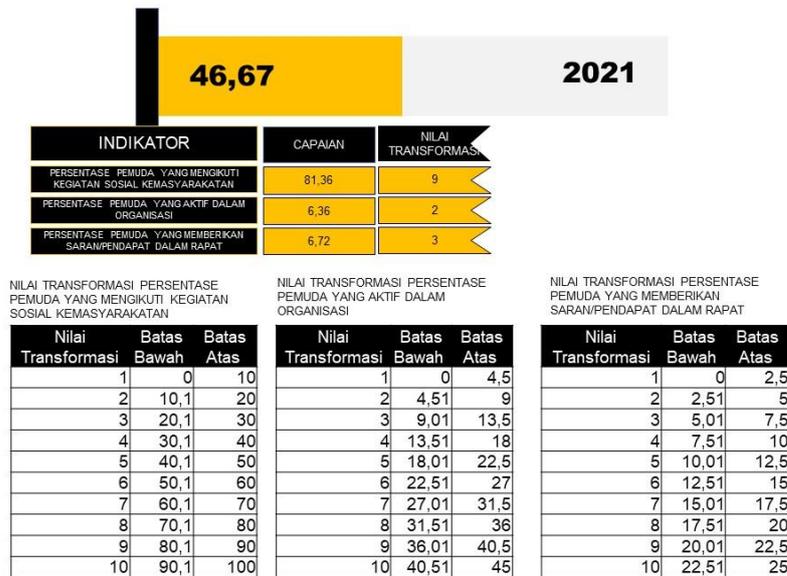
Stimulus pengembangan usaha bagi wirausaha muda menjadi upaya nyata kemenpora dalam peningkatan nilai indeks partisipasi pemuda dalam perekonomian. Jangkauan penerima dan kesetaraan gender masih dalam komposisi yang proporsional sehingga kesempatan untuk memperoleh dukungan cukup kecil tingkat kesenjangannya.

DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN

Pemuda diharapkan semakin berperan aktif dalam organisasi dan mampu menyampaikan aspirasinya. Namun demikian meskipun keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sudah mencapai 81,6 persen, keterlibatan pemuda dalam organisasi masih sangat rendah, yaitu hanya sekitar 6,36 persen. Angka yang juga rendah adalah partisipasi pemuda dalam menyampaikan aspirasi atau usulan pendapat, yaitu 6,72 persen. Adanya rasa tidak percaya diri, skeptisisme dan rasa takut menyampaikan pendapat

merupakan beberapa alasan pemuda tidak berperan aktif dalam organisasi (*Indonesian Youth Council for Tobacco Control, 2021*). Stagnasi pada indikator partisipasi dan kepemimpinan pemuda bisa jadi dipicu oleh faktor internal maupun eksternal pemuda. Belum adanya kesadaran untuk menyuarakan hak-hak pemuda merupakan salah satu faktor dari sisi pemuda. Pada saat bersamaan, risiko untuk berbicara di ruang publik merupakan faktor yang ditemui berdasarkan survei IYCTC (2021).

Exercise Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Tahun 2021

CAPAIAN DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN
TAHUN 2021

CATATAN:
Khusus untuk domain partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda data yang dipergunakan dalam perhitungan IPP 2021 masih menggunakan data 2018



Gambar 3.17 Capaian Domain Partisipasi dan Kepemimpinan Tahun 2020-2021

Pada domain partisipasi dan kepemimpinan data yang digunakan masih menggunakan data Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2018 (MSBP) dan masih menunggu MSBP 2021. Agar adanya peningkatan pada domain 4, maka diperlukan:

- Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan di atas 90%
- Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi di atas 9%
- Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat di atas 7,5%

Komponen penting dalam meningkatkan partisipasi pemuda dapat dilakukan melalui pendekatan bahwa pembangunan harus bermanfaat bagi pemuda melalui 3 cara, yakni: melibatkan pemuda sebagai penerima manfaat, sebagai mitra dan pemuda sebagai pemimpin sehingga harapannya keterlibatan pemuda menjadi bermanfaat dan bermakna. Untuk itu Kemenpora berupaya melalui strategi pemetaan **program/kegiatan Kemenpora** yang bertujuan untuk:

1. Memperkuat peran Pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan organisasi.
2. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman Pemuda untuk berperan aktif di masyarakat.
3. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan Pemuda.
4. Meningkatkan kemampuan Pemuda dalam kepeloporan dan kesukarelawanan.
5. Meningkatkan peran Pemuda dalam perspektif toleransi dan kerukunan sosial.
6. Menumbuhkan dan memberdayakan organisasi kepemudaan di Indonesia.

Terkait dengan beberapa kegiatan yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang secara tematik memiliki keterkaitan dengan domain partisipasi dan kepemimpinan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Kegiatan Tematik Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

INDIKATOR	FASILITASI	TARGET	REALISASI 2021	LOKASI	KETERANGAN
Peningkatan Peran Pemuda dalam partisipasi aktif dan kegiatan sosial kemasyarakatan	Pemberdayaan Pemuda dalam peningkatan ekonomi bidang kemaritiman dan pariwisata	100	100	Belitung dan Bali	Diampu oleh Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda
	SSEAYP	29	29	Jakarta	Diampu oleh Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda
	Pemberdayaan Pemuda Bidang Lingkungan	100	100	Semarang dan Bengkulu	Diampu oleh Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda
	Pembinaan pemuda dan sosialisasi kebijakan peningkatan kapasitas pemuda	80	80 (Pemuda Alumni yang melaksanakan <i>Action Plan</i> dengan peserta sebanyak 13.200.000)	20 Provinsi	Diampu oleh Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda
	Bantuan peningkatan kapasitas pemuda (20 Paket) dalam rangka kaukus pemuda maritim	1000	1000	Bandung, Papua Barat, Bengkulu Tengah, Medan, Palu, Lamongan,	Diampu oleh Asdep Peningkatan Kapasitas Pemuda

INDIKATOR	FASILITASI	TARGET	REALISASI 2021	LOKASI	KETERANGAN
				Langkat, Kolaka Timur, Bengkulu Selatan, Banten, Sumut, Bali, Lampung, Sulteng, Yogyakarta, Jatim, Makassar, Gunung Kidul	
Pengembangan kemampuan kepemimpinan pemuda serta Peningkatan kemampuan pemuda dalam kepeloporan dan kesukarelawanan	Paskibraka	68 orang	68 Orang	34 Provinsi	Diampu oleh Asdep Kepeloporan dan Kepimpinan Pemuda Outcome : Meningkatkan jiwa patriotism disamping itu ilmu dan pengalaman yang diperoleh
	Lembaga/ Komunitas Kepemudaan Kader yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	45 Lembaga	45 Lembaga	34 Provinsi	Diampu oleh Asdep Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda Outcome : Mengasah potensi pemuda guna menghadapi tantangan yang lebih berat dimasa depan
	Pemuda Mandiri membangun Desa	200 Orang	200 Orang	10 Provinsi	Diampu oleh Asdep Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda Outcome : Mengembangkan potensi kapasitas dan keterampilan yang dimiliki pemuda yang sedang berada di tengah-tengah masyarakat pedesaan dan dapat mendorong percepatan pembangunan di pedesaan.
	Pemuda Kader yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	3000 Orang	3000 Orang	34 Provinsi	Diampu oleh Asdep Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda Outcome :

INDIKATOR	FASILITASI	TARGET	REALISASI 2021	LOKASI	KETERANGAN
					Menghasilkan peningkatan kualitas kepemimpinan pemuda yang patriotik, berbudaya, inspiratif, berprestasi dan menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat
	Pemimpin Pemuda yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepemimpinan Nasional	100 orang	100 Orang	Jakarta, Bogor dan Serang	Diampu oleh Asdep Kepeloporan dan Kepemimpinan Pemuda Outcome : Mempersiapkan pemuda untuk bisa memimpin suatu organisasi ataupun instansi tertentu
	Pemuda Kader yang difasilitasi dalam Pelatihan Kepemimpinan dan Rumah Tangga,	400 orang	400 Orang	Jakarta, Serang, Tangerang Selatan dan Lampung	Kepemimpinan Pemuda Outcome : Mempersiapkan pemuda untuk bisa memimpin dan membangun rumah tangga yang baik
Peran Pemuda dalam perspektif dan kerukunan sosial	Pelatihan Pencegahan Radikalisme	5000 Orang	5437 Orang	Jabar, Jatim, Jateng, NTB, Sulteng, dan Kalbar	Diampu oleh Asdep Peningkatan Wawasan Pemuda, kegiatannya dilaksanakan dengan 2 model kegiatan melalui online di 6 Provinsi dengan capaian 2.830 orang dan bantuan dengan total capaian 2607 orang Outcome : Menyiapkan kader pemuda yang sadar dan faham akan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan penguatan ideologi Pancasila
Menumbuhkan dan memberdayakan organisasi kepemudaan di Indonesia.	Pelatihan Penguatan Organisasi Kepelajaran	500 Orang	626 orang	Bogor, Yogyakarta dan Lampung	Diampu oleh Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Outcome : Menguatkan kapasitas wawasan dan motivasi

INDIKATOR	FASILITASI	TARGET	REALISASI 2021	LOKASI	KETERANGAN
					para pengurus Organisasi Kepelajaraan
	Pelatihan Penguatan Organisasi Kemahasiswaa	500 Orang	636 orang	Bali dan Aceh	Diampu oleh Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Outcome : Menguatkan kapasitas wawasan dan motivasi para pengurus Organisasi Kemahasiswaan serta pengembangan karakter
	Pelatihan Organisasi Kepemudaan	160 Orang	176 orang	Jakarta	Diampu oleh Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Outcome : Memotivasi para pengurus organisasi Kepemudaan untuk dapat memberdayakan organisasi yang mereka bina.
	Forum Organisasi Kepemudaan	1020 Orang	1630 orang	Jakarta	Diampu oleh Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Outcome : Meningkatkan wawasan Pemuda dengan isu dan fenomena social terkini, berjiwa nasionalis, Pancasila dan berwawasan luas
	Bantuan Lembaga Kepramukaan	41 Lembaga	41 Lembaga setara 2183 orang		Diampu oleh Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Outcome : Meningkatkan semangat gerakan pramuka peningkatan soft skill maupun hard skill kepramukaan
	Fasilitasi Kegiatan Organisasi Kepemudaan	27 Lembaga	33 Lembaga setara 8161 orang		Diampu oleh Asdep Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan Outcomenya : Memperkuat kelembagaan sebagai wadah mandiri kreatif

Beberapa dokumentasi fasilitasi kegiatan mendukung tematik domain partisipasi dan kepemimpinan



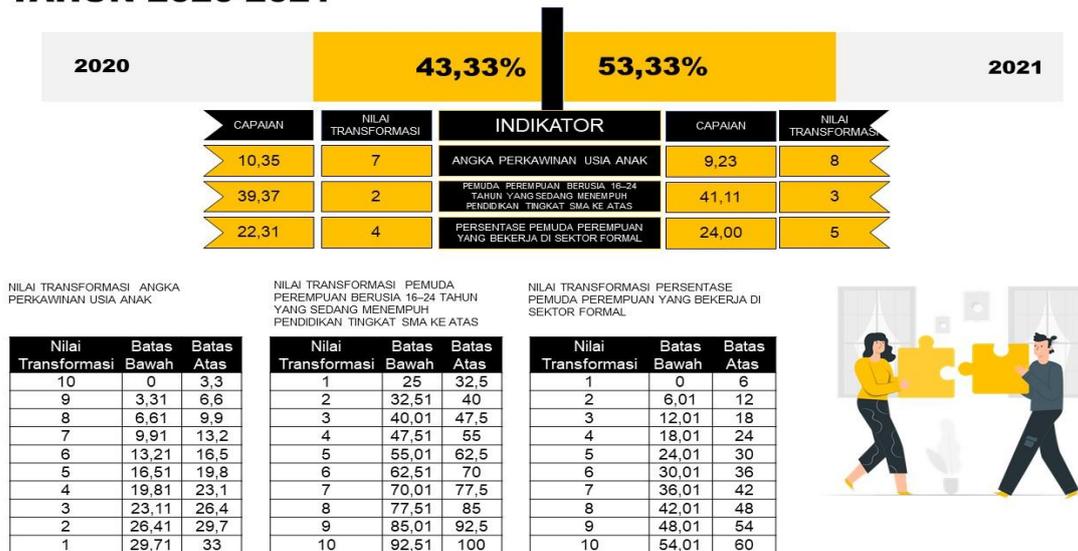
Gambar 3.18 Fasilitasi Partisipasi Pemuda dan Kepemimpinan

DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI

Di tengah semakin meningkatnya kesadaran mengenai pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, persentase perempuan yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi mengalami kenaikan walau kenaikannya semakin mengecil (slowing down), yaitu dari 39,21 persen (2019) menjadi 39,37 persen (2020). Kondisi ini perlu diwaspadai karena berpotensi menurunkan penetrasi perempuan ke pasar kerja, khususnya pada sektor formal. Hal ini tercermin dari penurunan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal, yaitu dari 26,06 persen pada tahun 2019 menjadi 22,31 persen pada tahun 2020. Isu lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya dispensasi perkawinan usia anak selama pandemi COVID-19.

Exercise Domain Gender dan Diskriminasi Tahun 2021

CAPAIAN DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI TAHUN 2020-2021



Gambar 3.19 Capaian Domain Gender dan Diskriminasi Tahun 2020-2021

Dari gambar di atas ketiga Indikator pada domain Gender dan Diskriminasi mengalami perbaikan dan berdampak pada peningkatan yang signifikan pada Nilai Domain pada tahun 2021 menjadi 53,33. Domain ini menjadi domain yang memberikan dampak pada peningkatan IPP secara Nasional dibandingkan dengan tahun 2020.

Terkait dengan beberapa kegiatan yang dilakukan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang secara tematik memiliki keterkaitan dengan domain gender dan diskriminasi adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Tenaga Pendamping Bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus.

Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus Tahun 2021 ini diadakan di Provinsi Bali secara fullboard tanggal 22 – 24 September 2021 dengan melibatkan Dispora Provinsi dan peserta lokal sebanyak 50 orang (offline) dan 20 perwakilan lembaga secara online (via Zoom) dengan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian pemuda berkebutuhan khusus dan tersedianya Tenaga Pendamping Bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus yang memiliki berkualitas dalam mengembangkan kompetensi dan kemandirian pemuda berkebutuhan khusus.

b. Workshop Kajian dan Penyusunan Pedoman/Kurikulum Pelatihan Tenaga Pendamping Bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus Tahun 2021

kegiatan Workshop Kajian dan Penyusunan Pedoman/Kurikulum Pelatihan Tenaga Pendamping Bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus di Kota Bogor tanggal 6 – 8 September 2021.

Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan nasional khususnya pemuda berkebutuhan khusus salah satunya melalui program Pelatihan Tenaga Pendamping Bagi Pemuda Berkebutuhan Khusus Kader Tingkat Nasional. Dalam rangka mendukung kegiatan pelatihan tersebut, dibutuhkan pedoman/kurikulum pelatihan.

c. Bantuan pemerintah kepada pemuda berkebutuhan khusus.

Dengan berdasar pada Undang-Undang Kepemudaan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan nasional khususnya pemuda berkebutuhan khusus melalui yayasan/lembaga/komunitas pemuda berkebutuhan khusus, melakukan upaya pemberdayaan tersebut dengan kegiatan berupa bantuan pemerintah kepada pemuda berkebutuhan khusus. Tahun 2021 diberikan kepada 15 yayasan/lembaga/komunitas penerima bantuan pemerintah untuk kegiatan pemuda berkebutuhan khusus

SASARAN STRATEGIS 2
Terwujudnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang berkualitas dan terintegrasi
INDIKATOR KINERJA 2.1
Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Indikator	Target 2021	Realisasi	Capaian%
Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan	70	87.5	125

Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga saat ini mutlak diperlukan dalam rangka pembangunan kepemudaan agar pemberdayaan pemuda yang berkualitas dan berdaya saing dapat terwujud. Merujuk hal tersebut capaian persentase K/L peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dapat diukur melalui keterlibatan K/L yang mengimplementasikan kebijakan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda di tahun 2021 yaitu sebanyak 28 K/L dibandingkan dengan jumlah 32 K/L yang tercantum dalam matriks Rencana Aksi Nasional Pelayanan

Kepemudaan yang tercantum pada Lampiran revisi Peraturan Presiden No.66 tahun 2017 sebagai upaya sinergitas program kegiatan antar Kementerian Lembaga.

Dalam implementasi pelaksanaan Perpres No. 66 Tahun 2017 masih ditemui kendala, untuk itu peran Kemenpora sebagai sekretariat harus optimal karena isu kepemudaan harus menjadi tanggung jawab semua elemen bangsa mulai dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengampu isu kepemudaan, swasta, akademisi dan lembaga penelitian yang concern pada isu kepemudaan di Indonesia

Pada tahun 2021 **sinergi K/L** dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya pada bidang pengembangan dan pemberdayaan Pemuda adalah sebagai berikut:



Gambar 3.20 Sinergitas Kementerian/Lembaga (K/L) di tahun 2021

Meningkatnya kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang menangani kepemudaan ditandai dengan:

1. Meningkatnya kelembagaan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah dengan penambahan dua unit eselon 2 pada struktur kedeputian bidang kepemudaan yakni adanya Sekretariat Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebagai bagian untuk memaksimalkan pelayanan pemberdayaan kepemudaan;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengawasan, administrasi keuangan dan kepegawaian, serta pelayanan umum;
3. Meningkatnya sinergi lintas sektor dibidang kepemudaan melalui terwujudnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan, yaitu kesadaran dan pemberdayaan kepemudaan;
4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pemuda melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan kehumasan, pelayanan hukum dan kepegawaian, serta peningkatan kinerja perencanaan, penganggaran, pengorganisasian dan evaluasi program;
5. Meningkatnya layanan sistem informasi yang responsif dan transparan, tersedianya layanan data dan informasi yang cepat dan akurat.

INDIKATOR KINERJA 2.2

Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di Tingkat Pusat dan Provinsi yang Terbentuk

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di Tingkat Pusat dan Provinsi yang Terbentuk

Indikator	Target 2021	Realisasi	Capaian%
Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di Tingkat Pusat dan Provinsi yang terbentuk	25%	25%	100

Berdasarkan perpres No. 66 Tahun 2017 terlampir Rencana Aksi Nasional namun implementasi terkait hal ini masih dirasa kurang terkait koordinasi lintas sector oleh karena itu pada RAN Kepemudaan 2020 - 2024, diupayakan agar RAN yang dibuat memiliki keterkaitan dengan IPP sebagai indikator utama pembangunan pemuda Indonesia Karena RAN Kepemudaan mencakup isu yang begitu vital bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni pada isu pemuda. Untuk koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan perlu dibentuk tim koordinasi, pada tahun 2021 draf SK Tim Sekretariat dan Tim Kelompok Kerja sudah tersusun sebanyak 9 tim yang terdiri dari Sekretariat Pusat (Kemendikbud) dan 8 daerah yang sedang melakukan proses finalisasi RAD atau 25% sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan maka tugas dari Tim Koordinasi tersebut adalah:

1. Menyusun mekanisme kerja dan menetapkan sekretariat Tim Koordinasi
2. Melaksanakan rapat koordinasi rutin minimal 3 bulan sekali, atau 4 kali dalam satu tahun
3. Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kepemudaan diluar pemerintahan terutama jejaring pemuda
4. Melibatkan jejaring pemuda dalam koordinasi dan pelaksanaan RAN dan RAD Kepemudaan
5. Melibatkan dunia usaha sebagai sumber daya alternatif dalam mendorong dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan
6. Mengelola pemantauan dan evaluasi pencapaian indikator strategis dan indikator kinerja

7. Menyiapkan laporan berkala kepada Presiden untuk disampaikan kepada masyarakat kepemudaan

Tim koordinasi yang akan dibentuk terdiri atas:

1. Tim Koordinasi Nasional penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan
Merupakan tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Tim koordinasi ini terdiri atas: tim pengarah dan tim pelaksana.
2. Tim Koordinasi Provinsi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan
Merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah provinsi. Pembentukan tim ini ditetapkan oleh gubernur.
3. Tim Koordinasi Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
Merupakan tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di daerah kabupaten/kota. Pembentukan tim ini ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Perpres No.66/2017 perlu direvisi karena alasan-alasan berikut:

1. Rencana Aksi Nasional (RAN) 2015-2019 telah habis masa berlakunya pada akhir tahun 2019 dan perlu disusun RAN baru periode 2020-2024. Karena RAN 2015-2019 merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Perpres 66/2017 dan masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2019 maka secara otomatis dan yuridis Perpres No. 66/2017 harus direvisi.
2. Secara substansial sejumlah pasal dalam Perpres No.66/2017 mengalami perubahan signifikan, antara lain Pasal yang mengatur tentang Pengarah dan Pelaksana Koordinasi Lintas Sektor (Pasal 11-14) diubah menjadi Tim Koordinasi Nasional. Perubahan ini dilakukan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan koordinasi dengan memangkas alur birokrasi yang panjang.
3. Beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) yang menjadi mitra koordinasi lintas sektor saat ini mengalami perubahan nomenklatur, sementara itu nama K/L yang tercantum di dalam Perpres 66/2017 adalah K/L dari periode pemerintahan 2015-2019.

Pelaksanaan penyusunan Revisi Perpres No. 66 tahun 2017 telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan proses sebagai berikut:

1. Pada tanggal 6 Mei 2021 Kementerian Pemuda dan Olahraga mengirimkan surat Nomor: HK.01/5.6.2/MENPORA/V/2020 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Surat tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melaksanakan secara daring (online) dimulai pada bulan Juni hingga September 2021 yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari : Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kemendagri, Kemenag, Kemendikbudristek, Kemenaker, Kemenkeu, Kemenkes, Kemensos, Kemenhan, Kemenperin, Kemenhub, Kemenkominfo, Kementan, KLHK, KemendesPDDT, KemenKUKM, KKP, Kemenparekraf, KPPPA, BRIN, BPIP, BKKBN, BNN, BNPT, Perpunas RI dan Internal Kementerian Pemuda dan Olahraga yang antara lain Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Biro Humas dan Hukum dan Tim Penyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyelenggaraan Kepemudaan.
3. Pada proses harmonisasi terdapat berbagai kendala terkait dengan format matriks RAN yang merupakan Lampiran dari Rperpres tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yaitu beberapa perubahan dan penyesuaian yang diminta oleh Bappenas. Terkait hal tersebut, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda melaksanakan rapat Updating Matriks Program dan Kegiatan RAN Pelayanan Kepemudaan Tahun 2021-2024 dengan mengundang seluruh Kementerian/Lembaga yang mempunyai program terkait dengan bidang Kepemudaan.
4. Pada tanggal 10 September 2021 Kemenkumham menyampaikan surat Nomor: PPE.PP.02.02-1572 hal Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.
5. Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan surat kepada Presiden Nomor: HK.01/9.29.3/MENPORA/IX/2021 tanggal 29 September 2021 Perihal Permohonan Penetapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepemudaan.

6. Menindaklanjuti surat Menpora tersebut, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan surat nomor: B-844/MD-1/HK.03.03/10/2021 hal: Permintaan Paraf Rancangan Peraturan Presiden Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan tanggal 25 Oktober 2021 ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
7. Pada tanggal 31 Desember 2021 Kementerian Sekretariat Negara melaksanakan rapat dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Sekretariat Negara Nomor: B-844/M/D-1/HK.03.03/10/2021 hal Permintaan Paraf Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (RPerpres) dan sehubungan dengan adanya masukan dari kementerian/lembaga terhadap RPerpres. Rapat tersebut dilakukan

INDIKATOR KINERJA 2.3

Persentase Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Persentase Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan

Indikator	Target 2021	Realisasi	Capaian%
Persentase Provinsi yang Melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan	25%	25%	100%

Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai Rencana Kerja Pemerintah terkait sasaran dan Indikator Proyek Prioritas Kepemudaan dalam penyusunan RAD, maka menetapkan target sebagai berikut:

1. tahun 2021 sebanyak 25% Pemerintah Provinsi telah Menyusun RAD Layanan Kepemudaan
2. tahun 2022 sebanyak 25% Pemerintah Provinsi telah Menyusun RAD Layanan Kepemudaan
3. tahun 2023 sebanyak 50% Pemerintah Provinsi telah Menyusun RAD Layanan Kepemudaan

Sehingga pada tahun 2023 seluruh Pemerintah Provinsi telah selesai Menyusun RAD Layanan Kepemudaan. Untuk tahun 2021 ini, beberapa provinsi berupaya melakukan Penyusunan RAD Kepemudaan dengan pendampingan dari Kemenpora melalui Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda yang berpedoman pada beberapa hal, yaitu:

1. RAD Pelayanan Kepemudaan merupakan acuan pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota).
2. Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan di tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota) seyogyanya mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan, namun demikian penyusunan RAD harus tetap mempertimbangkan karakteristik kewilayahan dan kearifan lokal (local wisdom) sehingga pembangunan kepemudaan itu tepat sasaran dan berdampak positif bagi pemuda di setiap daerah.

Hasil dari pendampingan tersebut ada 8 Provinsi yang terus berupaya memfinalisasi draft RAD, yaitu :

1. DKI Jakarta
2. Banten
3. Jawa Timur
4. Sumatera Selatan
5. Kalimantan Timur
6. Jawa Barat
7. DIY Yogyakarta
8. Riau

Pendampingan tersebut dilakukan dalam rangka pemetaan kesiapan daerah sehingga dilaksanakan beberapa kali pertemuan Rapat Persiapan Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2020-2024 secara online dengan mengundang Pemerintah Daerah yang ada di seluruh Indonesia (27 dari 34 Provinsi dan 363 Pemerintah Kabupaten/Kota).

- 1) 1 April 2021
Peserta rapat: Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Riau
- 2) 14 April 2021
Peserta rapat: Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan
- 3) 27 April 2021
Peserta rapat: Bali, NTB, Kalimantan Utara
- 4) 29 April 2021
Peserta: Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat
- 5) 5 Mei 2021
Peserta rapat: NTT, Sulawesi Tengah

- 6) 6 Mei 2021
Peserta rapat: Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Selatan
- 7) 20 Mei 2021
Peserta rapat: Banten, Jambi, Bengkulu
- 8) 8 Juni 2021
Peserta rapat: DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Lampung, DIY
- 9) 17 Juni 2021
Peserta rapat: Sumatera Utara, Bangka Belitung

Dari hasil koordinasi dan konsultasi tersebut, ditemui beberapa kendala dalam penyusunan RAD, yaitu

1. Program kepemudaan belum menjadi Prioritas di daerah, Pusat perlu memberikan panduan untuk penyusunan RAD
2. Dalam agenda Musrenbangnas yang dilaksanakan oleh BAPPENAS perlu menekankan pentingnya Koordinasi Lintas Sektor dan pemetaan anggaran Program Kepemudaan
3. Sebaiknya dari Pusat ada tim untuk mendampingi daerah dalam penyusunan RAD
4. RPJMD masih belum mengacu ke RPJMN khususnya program kepemudaan dan belum maksimalnya Pemerintah Provinsi dan Pemkab/Pemkot dalam menjalankan Perpres 66/2017
5. Koordinasi antar OPD di Provinsi dan Pemkab/Pemkot belum berjalan dengan baik
6. Minimnya anggaran di masing – masing Pemprov dan Pemkab/Pemkot

Untuk mengatasi hal tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga sedang mempertimbangkan pengusulan Dana Dekonsentrasi untuk percepatan penyusunan RAD sesuai dengan target sampai dengan tahun 2024 semua provinsi telah memiliki RAD pelayanan kepemudaan.

ANALISIS EFISIENSI BIDANG KEPEMUDAAN

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam yang telah dilaksanakan di Deputi yang menangani kepemudaan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
I	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pelayanan Kepemudaan				
1.1	Jumlah Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda	Dokumen	12	12	100
1.2	Persentase KL yang mengimplementasikan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda	Persen (%)	70	100	100
1.3	Persentase Provinsi yang mengimplementasikan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Pemuda	Persen (%)	70	100	100
II	Tercapaiannya Pemuda Yang Berideologi Pancasila Berkarakter, Berbudaya dan Berwawasan Kebangsaan				
2.1	Persentase partisipasi Komunitas Pemuda Nasional dalam Pencegahan Perilaku Beresiko	Persen (%)	70	100	100

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA	PAGU	REALISASI ANGGARAN	%
3807 Pengembangan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	6.350.000.000	6.330.233.000	99,69%
3809 Pengembangan Kreativitas Pemuda	5.500.000.000	5.497.608.000	99,96%
3815 Peningkatan Kapasitas Pemuda	4.300.000.000	4.233.445.000	98,45%
3817 Peningkatan Wawasan Pemuda	10.050.000.000	10.011.447.638	99,62%
5910 Peningkatan IPTEK dan IMTAK Pemuda	4.594.371.000	4.577.409.800	99,63%
3819 Peningkatan Pelayanan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga (PPPON)	4.000.000.000	3.974.325.950	99,36%
DEPUTI 1	34.794.371.000	34.624.469.388	99,51%

Berdasarkan data diatas maka efisiensi yang diperoleh dari Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah sebesar 0.49 %

Tabel 3.13
Capaian Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda

NO	SASPROG/SASKEG/IKU	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN(%)
I	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang sosial, politik dan lingkungan hidup				
1.1	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan (kesukarelawanan dan kepeloporan)	Persen (%)	81.97	81.97	100
1.2	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	Persen (%)	6.86	12.85	100
1.3	Persentase pemuda yang berperan aktif dalam Gerakan Pramuka	Persen (%)	10	19.85	100
II	Meningkatnya pemuda berwirausaha				
2.1	Persentase pemuda yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap)	Persen (%)	0.39	0.39	100
III	Meningkatnya peran aktif pemuda pada tingkat global				
3.1	Persentase pemuda yang berperan aktif dalam forum internasional	Persen (%)	1.63	1.63	100
3.2	Persentase pemuda yang memperoleh penghargaan nasional dan internasional	Persen (%)	0.24	0.24	100
IV	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayananan kepemudaan				
4.1	Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk	Persen (%)	25	25	100
4.2	Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	Persen (%)	25	25	100

Realisasi Anggaran pada Deputi 2

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Deputi 2

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA	PAGU	REALISASI ANGGARAN	%
3810 Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	15.400.000.000	15.279.979.986	99,22%
3808 Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda	13.600.000.000	13.427.951.273	98,73%
3813 Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan	18.200.000.000	18.080.880.600	99,35%
3818 Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	12.100.000.000	12.094.562.000	99,96%
3812 Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	8.500.000.000	8.152.805.928	95,92%
DEPUTI 2	67.800.000.000	67.036.179.787	98,87%

Berdasarkan data diatas maka efisiensi yang diperoleh dari Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah sebesar 1.13 %

Efisiensi pada Deputi yang menangani kepemudaan ini dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemampuan organisasi untuk menggunakan sejumlah sumber daya tertentu untuk mendapatkan output atau outcome yang lebih besar, di tahun 2021 ini tingkat efisiensi bidang kepemudaan adalah sebesar 0.81 hal ini sangat minim mengingat adanya pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap konsep implementasi kebijakan maupun fasilitasi pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda yang sebagian besar dilakukan secara daring.

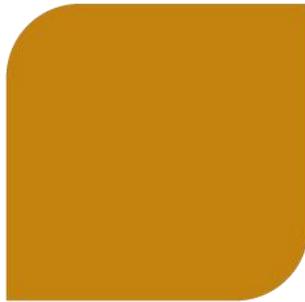
Adanya peningkatan anggaran dalam Program Kepemudaan pada TA 2022 meningkat 3.74% dari tahun 2021. Peningkatan anggaran ini karena ada terobosan baru dengan garis besar sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan data kepemudaan guna memastikan data yang valid di tingkat nasional dan daerah untuk dijadikan indicator kinerja *outcome* dan orientasi setiap asdep terkait kepemudaan. Data tersebut dapat bersumber dari BPS, perguruan tinggi, ASEAN Secretariat, Lembaga UN, Lembaga Penelitian, KL.
2. Menganalisa dan memproyeksi data yang dimaksud baik secara nasional maupun daerah

3. Merumuskan strategi, target dan indicator kinerja *outcome* dengan pemerintah daerah dan KL
4. Melakukan *pilot project* di lokus yang capaian pembangunan kepemudaannya masih rendah sesuai dengan data yang telah dianalisis. Intervensi dilakukan dengan justifikasi yang tepat baik melalui *affirmative policy action* ataupun dengan *reward*
5. Memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi yang layak untuk mendapatkannya
6. Melakukan kerjasama Internasional sebagai dukungan keterlibatan pemuda Indonesia di forum Internasional, dalam rangka menangani indicator kinerja *outcome*



ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG KEOLAHRAGAAN



SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
INDIKATOR KINERJA 3.1
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga

Merujuk pada salah satu sasaran strategis dan indikator kinerja utama Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tahun 2021 yaitu persentase partisipasi masyarakat berolahraga telah dihitung menggunakan metode *Sport Development Index* (SDI). SDI adalah indeks pembangunan olahraga secara keseluruhan yang mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Di dalam SDI terdapat 9 dimensi yang dijadikan tolak ukurnya, yaitu (i) SDM Olahraga, (ii) Ruang terbuka, (iii) Literasi fisik, (iv) Partisipasi, (v) Kebugaran, (vi) Perkembangan, (vii) Kesehatan, (viii) Ekonomi, dan (ix) Performa.

Pada olahraga massal, dimensi partisipasi masyarakat berolahraga dan dimensi kebugaran jasmani masyarakat merupakan

tolak ukur yang objektif serta valid. Sedangkan dimensi ruang terbuka atau ruang publik untuk olahraga dan dimensi sumber daya manusia keolahragaan menjadi bagian dari olahraga prestasi.

Pembudayaan Olahraga merupakan pangkal terciptanya prestasi olahraga. Pada dimensi keempat terkait partisipasi masyarakat dalam berolahraga mengacu pada konsep *Sport for All*, yaitu olahraga bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, untuk partisipasi masyarakat berolahraga diukur dari penduduk berusia 10 tahun keatas yang berolahraga. Adapun target dan realisasi untuk indikator kinerja persentase penduduk 10 tahun keatas yang melakukan olahraga 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Melakukan Olahraga Tahun 2018-2021

Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga					
Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
34,00%	31,00%	36,25%	35,4%	32,83%	92,74%

Indikator persentase penduduk 10 tahun yang melakukan olahraga dengan realisasi sebesar 32,83 % dari target 35,4%. Hal ini menunjukkan masih tergolong sangat rendah dari total seluruh masyarakat Indonesia dan juga pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus-Oktober 2021. Ada 2.561 orang yang ikut terlibat dalam proses pengumpulan data. Mereka terdiri dari penanggung jawab SDI di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota,

dan tenaga teknis di tingkat Desa/Kelurahan. Pelatihan terhadap tenaga pengumpul data dilakukan secara daring, mengingat pada bulan Juni-Juli 2021 angka penularan Covid-19 mengalami puncaknya di Indonesia.

Adapun efisiensi yang dapat dilihat dari aspek penggunaan anggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga

Tahun	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga	Pagu	Realisasi	%
2019	31,00%	575.937.303.000	553.073.964.204	96,03%
2020	36,25%	252.371.967.000	233.927.363.462	92,69%
2021	32,83%	209.638.151.000	206.767.424.396	98,63%

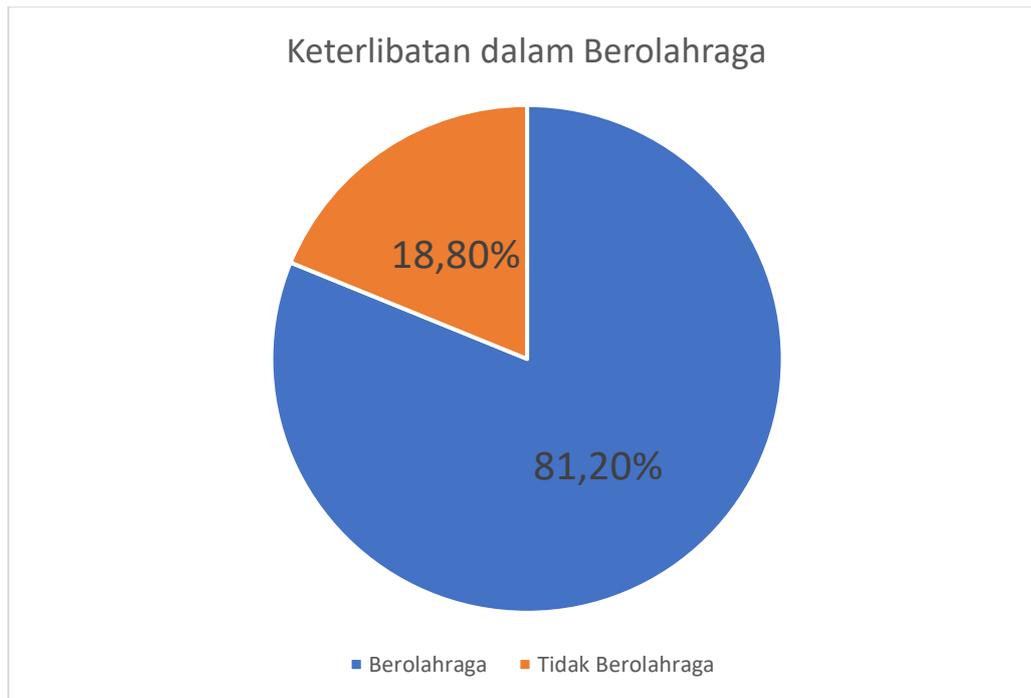
Berdasarkan capaian kinerja Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang Melakukan Olahraga terdapat efisiensi anggaran baik pada tahun 2020 maupun pada tahun 2021 sebesar Rp. 42.733.816.000 dan menyebabkan adanya penurunan pula pada capaian di tahun 2021, namun anggaran bukan merupakan faktor satu-satunya yang menentukan pencapaian kinerja tersebut. Adanya perubahan pada alokasi anggaran yang ditetapkan untuk tahun 2021 tidak sepenuhnya penyebab penurunan capaian kinerja, salah satu faktor penyebab tersebut

adalah adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas olahraga pada masyarakat menjadi terbatas.

Partisipasi Olahraga di dalam *Sport Development Index* (SDI) dalam melakukan aktivitas fisik, perlu diperhatikan prinsip latihan yang sering disebut dengan FIT (*frequency, intensity, time*). Frekuensi mengacu pada seberapa sering seseorang melakukan aktivitas fisik dalam seminggu. Intensitas merujuk pada seberapa keras seseorang berlatih selama melakukan aktivitas fisik atau berolahraga.

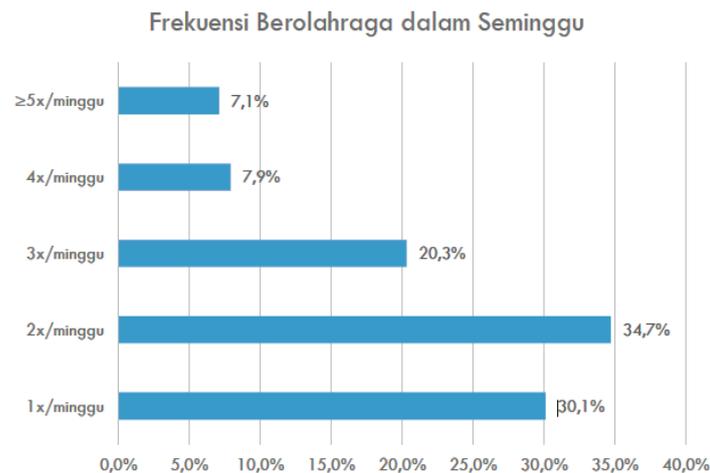
Sementara itu, durasi/time merujuk pada seberapa lama seseorang melakukan aktivitas fisik dalam setiap kali latihan. Sejatinya tidak ada ukuran yang pasti terkait dengan durasi, tergantung pada

tingkat kebugaran dan jenis latihan yang dilakukan. Melakukan berbagai latihan dengan intensitas dan durasi yang berbeda akan memberikan dampak yang lebih baik dan seimbang.



Gambar 3.21 Diagram Keterlibatan Dalam Berolahraga Tahun 2021

Laporan ini menyatakan bahwa dari dimensi partisipasi olahraga, ketika responden ditanyakan apakah dalam satu minggu terakhir responden melakukan olahraga/aktivitas fisik, 81,2% menyatakan “ya” dan 18,8% menyatakan “tidak”. Dari mereka yang berpartisipasi tersebut, 30,1% melakukan olahraga 1 kali per minggu, 34,7% melakukan olahraga dua kali per minggu, dan sebanyak 35,2% yang berpartisipasi 3 kali atau lebih per minggu.



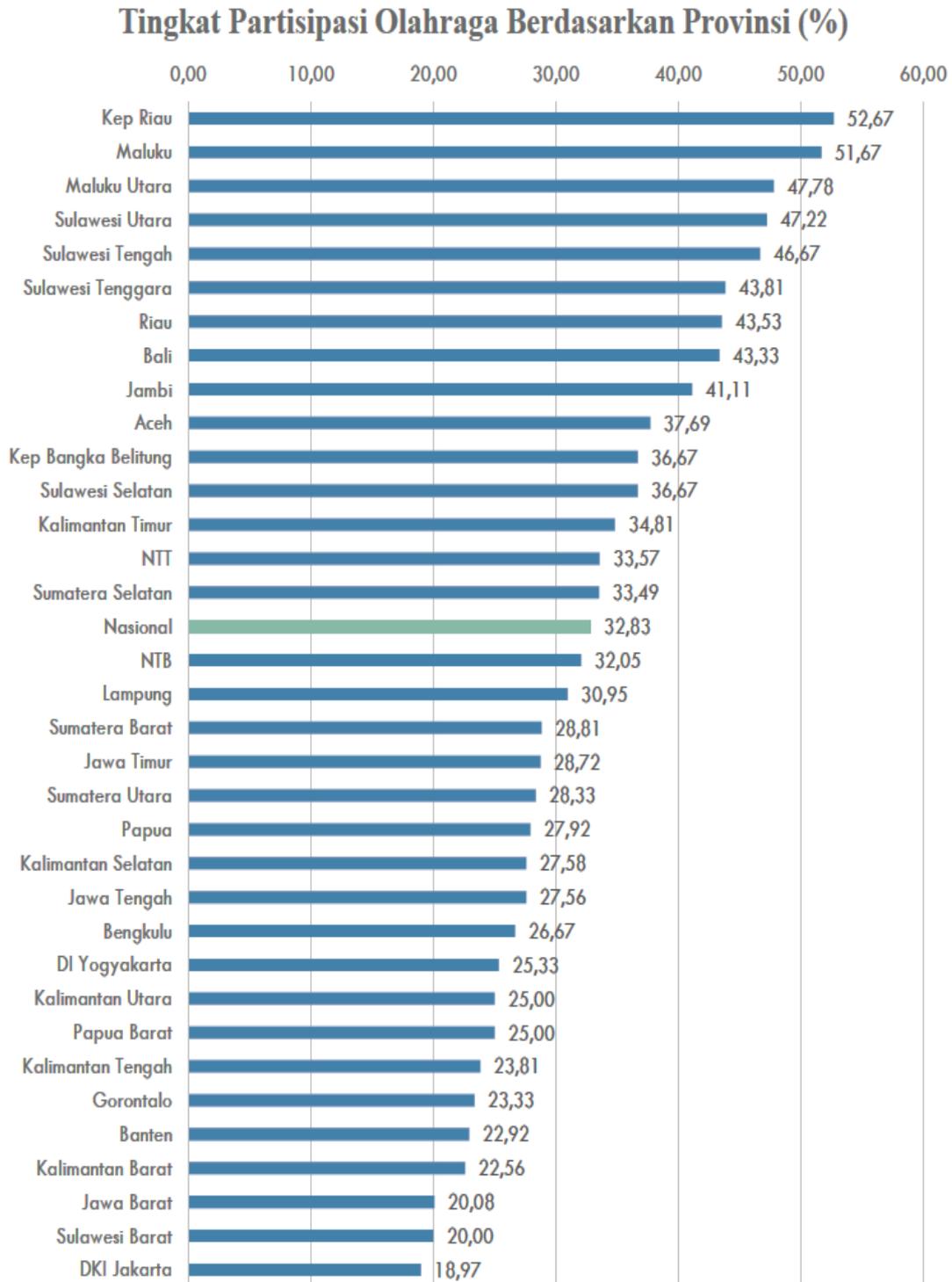
Gambar 3.22 Grafik Berolahraga Dalam Seminggu

Secara nasional, angka partisipasi aktif berolahraga sebesar 32,83%. Tiga provinsi teratas dalam partisipasi masing-masing ditempati oleh Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara. Sementara itu, tiga provinsi dengan tingkat partisipasi terendah adalah Sulawesi Barat, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat. Terkait dengan tingkat partisipasi tersebut, belum ada data pembandingan yang relatif memadai, terutama dari aspek metodologi dan kemitakhiran data, mengingat survei nasional partisipasi belum pernah dilakukan secara komprehensif dan mendalam. Data SDI 2006 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi aktif berolahraga sebesar 42% (T.C. Mutohir & Maksum, 2007). Jika dibandingkan dengan data tersebut, maka telah terjadi penurunan 9,17%. Sangat boleh jadi, penurunan tersebut akibat pandemi Covid-19 dimana pergerakan orang sangat dibatasi. Dilihat dari jenis kelamin, ada kesenjangan tingkat partisipasi yang cukup lebar antara

laki-laki dan perempuan. Seperti biasa, tingkat partisipasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Dari aspek usia, tingkat partisipasi tertinggi ada pada kelompok 10-19 tahun, kemudian diikuti kelompok usia 20-44 tahun dan 45-60 tahun. Dari data ini dapat dibaca bahwa seiring usia, tingkat partisipasi dalam berolahraga cenderung menurun.

Dari data diatas persentase partisipasi masyarakat berolahraga yang diambil langsung dan bukan uji coba melalui SDI pada bulan Agustus sampai dengan Oktober tahun 2021 di 34 Provinsi, 246 Kabupaten/kota, 594 Kecamatan sebesar 32,83%, mengalami penurunan sebesar 3,42% dari tahun 2020 sebesar 36,35% dimana perhitungan persentase partisipasi masyarakat berolahraga dihitung melalui uji coba SDI yang hanya dilakukan 3 provinsi dengan metode yang sama dan melalui kegiatan online karena awal pandemi Covid-19.

Adapun untuk sebaran capaian tingkat partisipasi olahraga berdasarkan provinsi ditunjukkan pada grafik berikut.



Gambar 3.23 Grafik Tingkat Partisipasi Olahraga Berdasarkan Propinsi (%) Tahun 2021

Di Indonesia tingkat partisipasi masyarakat berolahraga masih sangat rendah. Kemenpora terus mengkampanyekan gerakan “**Ayo Olahraga**” sebagai *goal* atau indikator utama untuk menaikkan persentase partisipasi masyarakat dalam berolahraga melalui program-programnya, dan ingin mengubah stigma masyarakat bahwa dalam keadaan menghadapi kebiasaan baru terhadap Covid-19 tetap perlu melakukan olahraga yang sesuai standar protokol kesehatan. Melaksanakan kegiatan olahraga

dan mengajak peran serta masyarakat untuk aktif berolahraga di masa pandemi tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenpora untuk melakukan terobosan-terobosan terbaru dengan tujuan menjangkau seluas-luasnya setiap lapisan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam berolahraga.

Adapun kegiatan pendukung dalam pencapaian indikator kinerja persentase penduduk 10 tahun keatas yang melakukan olahraga akan diuraikan sebagai berikut.

a. Festival Olahraga Masyarakat Melalui Program Indonesia Bugar

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ayo Olahraga, Kemenpora menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat melalui Program Indonesia Bugar di Kota Batam dan Kota Padang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong munculnya budaya

berolahraga di masyarakat, menumbuhkan gaya hidup sehat bagi semua orang, khususnya di masa pandemi. Selain itu, dengan diadakannya kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat bagaimana cara berolahraga di masa pandemi namun tidak menghilangkan esensi berolahraga itu sendiri.



Gambar 3.24 Pelaksanaan Pekan Olahraga Masyarakat Melalui Program Indonesia Bugar

Dari pelaksanaan kegiatan ini telah melibatkan sebanyak 1732 peserta dengan *outcomes* kegiatan antara lain: (i) Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga di masa pandemi Covid-19 dengan melaksanakan protokol

kesehatan, (ii) Meningkatnya kebugaran dan imunitas saat menghadapi pandemi Covid-19, (iii) Meningkatnya jumlah komunitas olahraga, lembaga/yayasan pemerhati olahraga.

b. Festival Senam Kreasi Nusantara 2021

Dengan melakukan aktivitas olahraga, dapat meningkatkan kualitas fisik serta sebagai sarana untuk berpikir dan berkreasi. Untuk itu, sebagai wujud tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Kemenpora menyelenggarakan Kegiatan Festival Senam Kreasi Nusantara Tahun 2021 yang dilaksanakan di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Dispora Provinsi, IOSKI Pusat, IOSKI Provinsi, KORMI Pusat, KORMI Provinsi dan tentunya perkumpulan sanggar-sanggar di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat seperti menjaga jarak antar peserta, menyediakan sarana mencuci tangan, menggunakan masker dan menghindari kerumunan.



Dari pelaksanaan kegiatan ini telah melibatkan sebanyak 744 peserta dengan *outcomes* kegiatan antara lain: (i) Terwujudnya pelestarian senam kreasi nusantara supaya tidak tergerus oleh perkembangan zaman; (ii) Terciptanya budaya masyarakat untuk berolahraga untuk menuju masyarakat yang sehat dan bugar di saat menghadapi Pandemi COVID-19 sekarang ini; (iii) Menumbuhkan budaya olahraga untuk menjadi gaya hidup terutama di sanggar-sanggar dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.

c. Lomba Senam SaH (Stay at Home)

Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam pembatasan aktivitas di luar rumah seperti belajar dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah, Kemenpora berinovasi untuk menyelenggarakan kegiatan berbasis virtual, yaitu Lomba Senam SaH (Stay at Home) Jilid

II. Hal ini diselenggarakan atas dasar tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti Lomba Senam SaH Jilid I. Kegiatan ini diawali dengan Pemecahan Rekor MURI Senam SaH Jilid II oleh 1.015 mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang secara virtual.



Kegiatan ini telah melibatkan sebanyak 3.259 orang dengan *outcomes* kegiatan: (i) Memberikan pilihan olahraga virtual saat pandemi Covid-19 (*challenge*) dengan berbagai hadiah yang menarik; (ii) Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk tetap berolahraga walaupun di masa

pandemi Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan; (iii) Meningkatnya tingkat kebugaran masyarakat apalagi saat pandemi Covid-19 sekarang ini; (iv) Menumbuhkan budaya olahraga untuk menjadi gaya hidup terutama di kalangan remaja.

d. Penyelenggaraan Kampanye dan Festival Olahraga Pendidikan

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara perlahan mulai tertata dengan baik dengan adanya Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional yang secara jelas mendudukkan pada porsi dan secara proporsional permasalahan keolahragaan di tanah air. Pentahapan seperti pemasalan, pemantauan, pembibitan, pemusatan latihan dan kompetisi merupakan langkah dalam membina dan mengembangkan keolahragaan.



Pemassalan olahraga untuk masyarakat merupakan salah satu syarat untuk membiasakan dan membudayakan berolahraga di masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat pendidikan baik formal, nonformal

dan informal sebagai salah satu pilar dari pola pembinaan olahraga tanah air. Dengan pemasalan olahraga secara terus menerus diharapkan akan terjadi proses pembudayaan olahraga di masyarakat. Olahraga juga dapat memiliki arti yang strategis bagi *nation and character building* atau pembangunan watak bangsa. Berdasarkan data Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pelajar yang sangat aktif hanya 2.1 % sedangkan pelajar bugar kategori baik sekali hanya 0,14 %, berdasarkan data Merdeka.com 2018 cara belajar, cara bekerja, dan gaya hidup anak muda yang serba gadget/digital 90%. Maka, upaya sosialisasi dalam rangka menyamakan alur pikir pentingnya pemasalan dan pembudayaan olahraga yang salah satunya melalui olahraga pendidikan tersebut harus terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Adapun alur pikir olahraga Pendidikan digambarkan pada diagram berikut

ALUR PIKIR OLAHRAGA PENDIDIKAN



Gambar 3.25 Alur Olahraga Pendidikan

Merujuk pada pola pembangunan olahraga sudah seyogyanya pembuatan program yang ditujukan dengan sasaran peserta didik pada satuan pendidikan yang ada di kemas sedemikian rupa sehingga program berjalan secara sistematis, berjenjang dan berkesinambungan. Olahraga yang sesungguhnya ialah pembinaan dan pembentukan fisik, mental bertanding, sportivitas serta penanaman karakter. Contohnya, pemain sepak bola di Indonesia sedari dini harus ditanamkan bermain bola tidak lagi hanya sekedar berlari dan menendang. Tetapi filosofi kerjasama tim, ketepatan menggunakan teknik dan skill, pemahaman taktik serta strategi dasar sudah harus dimiliki. Bila ini yang dilakukan, maka *National and Character Building* pun akan mudah dilaksanakan. Menjadikan bangsa

Indonesia yang pemenang, memiliki mental tak kenal menyerah, dan menjadikan bangsa kita sebagai bangsa pemenang.

Contoh lain misalnya mengolah “kulit bundar” juga mengajarkan kepada anak-anak tentang ketundukan pada sistem pemahaman pada posisi, tugas, dan fungsi yang tepat. Selain itu, jugapenanaman kemandirian serta disiplin diri yang dibangun untuk mencapai tujuan, yakni prestasi baik individu maupun tim. Menyikapi hal tersebut Kemenpora telah menyiapkan perumusan kebijakan di bidang olahraga pendidikan, dan berfungsi sebagai koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga pendidikan bermaksud mengadakan kegiatan “Kampanye Olahraga Olimpik pada Satuan Pendidikan Formal, Non formal dan Informal”.

Kegiatan kampanye cabang olahraga unggulan olimpik pada satuan-satuan pendidikan baik formal, nonformal dan informal ini kemudian diimplementasikan melalui kegiatan festival olahraga pendidikan di satuan pendidikan formal mulai tingkat pendidikan dasar dalam rangka memperkenalkan dan mengembangkan olahraga pada tingkat *grassroot* hingga ranah *sport science* pada tingkat pendidikan tinggi.

Tujuan utama adalah membuat anak sejak dini mengenal dan menyukai olahraga sehingga akan merubah pola pikir akan kegemarannya untuk beraktivitas fisik secara rutin sesuai usianya melalui berbagai bentuk-bentuk permainan olahraga misalnya saja melalui *kid's* atletik, panahan untuk anak, manipulasi angkat besi untuk anak, dan cabang olahraga lainnya.

Selain itu kegiatan kampanye olahraga pada satuan pendidikan diwujudkan pula melalui kegiatan kompetisi olahraga pendidikan nonformal setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan/atau sekolah menengah atas baik untuk cabang olahraga unggulan *Olympic* /prioritas medali dan/atau cabang olahraga strategis/popular Indonesia

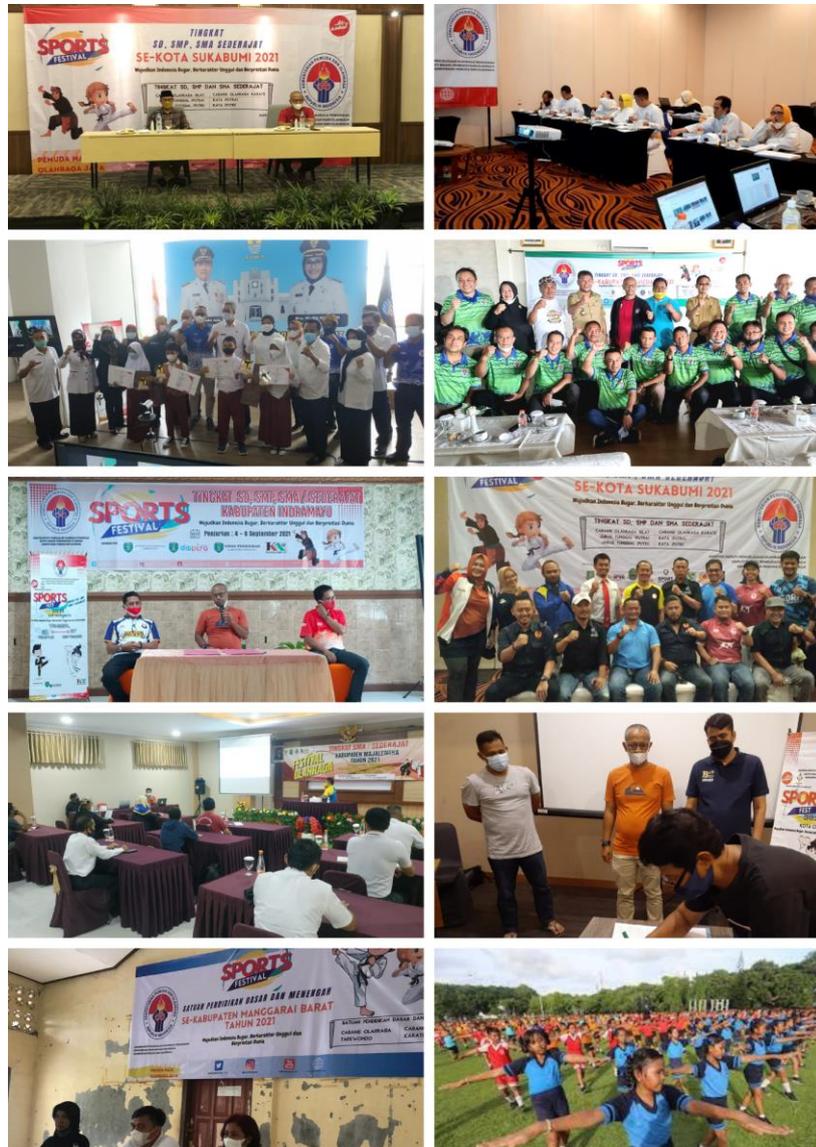
seperti sepakbola dan pencak silat.

Adapun kegiatan kompetisi olahraga pendidikan nonformal yang telah diselenggarakan Kemenpora sejak tahun 2015 dengan jumlah peserta yang terus meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019 adalah kompetisi sepakbola kelompok usia 12; 14; 16; 17 (putri) dan 21 (mahasiswa) sebagai wujud implementasi kompetisi bagi pelajar pada satuan pendidikan nonformal seperti Sekolah Sepak Bola, Akademi Sepakbola, dan satuan-satuan pendidikan nonformal lainnya yang berbasis olahraga. Melalui kegiatan-kegiatan kampanye olahraga pendidikan tersebut diharapkan bukan hanya menguatkan fisik, tetapi juga sebagai media penanaman pendidikan karakter dimana olahraga dapat membangun disiplin, membangun karakter *sportif* (bahwa menang dan kalah itu biasa), membangun karakter pejuang dan pekerja keras, memperkuat karakter kolaborasi dalam *teamwork* dan bahkan memperkokoh jiwa patriotisme dan nasionalisme dengan target utama adalah meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Adapun capaian kinerja dari kegiatan kampanye dan festival olahraga pendidikan yang telah dilaksanakan di tahun 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17 Capaian Kegiatan Kampanye dan Festival Olahraga Pendidikan Tahun 2021

NO	KEGIATAN	REALISASI
1	Festival Olahraga Pendidikan pada bidang Pendidikan Dasar, di Bandung	2500 orang
2	Festival Olahraga Pendidikan Dasar (<i>Based on Olympic Sport</i>), di Indramayu	3000 orang
3	Festival Olahraga Pendidikan Dasar (<i>Based on Olympic Sport</i>), di Padang	3000 orang
4	Festival Olahraga Pendidikan Dasar (<i>Based on Olympic Sport</i>), di Cirebon	3000 orang
5	Festival Olahraga Pendidikan Dasar (<i>Based on Olympic Sport</i>), di Sumedang	3000 orang
6	Festival Olahraga Pendidikan Dasar (<i>Based on Olympic Sport</i>), di Kab. Manggarai Barat	1500 Orang
7	Festival Olahraga Pendidikan Dasar (<i>Based on Olympic Sport</i>), di Majalengka	2500 orang
8	Festival Olahraga Pendidikan Menengah (<i>Based on Olympic Sport</i>), di Sukabumi	1500 Orang
9	Instagram RaffiNagita1717 raffinagita1717 https://www.instagram.com/tv/CYGI2cgoAFu/?utm_medium=copy_link Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022	244.434 tayang
10	Tiktok RaffiNagita1717 https://www.tiktok.com/t/ZSeHp4Sqq/ Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022	45.800 tayang
11	Instagram Bodyfitbybagus https://linktr.ee/Bodyfitbybagus https://www.instagram.com/tv/CYDS6OMqkGy/?utm_medium=share_sheet Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022	2.004 tayang
12	Youtube Bodyfitbybagus https://www.youtube.com/watch?v=CqRMTJpeCRM Dengan jumlah Views pertanggal 4 Januari 2022	11,654 tayang
13	Youtube skwadfitness https://www.instagram.com/tv/CYDyybCL-jL/?utm_medium=share_sheet Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022	492 tayangan
14	Tiktok Bodyfitbybagus https://vt.tiktok.com/ZSeuAHvcq/ Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022	6.539 Tayang
15	www.bola.net lg TV https://www.instagram.com/p/CYD7naPFmVw/ Dengan jumlah tayang pertanggal 4 Januari 2022	2,883 tayang
16	Facebook Kemenpora RI https://fb.watch/akL0evRn7J/ Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 2022	671 tayang
17	Instagram Kemenpora RI https://www.instagram.com/p/CYDf71rgYB7/ Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 2022	3.232 tayang
18	Youtube Kemenpora RI (Ayo Olahraga Channel) https://www.youtube.com/watch?v=_R82TndpJkY Dengan jumlah tayang pertanggal 5 Januari 2022	650 tayang

Adapun dokumentasi dari pelaksanaan festival olahraga pendidikan di 22 Provinsi Tahun 2021 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.26 Pelaksanaan Festival Olahraga Pendidikan di 22 Provinsi Tahun 2021

e. Pekan Olahraga Tradisional Tingkat Nasional (POTRADNAS) VIII Tahun 2021 Bangka Belitung

Kegiatan Tradisional (POTRADNAS) tanggal 21 s.d. 24 Oktober 2021 di Kabupaten Bangka, Provinsi

Bangka Belitung. Dikarenakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19 maka ada perubahan beberapa cabang olahraga dari penyelenggaraan tahun

sebelumnya. Adapun Cabang Olahraga yang dipertandingkan ada 5 (lima), Egrang, Ketapel (menggantikan Hadang), Lari Balok (Menggantikan Terompah Panjang), Panahan (menggantikan Dagongan), Sumpitan. Peserta berusia rentang 16 s.d. 24 tahun atau 14 s.d. 18 tahun sesuai dengan

cabang olahraga masing-masing (dijelaskan melalui buku Petunjuk Teknis).

Peserta berasal dari berbagai daerah, adapun provinsi yang ikut serta dalam POTRADNAS VIII adalah sebanyak 22 provinsi, yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 3.27 Provinsi Peserta POTRADNAS VIII

Berbagai persiapan dilakukan dalam menyelenggarakan POTRADNAS VIII agar berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan kampanye olahraga tradisional serta mendukung visi misi Kemenpora dalam meningkatkan partisipasi berolahraga, berikut rangkaian persiapan POTRADNAS VIII Tahun 2021 antara lain:

1. Penetapan secara resmi Kabupaten Belitung sebagai Tuan Rumah penyelenggaraan POTRADNAS VIII Tahun 2021;
2. Koordinasi dalam rangka paparan persiapan penyelenggaraan POTRADNAS VIII Tahun 2021 dengan Bupati Belitung beserta jajarannya;
3. Pelaksanaan POTRADNAS VIII Tahun 2021 ditunda dari yang semula tanggal 2 s.d. 5 September 2021 menjadi 21 s.d. 24 Oktober 2021 dikarenakan adanya pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai daerah;
4. Koordinasi dalam rangka finalisasi persiapan penyelenggaraan POTRADNAS VIII Tahun 2021;



5. Rapat pembahasan persiapan pelaksanaan POTRADNAS VIII Tahun 2021. Adapun salah satu kesepakatan utamanya adanya fleksibilitas di beberapa ketentuan pada Petunjuk Teknis khususnya terkait jika ada yang dinyatakan positif Covid-19;

6. Pelaksanaan Bimbingan Teknis persiapan Wasit Juri yang akan bertugas pada POTRADNAS VIII Tahun 2021;

7. Pelaksanaan Pre-Event POTRADNAS VIII Tahun 2021 bekerjasama dengan ASTRA, melakukan Egrang Etape sejauh 50 KM dimulai dari Kabupaten Belitung Timur di depan Replika Sekolah Laskar Pelangi, hingga Kabupaten Belitung;



Gambar 3.28 Pelaksanaan POTRADNAS VIII di Belitung

Pelaksanaan POTRADNAS dimulai pada tanggal 21 Oktober 2021 hingga 24 Oktober 2021 dan pada pelaksanaan tahun ini untuk pertama kali ditetapkan adanya Juara Umum bersama, yaitu Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, dengan detail perolehan medali sebagai berikut:

Tabel 3.18 Perolehan Medali POTRADNAS VIII Tahun 2021

NO	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	HARAPAN	JUMLAH
1	BANTEN	2	1	0	1	4
2	JAWA BARAT	2	1	0	1	4
3	JEPARA	1	1	0	0	2
4	KALIMANTAN TENGAH	1	0	0	0	1
5	KALIMANTAN UTARA	0	1	0	1	2
6	JAWA TENGAH	0	1	0	0	1
7	KALIMANTAN SELATAN	0	2	0	0	2

NO	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	HARAPAN	JUMLAH
8	KAB. BELITUNG	0	0	2	0	2
9	SULAWESI TENGAH	0	0	1	1	2
10	BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	0
11	BENGKULU	0	0	0	0	0
12	DKI JAKARTA	0	0	0	0	0
13	GORONTALO	0	0	0	0	0
14	JAWA TIMUR	0	0	0	0	0
15	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	0	0
16	MALUKU	0	0	0	0	0
17	SULAWESI SELATAN	0	0	0	0	0
18	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0	0
19	SULAWESI UTARA	0	0	0	0	0
20	SUMATERA SELATAN	0	0	0	0	0
21	YOGYAKARTA	0	0	0	0	0
22	KAB. BELITUNG TIMUR	0	0	0	0	0

Dari tabel di atas terlihat bahwa Provinsi Banten dan Jawa Barat menjadi juara umum Bersama dengan perolehan medalimasing-masing sebanyak 2 medali emas, 1 perak, dan 1 harapan, disusul Jepara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Kegiatan ini disiarkan secara *live* melalui *Streaming YouTube* di *Ayo Olahraga Channel*. Realisasi sasaran kegiatan kampanye olahraga tradisional, usia dini, lansia, dan olahraga disabilitas tercapai 104 % dari target 11274 orang menjadi 11.770 orang. Namun pencapaian sasaran ini merupakan gabungan dari peserta yang mengikuti langsung kegiatan dan yang mengikuti kegiatan melalui live media sosial (Youtube dan Instagram). Sebanyak 484 peserta yang mengikuti POTRADNAS VIII di Belitung dari berbagai macam provinsi, 8.893 orang yang mengikuti live melalui Youtube *Ayo Olahraga Channel*, dan 2.393 dari Instagram Kemenpora baik dari *feed* maupun *story*. Strategi tersebut dilakukan karena anggaran pada output kampanye mengalami refocusing/pemotongan dalam rangka mendukung penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sebelum refocusing, target 11.274 orang dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu Festival Olahraga Anak Usia Dini, Festival Senam Lansia, Festival Olahraga di LP dan Rumah Singgah (Anak Jalanan), Pekan Olahraga Tradisional, dan Pengembangan Olahraga Tradisional melalui Liga Hadang Indonesia dengan beberapa kota pelaksanaan pada masing-masing kegiatan. Namun setelah refocusing target 11.274 hanya di capai melalui kegiatan Pekan Olahraga Tradisional.

f. Penyelenggaraan Hari Olahraga Nasional XXXVIII

Tanggal 9 September memiliki makna tersendiri bagi dunia olahraga di Indonesia. Sebab, Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) diperingati berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1985 tentang Hari Olahraga Nasional. Penyelenggaraan HAORNAS Tahun 2021 merupakan Peringatan yang ke-38. Peringatan di tahun ini sama

dengan tahun sebelumnya karena dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19. Tema besar yang diusung pada HAORNAS yang digelar secara *hybrid* di GOR POPKI, Cibubur, Jakarta pada Kamis, 9 September 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mencegah penularan virus corona yaitu “Desain Besar Olahraga Nasional Menuju Indonesia Maju.

Sedangkan realisasi output dari pelaksanaan kegiatan ini mencapai 1.409 orang dengan *outcome* dari pelaksanaan program kegiatan ini antara lain yaitu:

1. Menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap olahraga;
2. Menumbuhkan semangat berolahraga di saat pandemi Covid-19 sekarang ini;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk tetap berolahraga walaupun di masa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan;
4. Menumbuhkan budaya olahraga untuk menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
INDIKATOR 3.2:
Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>

Olympic Games merupakan *event* olahraga terbesar di dunia yang diselenggarakan 4 tahunan dan dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2020, namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga mengakibatkan

event tersebut harus ditunda dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Capaian untuk indikator jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games* adalah sebagai berikut

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Perolehan Medali Emas pada *Olympic Games XXXII*

Indikator	Realisasi 2012	Realisasi 2016	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>	-	1 emas	1 emas	1 emas	100%

Berdasarkan tabel di atas capaian dari indikator kinerja ini tercapai dengan baik, Indonesia berhasil meraih 1 medali emas yang didapatkan melalui cabang olahraga Bulutangkis pada nomor Ganda Putri. Pada pelaksanaan *Olympic Games XXXII* yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang tanggal 23 Juli-2 Agustus 2021, Indonesia

mengirimkan 28 Atlet kontingen yang terdiri dari 16 atlet putera dan 12 atlet putri pada 8 Cabang Olahraga yang diantaranya sebagai berikut: 11 Atlet Bulutangkis, 5 Atlet Angkat Besi, 4 Atlet Panahan, 2 Atlet Renang, 2 Atlet Atletik, 2 Atlet Dayung, 1 Atlet Menembak, dan 1 Atlet Selancar, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.20 Kontingen Indonesia dalam *Olympic Games XXXII*

NO	NAMA	CABANG OLAHRAGA	NOMOR PERTANDINGAN
1	Aflah Fadlan Prawira	Renang	400 M dan 1500 M Gaya Bebas
2	Azzahra Permatahani	Renang	400 M Gaya Ganti Perseorangan
3	Riau Ega Agatha	Panahan	PERORANGAN
4	Diananda Choirunisa	Panahan	PERORANGAN
5	Alvianto Bagas Prastyadi	Panahan	PERORANGAN
6	Arif Dwi Pangestu	Panahan	PERORANGAN
7	Lalu Muhammad Zohri	Atletik	100 M PUTRA
8	Alvin Tehupeory	Atletik	100 M PUTRI
9	Anthony Sinisuka Ginting	Badminton	TUNGGAL
10	Jonatan Christie	Badminton	TUNGGAL
11	Gregoria Mariska Tunjung	Badminton	TUNGGAL PUTRI
12	Kevin Sanjaya Sukamuljo	Badminton	GANDA PUTRA
13	Marcus Fernaldi Gideon	Badminton	GANDA PUTRA
14	Hendra Setiawan	Badminton	GANDA PUTRA
15	Mohammad Ahsan	Badminton	GANDA PUTRA
16	Greysia Polii	Badminton	GANDA PUTRI
17	Apriyani Rahayu	Badminton	GANDA PUTRI

NO	NAMA	CABANG OLAHRAGA	NOMOR PERTANDINGAN
18	Praveen Jordan	Badminton	GANDA CAMPURAN
19	Melati Daeva Oktavianti	Badminton	GANDA CAMPURAN
20	Mutiara Rahma Putri	Rowing	SCULL GANDA KELAS RINGAN
21	Melani Putri	Rowing	SCULL GANDA KELAS RINGAN
22	Vidya Rafika Rahmatan Toyyiba	Menembak	10 M, 50 M AIR RIFLE
23	Rio Waida	Surfing	SHORTBOARD PUTRA
24	Eko Yuli Irawan	Angkat Besi	KELAS 61 KG
25	Rahmat Erwin Abdullah	Angkat Besi	KELAS 73 KG
26	Deni	Angkat Besi	KELAS 67 KG
27	Nurul Akmal	Angkat Besi	KELAS 87 KG PUTRI
28	Windy Cantika Aisah	Angkat Besi	KELAS 49 KG PUTRI



Peringkat Indonesia pada *Olympic Games Tokyo* berada pada peringkat ke-55 dari 206 Negara yang turut serta pada *Tokyo 2020 Olympic Games*. Jika berdasarkan dari total perolehan medali (5 medali) maka Indonesia berada di Rank 42.

Sedangkan di antara negara Asia, Indonesia berada di Rank 11 dengan posisi 1 tingkat dibawah Fillipina. Adapun perolehan medali Indonesia adalah sebagai berikut:

1. 1 Medali Emas Cabor Bulutangkis Ganda Putri (Greysia Polii/Apriyani Rahayu);
2. 1 Medali Perak Cabor Angkat Besi 61Kg Putra (Eko Yuli Irawan);
3. 1 Medali Perunggu Cabor Bulutangkis Tunggal Putra (Anthony Sinisuka Ginting); 1 Medali Perunggu Cabor Angkat Besi 73Kg Putra (Rahmat Erwin Abdullah).
4. 1 Medali Perunggu Cabor Angkat Besi 49Kg Putri (Windy Cantika Aisah)

Mengacu pada data prestasi atlet Indonesia dalam multi event *Olympic Games* yang telah dilaksanakan sejak 1952 hingga olimpiade 2020, Indonesia telah mendapatkan 8 medali emas, 14 medali perak dan 15 medali perunggu dimana terdapat 2 cabang

olahraga yang secara konsisten menyumbangkan medali yaitu Bulutangkis dan Angkat Besi. Secara rinci perolehan medali Indonesia berdasarkan cabang olahraga disajikan dalam tabel sebagai berikut:

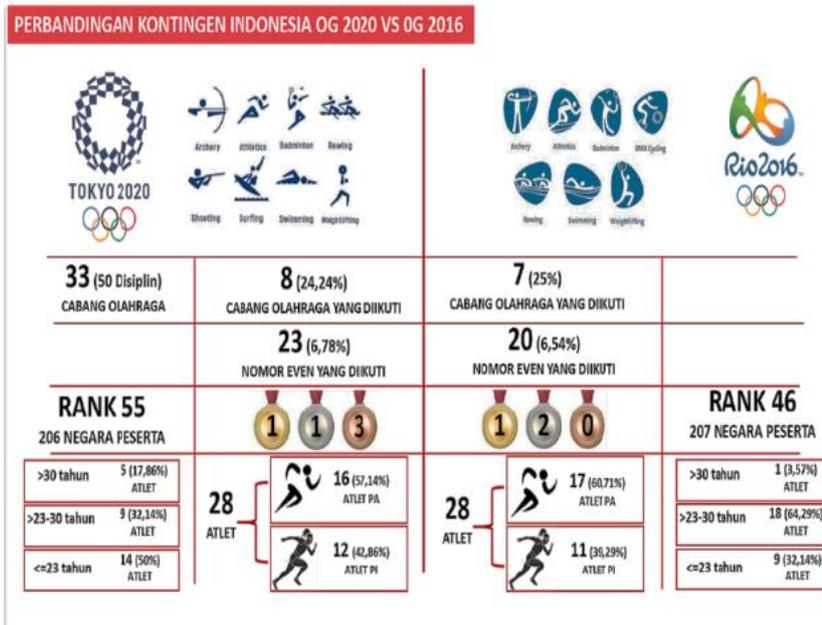
Tabel 3.21 Perolehan Medali dari 3 (Tiga) Cabor yang Berkontribusi dalam Ajang *Olympic Games*

Cabang Olahraga	Emas	Perak	Perunggu	Total
Bulutangkis	8	6	7	21
Angkat Besi	0	7	8	15
Panahan	0	1	0	1
Total	8	14	15	37

Dari tabel di atas terlihat bahwa cabor Bulutangkis masih merupakan primadona dalam perolehan medali emas dalam ajang *Olympic Games* diikuti oleh Angkat Besi dan Panahan. Salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa adalah melalui prestasi atlet nasional pada kompetisi olahraga internasional. Peningkatan prestasi atlet nasional

merupakan rangkaian terpadu dari sistem pembinaan olahraga nasional dan bukan merupakan sesuatu yang bersifat instan. Prestasi atlet pada ajang internasional merupakan prestise dan kebanggaan yang dimiliki Indonesia. Adapun perbandingan jumlah kontingen Indonesia pada *Olympic Games* tahun 2016 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut.





Gambar 3.29 Perbandingan Peringkat *Olympic Games* Tahun 2016 dan 2020



Dari gambar di atas terlihat bahwa terjadi penurunan peringkat Indonesia dalam ajang *Olympic Games* dari peringkat ke-46 menjadi peringkat ke-55. Meskipun secara capaian perolehan medali terdapat perbedaan pada perolehan medali perak dari 2 medali di tahun 2016 menjadi 1 medali di tahun 2020. Serta penambahan perolehan medali perunggu menjadi 3 medali di tahun 2020 dari sebelumnya tanpa medali perunggu pada tahun 2016. Hal inilah yang menjadi dasar

penurunan peringkat Indonesia dalam ajang *Olympic Games* 2020. Dari target yang ditetapkan di tahun 2020 Indonesia menargetkan perolehan medali emas dalam *Olympic Games* sebanyak 1 emas telah tercapai. Namun secara peringkat mengalami penurunan.

Salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa adalah melalui prestasi atlet nasional pada kompetisi olahraga internasional. Peningkatan prestasi atlet nasional merupakan rangkaian terpadu dari sistem pembinaan olahraga nasional dan bukan merupakan sesuatu yang bersifat instan. Prestasi atlet pada ajang internasional merupakan prestise dan kebanggaan yang dimiliki Indonesia.

Pada dasarnya peningkatan prestasi atlet nasional dalam pembangunan keolahragaan memerlukan upaya perbaikan atau peningkatan sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas. Dua komponen tersebut merupakan faktor penentu terjaminnya kelangsungan peningkatan prestasi olahraga nasional. Selain itu diperlukan sinergitas kebijakan pemerintah dengan *stakeholder* keolahragaan ditambah dukungan yang kuat dari masyarakat luas. Hal ini juga

tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dimana disebutkan bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan lainnya.

Salah satu tantangan yang terbesar saat ini adalah pandemi yang masih melanda sehingga mengakibatkan program/kegiatan perlu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Proses pembinaan atlet andalan nasional juga mengalami dinamika dengan adanya pandemic ini, namun dengan keterbatasan dan permasalahan yang ada, target kinerja pada ajang olimpiade tetap tercapai. Sehingga untuk menghadapi tantangan tersebut dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergitas tata kelola antar Kementerian/Lembaga dan sinkronisasi regulasi pelaksanaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade;
2. Penambahan anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi;
3. Peningkatan kompetensi SDM dan tenaga keolahragaan;
4. Optimalisasi setiap program, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi;
5. Percepatan implementasi Perpres No 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional.

Dalam rangka penguatan induk organisasi olahraga dalam bentuk bantuan dan dukungan kepada atlet dan pelatih elit dalam rangka mencapai keunggulan dan sukses prestasi berkelanjutan di berbagai kompetisi internasional telah dilakukan beberapa bentuk bantuan, antara lain:

1. Program performa tinggi (*High Performance Program*) untuk atlet super prioritas berupa bantuan perencanaan dan program latihan yang terstruktur sesuai dengan karakteristik, tuntutan spesifik dan goal setiap atlet

menghadapi kompetisi internasional yang ditetapkan, termasuk juga sistem monitoring *assessment* evaluasi;

2. Bantuan pengayaan dan peningkatan kompetensi pelatih untuk mencapai akreditasi *elite coach* melalui kursus kursus kepelatihan *continuing education courses* loka karya, *coaching clinic forum* seminar, termasuk mengikuti kursus kepelatihan diluar negeri;
3. Bantuan honorarium bulanan guna mendukung kesejahteraan atlet, pelatih dan tim pendukung. Besaran honorarium mengikuti klasifikasi atlet dalam Skuad;
4. Bantuan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana di induk induk cabang olahraga termasuk peralatan latihan dan pertandingan;
5. Bantuan mengikuti kompetisi kompetisi Internasional sesuai dengan rencana periodisasi latihan performance plan) guna adaptasi dan penguasaan atlet terhadap lingkungan dan atmosfer kompetisi Internasional;
6. Bantuan dukungan dan pelayanan services aplikasi *sports science* dalam bentuk *sports medicine recovery rehabilitation physiology strength conditioning biomechanical performance analysis psychology nutrition*;
7. Bersama sama dengan induk organisasi menyusun pembinaan dan jalan karir atlet (*athlete career pathway*) dengan dasar meritokrasi dan performance analysis guna lebih menjamin ketepatan waktu pembinaan, keberhasilan capaian prestasi, dan mengurangi resiko kegagalan baik *premature disqualification* maupun *burn out* akibat kesalahan pembinaan Latihan;
8. Memberikan dukungan untuk menjadikan lingkungan latihan yang unggul, didalamnya meliputi: dukungan aspek sosial, keluarga, pendidikan, kesehatan dan fasilitas lainnya.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian prestasi olimpiade di tahun 2024 sesuai dengan target yang ada dalam Desain Besar Olahraga Nasional, maka diperlukan percepatan strategi diantaranya sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pembinaan cabang olahraga peraih medali pada *event* internasional seperti *Olympic Games* tahun 2020 dan *Asian Games 2022* berdasarkan nomor pertandingan;
2. Mengikuti berbagai *event* dan melakukan *training camp* dalam dan luar negeri untuk membentuk lingkungan yang *excellence*;
3. Implementasi *sport science culture*;
4. Memprioritaskan pembinaan cabang olahraga peraih medali kejuaraan dunia junior (tahun 2019-2022) berdasarkan *number of event* yang memiliki peluang medali pada *Olympic Games* tahun 2024;

5. Bantuan anggaran khusus atlet;
6. Melakukan *lobby* agar cabor dan nomor potensial medali emas Indonesia bisa dipertandingkan pada *Olympic Games 2024*

Adapun beberapa kegiatan pendukung dalam rangka perolehan medali emas pada *Olympic Games* diuraikan sebagai berikut.

1. Bantuan Keikutsertaan Kontingen Indonesia pada Kejuaraan *Multievent* tingkat Internasional *Olympic Games*

Tahapan awal dalam kegiatan Keikutsertaan Kontingen Indonesia pada *multievent* di Tingkat Internasional merupakan koordinasi dengan Lembaga Keolahragaan yang tercatat menjadi anggota dari Federasi Internasional Pekan Kejuaraan (*Multievent* Internasional) dalam hal ini adalah *National Olympic Committee Indonesia* (NOC) dan *National Paralympic Committee Indonesia* (NPC).

Bantuan keikutsertaan Kontingen Indonesia pada Kejuaraan *Multievent* Tingkat Internasional *Olympic Games* adalah

bentuk dukungan dan peran serta pemerintah untuk kemajuan Olahraga Nasional di tingkat Internasional. Yang mana *Olympic Games* adalah kasta tertinggi *Multievent* olahraga. Bantuan diserahkan dalam bentuk uang kepada NOC yang kemudian dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional dan fasilitasi kejuaraan olahraga prestasi di tingkat internasional untuk melakukan evaluasi terhadap bantuan yang telah di salurkan untuk dijadikan pembelajaran pada kegiatan-kegiatan berikutnya.

2. Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Cabang Olahraga Elite Nasional

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa: "Pemerintah wajib fasilitasi untuk pelaksanaan program pembinaan cabang olahraga kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga". Untuk meningkatkan prestasi olahragawan maka perlu diciptakan lingkungan keunggulan latihan, yaitu memenuhi kebutuhan atlet baik teknis maupun non teknis, secara teknis lingkungan keunggulan latihan

berupa standar honorarium, kesempatan *try out*, *try in* dan *training camp* dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam program latihan, untuk olahraga permainan sebagai contoh Bulutangkis dan tenis jumlah ideal *try out* per tahun antara 30-40 turnamen selain untuk meningkatkan kemampuan, juga untuk meningkatkan ranking. Sementara untuk olahraga terukur rata-rata memerlukan *try out* 10-20 kejuaraan per tahun.

Penyaluran bantuan dilaksanakan dalam bentuk uang yang disalurkan kepada Cabang Olahraga Pelatnas dan NPC. Setelah itu diadakan Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program latihan, hal ini diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan program yang telah dilaksanakan.

Pada indikator kinerja jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*, efisiensi dapat dilihat dari aspek penggunaan anggaran yang diberikan serta upaya yang dilakukan. Mayoritas anggaran yang ada di Deputi

Peningkatan Prestasi Olahraga selain untuk mendukung *Olympic Games* juga dipergunakan untuk *event* olahraga PON dan PAPERNAS yang dilaksanakan di Papua serta dukungan dan fasilitasi pada *single event* dan ajang olahraga nasional dan regional lainnya. Berdasarkan perolehan medali emas pada *Olympic Games* tidak terdapat penurunan atau peningkatan jumlah medali emas yang dicapai, namun terdapat efisiensi anggaran dari tahun 2016 ke tahun 2021. Adapun beberapa kegiatan yang relevan dalam mendukung pencapaian target pada *Olympic Games* antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.22 Dukungan Kegiatan Dalam Mendukung Pencapaian Target *Olympic Games* Tahun 2021

KEGIATAN YANG RELEVAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
3824.QEI.002 Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga <i>Olympic</i>	20.234.932.000	17.271.659.220	85,4
3824.QEI.004.052 Penyaluran Bantuan Sarana Olahraga Prestasi Cabang Olahraga <i>Olympic</i>	1.090.850.000	259.690.000	23,8
3829.QEI.001 Organisasi Cabang Olahraga <i>Olympic, Paralympic</i> , Koni dan KOI yang terfasilitasi dalam Peningkatan Prestasi Olahraga	1.001.416.000	929.624.291	92,8
3833.QDC.001.053 Fasilitasi Pembinaan Olahragawan elite nasional berbasis <i>Olympic</i>	310.121.862.000	309.482.508.494	99,8
3833.QEI.002.052.A Bantuan Keikutsertaan Kontingen Indonesia pada Kejuaraan Multievent tingkat Internasional <i>Olympic Games</i>	25.229.781.000	25.229.781.000	100
Total	357.678.841.000	353.173263.005	98,74

Dari tabel di atas terlihat bahwa besaran pagu anggaran yang mendukung pencapaian target dalam *Olympic Games* adalah sebesar Rp. 357.678.841.000 dengan total realisasi sebesar 98,74 %.

SASARAN STRATEGIS 3:
Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan international
INDIKATOR 3.3:
Jumlah perolehan medali emas <i>Paralympic Games</i>

Paralimpiade merupakan ajang kompetisi olahraga internasional untuk atlet penyandang disabilitas terbesar di dunia. Serupa dengan ajang olimpiade, paralimpiade diselenggarakan 4 tahunan dan dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2020, namun dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda sehingga mengakibatkan event tersebut harus ditunda dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Perbedaan utama antara Paralimpiade dengan Olimpiade terdapat pada peserta yang berpartisipasi di ajang tersebut. Paralimpiade hanya boleh diikuti atlet penyandang disabilitas saja, oleh karena itu cabang olahraga yang dipertandingkan juga berbeda dengan beberapa cabang olahraga lainnya dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan atlet yang berlomba.

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Perolehan Medali Emas *Paralympic Games*

INDIKATOR	REALISASI 2012	REALISASI 2016	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN %
Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i>	-	-	1 emas	2 emas	200%

Berdasarkan tabel di atas capaian dari indikator kinerja sasaran strategis 3.3 tercapai sangat baik, Indonesia berhasil meraih 2 medali emas yang didapatkan melalui cabang olahraga Bulutangkis pada nomor Ganda Putri dan Ganda Campuran. Pada pelaksanaan *Paralympic Games XXXII* yang dilaksanakan di Tokyo, Jepang

tanggal 24 Agustus-5 September 2021, Indonesia mengirimkan 23 Atlet kontingen yang terdiri dari 14 atlet putra dan 9 atlet putri pada 7 Cabang Olahraga yang diantaranya sebagai berikut: 7 Atlet Bulutangkis, 1 Atlet Angkat Besi, 3 Atlet Tenis Meja, 2 Atlet Renang, 7 Atlet Atletik, 1 Atlet Sepeda, dan 2 Atlet Menembak.



Gambar 3.30 Kontingen Indonesia dalam Paralympic Games Tokyo

Peringkat Indonesia pada *Paralympic Games* Tokyo berada pada peringkat ke-43 dari 206 Negara yang turut serta pada Tokyo 2020 Paralympic Games. Berikut daftar atlet Indonesia peraih medali Paralimpiade Tokyo 2020:

1. 1 Medali Emas Cabor Para Badminton, Ganda Putri SL3-SU5 (Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah)
2. 1 Medali Emas Cabor Para Badminton, Ganda Campuran SL3-SU5 (Hary Susanto/Leani Ratri Oktila)
3. 1 Medali Perak Cabor Para Powerlifting Putri 41 kg (Ni Nengah Widiasih)
4. 1 Medali Perak Cabor Para Badminton, Tunggal Putra SU5 (Dheva Anrimusthi)
5. 1 Medali Perak Cabor Para Badminton, Tunggal Putri SL4 (Leani Ratri Oktila)
6. 1 Medali Perunggu Cabor Para Atletik, Putra 100m T37 (Saptoyoga Purnomo)
7. 1 Medali Perunggu Cabor Para Badminton, Tunggal Putra SU5 (Suryo Nugroho)
8. 1 Medali Perunggu Cabor Para Badminton, Tunggal Putra SL4 (Fredy Setiawan)
9. 1 Medali Perunggu Cabor Para Tenis Meja, Tunggal Putra TT10 (David Jacobs)

Pencapaian Indonesia dalam ajang Paralimpiade cukup membanggakan, hal ini merupakan ditandai dengan adanya prestasi

yang diperoleh Indonesia. Terutama pada pencapaian di Paralimpiade 2020 yang menjadi sejarah baru bagi Indonesia selama berpartisipasi di

pesta olah raga antar disabilitas ini. Selain itu koleksi medali yang diraih atlet Indonesia mampu melampaui target awal yang ditetapkan NPC Indonesia. Di bawah ini adalah data

perolehan medali Indonesia sejak Paralimpiade tahun 1976 saat pertama kali Indonesia mendapatkan medali melalui cabang olahraga Atletik dan *Lawn Bowls*.

Tabel 3.24 Perolehan Medali Pada *Paralympic Games* Tahun 1976-2020

OLIMPIADE	TUAN RUMAH	EMAS	PERAK	PERUNGGU	PERINGKAT	KETERANGAN
1976	Toronto, Kanada	2	1	3	26	1 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu Cabor Para Atletik 1 Emas Cabor Para <i>Lawn Bowls</i>
1980	Arnhem, Belanda	2	0	4	27	1 Emas Cabor Para Powerlifting 1 Emas Cabor <i>Lawn Bowls</i> 4 Perunggu Cabor <i>Lawn Bowls</i>
1984	Stoke Mandeville, New York	0	1	1	30	1 Perak, 1 Perunggu Cabor <i>Lawn Bowls</i>
1988	Seoul, Korea	0	2	0	42	2 Perak Cabor Para Atletik
1996	Atlanta, Italia	0	0	0	-	-
2000	Sydney, Australia	0	0	0	-	-
2004	Athena, Yunani	0	0	0	-	-
2008	Beijing, China	0	0	0	-	-
2012	London, Inggris	0	0	1	74	1 Perunggu Cabor Para Tenis Meja
2016	Rio de Janeiro, Brazil	0	0	1	76	1 Perunggu Cabor Angkat Besi
2020	Tokyo, Jepang	2	3	4	43	2 Emas, 2 Perak, 2 Perunggu Cabor Para Badminton 1 Perak Cabor Para Angkat Besi 1 Perunggu Cabor Para Atletik 1 Perunggu cabor Para Tenis Meja

Mengacu pada data prestasi atlet Indonesia dalam multi event olimpiade yang telah dilaksanakan sejak 1976 hingga olimpiade 2020, Indonesia telah mendapatkan 6 medali emas, 7 medali perak dan 14 medali perunggu. Sejauh ini cabang olahraga terbaik dalam ajang paralimpiade adalah Para Bulutangkis dan Lawn Bowls dengan masing-masing 2 emas.

**27 MEDALI INDONESIA
DI PARALIMPIADE 1976-2021**



Year	Medals
Toronto 1976	2 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
Arnhem 1980	1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
New York/ Stoke Mandeville 1984	1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
Seoul 1988	1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
London 2012	1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
Rio de Janeiro 2016	1 Gold, 1 Silver, 1 Bronze
Tokyo 2020	2 Gold, 2 Silver, 2 Bronze

Kontribusi Medali per Cabang Olahraga



Tahapan awal dalam kegiatan Keikutsertaan Kontingen Indonesia pada Multi event di Tingkat Internasional merupakan koordinasi dengan Lembaga Keolahragaan yang tercatat menjadi anggota dari Federasi Internasional Pekan Kejuaraan (*Multievent* Internasional) dalam hal ini adalah *National Paralympic Committee* Indonesia (NPC). Bantuan keikutsertaan Kontingen Indonesia pada Kejuaraan *Multievent* Tingkat Internasional Paralympic Games adalah bentuk dukungan dan peran serta pemerintah untuk kemajuan Olahraga Nasional di tingkat Internasional. Yang mana Paralimpiade adalah kasta tertinggi *Multievent* olahraga untuk atlet disabilitas. Bantuan diserahkan dalam bentuk uang kepada NPC yang kemudian dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pengelolaan pemusatan pelatihan olahraga nasional dan fasilitasi kejuaraan olahraga prestasi di tingkat internasional untuk melakukan evaluasi terhadap bantuan yang telah di salurkan untuk dijadikan pembelajaran pada kegiatan-kegiatan berikutnya.



Olahraga merupakan bagian integral dari proses pembangunan bangsa dan negara. Proses pembinaan olahraga yang baik pada akhirnya akan bermuara pada lahirnya prestasi olahraga nasional yang dapat dibanggakan di kancah internasional sekaligus mencerminkan harkat dan martabat bangsa. Meningkat dan berkembangnya prestasi olahraga nasional memerlukan proses pembinaan jangka Panjang yang terencana dan terarah melalui pengelolaan yang baik dengan dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mencapai prestasi olahraga yang optimal harus diawali dari pemasalan

olahraga, dilanjutkan dengan pembibitan calon olahragawan usia dini, melalui pembinaan secara berjenjang dan berkesinambungan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Ini sesuai program prioritas Kemenpora tahun 2020-2024 khususnya point 4 dan 5 adalah sebagai berikut: Pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat, dan Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi olahragawan yang terencana dan berkesinambungan.



Gambar 3.31 Perolehan Medali *Paralympic Games*

Dalam Desain Besar Olahraga Nasional, salah satu kebijakan yang dilaksanakan difokuskan pada peningkatan pencapaian prestasi olahraga dunia dimana salah satunya adalah capaian peringkat pada ajang paralimpiade, dimana strategi yang diterapkan adalah melalui pembinaan dan pengembangan fokus pada cabang olahraga unggulan paralimpik, penerapan sistem promosi dan degradasi kepada 5 (lima) cabang olahraga unggulan paralimpik, penerapan sistem pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga,

pembinaan dan pengembangan olahraga nasional dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan berstandar internasional, penyelenggaraan kompetisi olahraga, partisipasi pada kompetisi single/multievent Olahraga internasional, penerapan revitalisasi pelaku organisasi dan sumber daya manusia, penataan kelembagaan, dan pengembangan peran dunia usaha. Adapun beberapa kegiatan pendukung dari capaian kinerja perolehan *paralympic games* antara lain sebagai berikut.

1. Bantuan Keikutsertaan Kontingen Indonesia pada Kejuaraan *Multievent* tingkat Internasional *Paralympic Games*

Sesuai dengan PP 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, Pemerintah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan keikutsertaan Indonesia di pekan olahraga internasional mulai tahap

perencanaan, persiapan, sampai dengan pelaksanaan. Untuk itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memfasilitasi pengiriman Kontingen Indonesia pada *multievent* tingkat internasional pada tahun 2021.

2. Penyaluran Bantuan Cabor NPC

Dukungan fasilitasi Olahragawan Elite Nasional perpedoman dari Perpres No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Deputi Bidang Olahraga Prestasi melalui Asisten Deputi Olahraga Prestasi melaksanakan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) 2021 berkelanjutan tidak terputus kepada

Induk Organisasi Cabang Olahraga dan *National Paralympic Committee* (NPC). Cabang olahraga yang difasilitasi adalah cabang olahraga yang berpotensi mendapatkan medali emas pada multi event internasional. Sehingga, bantuan yang diberikan optimal untuk peningkatan prestasi nasional.

3. Tenaga Keolahragaan *Olympic/Paralympik* yang dibina dan dikembangkan (Pelatihan Pendukung Ilmu Keolahragaan)

Pelatihan tenaga keolahragaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemenpora di level pusat dan Dispora di daerah bekerjasama dengan Induk Cabang Organisasi, Induk Cabang Organisasi itu sendiri maupun mengirimkan tenaga keolahragaan ke luar negeri. Pelatihan yang dapat dilaksanakan di dalam negeri dapat bersifat level Internasional dan Nasional.

Sedangkan pelatihan di provinsi untuk mempersiapkan tenaga keolahragaan ke level Nasional. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas tidak hanya diperlukan untuk Pelatih/Instruktur dan Wasit/Juri saja. Tenaga Keolahragaan Pendukung Seperti Psikolog, Messure, Gizi Olahraga dan pendukung lainnya perlu mendapatkan peningkatan kapasitas.

Metode pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Tenaga keolahragaan ini sebagai berikut:

- a. Pelatihan sertifikasi leveling yang bekerja sama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga;
- b. Proposal/Surat permohonan bantuan dari perorangan/organisasi keolahragaan untuk sertifikasi di luar negeri;
- c. Pelatihan sertifikasi yang di serahkan ke pemerintah daerah kerjasama dengan pengurus provinsi organisasi keolahragaan.

4. Tenaga Keolahragaan *Olympic/Paralympik* yang bersertifikat

Pelatihan tenaga keolahragaan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemenpora di level pusat dan Dispora di daerah bekerjasama dengan Induk Cabang Organisasi, Induk Cabang Organisasi itu sendiri maupun mengirimkan tenaga keolahragaan ke luar negeri. Pelatihan yang dapat dilaksanakan

di dalam negeri dapat bersifat level Internasional dan Nasional. Sedangkan pelatihan di provinsi untuk mempersiapkan tenaga keolahragaan ke level Nasional. Pelatihan Tenaga Keolahragaan yang diharapkan memiliki sertifikat yang bestandar nasional maupun internasional sesuai ketentuan masing-masing federasi.

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
INDIKATOR 3.4:
Peringkat pada <i>SEA Games</i>

Perhelatan *event* olahraga se-Asia Tenggara *SEA Games* dan *Asean Paragames* yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 di Vietnam mengalami penundaan karena pandemi Covid-19, hal ini mengakibatkan target indikator kinerja ini tidak dapat dilakukan penilaian.

Tabel 3.25 Realisasi Capaian Kinerja Peringkat Pada *SEA Games*

Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2019	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Peringkat pada <i>SEA GAMES</i>	5	4	3	N/A	N/A

Peringkat Indonesia pada *SEA Games* 2017 yang berlangsung di Kuala Lumpur finis di posisi kelima klasemen dengan koleksi total 191 medali, terbagi dari 38 emas, 63 perak dan 90 perunggu Peringkat Indonesia pada *SEA Games* 2019 yang berlangsung di Filipina, Kontingen Indonesia finis di posisi keempat klasemen dengan koleksi total 267 medali, terbagi dari 72 emas, 84 perak dan 111 perunggu. Indonesia di *SEA Games* 2019 semakin baik mengalami peningkatan dari segi peringkat maupun perolehan medali dari *SEA Games* 2017. *Sea Games* Hanoi 2021 yang rencananya berlangsung pada 21 November hingga 2 Desember 2021 namun ditunda ke 2022 karena pandemi Covid-19 dan dipastikan akan digelar pada 12-23 Mei 2022 dan Indonesia mempunyai

target peningkatan peringkat dari *SEA Games* 2019 dan cabor sepakbola bisa dapat medali emas

Berdasarkan hasil evaluasi pada penyelenggaraan *SEA Games* ke-30 tahun 2019 di Filipina jika dikelompokkan berdasarkan 4 kelompok cabang olahraga yaitu cabang olahraga terukur, beladiri, akurasi dan permainan, Indonesia menempatkan posisi terbaik pada cabang olahraga kelompok terukur. Namun cabang olahraga beladiri merupakan cabang yang memiliki paling banyak nomor pertandingannya. Sehingga Indonesia perlu lebih meningkatkan perolehan emas di Beladiri dan Terukur pada *SEA Games* mendatang. Secara umum prestasi Indonesia pada ajang *SEA Games* tahun 2001-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.26 Perolehan Medali Emas dalam SEA Games Tahun 2001-2019

SEA Games	Medali	Persentase Emas	Rank
XXX/2019 Manila, PHI	72-84-111	13,61%	4
XXIX/2017 Kuala Lumpur, MAS	38-63-90	9,41%	5
XXVIII/2015 Singapura	47-61-74	11,66%	5
XXVII/2013 Nay Pyi Taw, MYA	65-84-111	14,10%	4
XXVI/2011 Jakarta-Palembang, INA	182-151-143	32,85%	1
XXV/2009 Vientiane, DPR Lao	43-53-74	11,56%	3
XXIV/2007 Nakhorn Ratchashima, THA	56-64-82	11,74%	4
XXIII/2005 Manila, PHI	50-78-89	11,26%	5
XXII/2003 Ho Chi Minh, VIE	55-68-98	12,39%	3
XXI/2001 Kuala Lumpur, MAS	72-74-80	18,37%	3

Persentase Emas INDONESIA ketika tidak berstatus tuan rumah SEA Games antara 9,41 – 18,37% Setelah mengalami titik nadir dengan persentase Emas 9,41% pada SEA Games 2017, Indonesia berhasil bangkit pada SEA Games 2019 dengan 13,61% Emas berkat momentum sukses sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

Peningkatan prestasi dalam waktu singkat (1-2 tahun) antara 1-2%, sehingga target Indonesia pada SEA Games 2022 dengan perolehan persentase Emas antara 14-16% dan naik ke Peringkat 3. Berikut adalah rekapitulasi potensi perolehan medali emas pada SEA Games 2022.

Tabel 3.27 Rekapitulasi Potensi Perolehan Medali Emas *SEA Games* 2022

NO	SPORTS	EVENT			TOTAL
		MEN	WOMEN	MIX	
1	AQUATICS-SWIMMING	3	0	0	3
2	ARCHERY	2	0	0	2
3	ATHLETICS	4	2	0	6
4	BADMINTON	2	0	1	3
5	BEACH VOLLEYBALL	1	0	0	1
6	BOWLING	1	1	0	2
7	CANOE	5	2	0	7
8	CHESS	2	2	0	4
9	CYCLING-ROAD	1	0	0	1
10	GYMNASTICS-ARTISTIC	2	1	0	3
11	JUDO	2	1	0	3
12	KARATE	1	2	0	3
13	PENCAK SILAT	2	1	0	3
14	ROWING	5	2	0	7
15	SEPAKTAKRAW	1	0	0	1
16	SHOOTING	3	2	1	6
17	TAEKWONDO	1	1	0	2
18	TENNIS	0	2	1	3
19	TRIATHLON	1	0	0	1
20	VOLLEYBALL-INDOOR	1	0	0	1
21	WEIGHTLIFTING	3	1	0	4
22	WUSHU	3	0	0	3
23	FINSWIMMING	1	1	0	2
24	VOVINAM	0	1	0	1
TOTAL		47	22	3	72

Berdasarkan analisa lainnya terkait dengan pelaksanaan *SEA Games*, faktor tuan rumah ternyata memberikan dampak terhadap pencapaian prestasi, diantaranya adalah Peluang tuan rumah untuk meraih Juara Umum (7 dari 10 kali penyelenggaraan) adalah 70%, Peningkatan Medali Emas tuan rumah dibandingkan *SEA Games* sebelumnya sebesar 194-660%, dan Kehilangan medali emas pada *SEA*

Games berikut setelah menjadi tuan rumah sebesar 32-81%. Oleh karena berdasarkan analisa tersebut, maka pada penyelenggaraan *SEA Games* di Vietnam, maka Vietnam berpeluang besar menjadi juara umum *SEA Games* 2021 sementara Filipina akan mengalami penurunan prestasi yang cukup signifikan sehingga Indonesia berpeluang naik ke Peringkat 3.

Capaian yang diraih oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam bidang keolahragaan tidak terlepas dari kendala dan permasalahan. Identifikasi

permasalahan yang terjadi selama proses pencapaian sangat penting untuk diketahui, agar dapat ditetapkan langkah-langkah strategis sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama di tahun mendatang. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya pada bidang olahraga menghadapi beberapa kendala yaitu:

1. Masih adanya penempatan SDM pada bidang-bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian;
2. Tata kelola yang belum optimal karena adanya beberapa kali perubahan struktural, serta pejabat pengelola anggaran;
3. Budaya Kinerja yang belum terbangun;
4. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung program sehingga data dan sumber data masih beragam bahkan pada beberapa sisi masih terdapat data yang sulit untuk diakses;
5. Adanya realokasi anggaran yang dilakukan pada akhir tahun sehingga sangat sulit untuk dapat dilaksanakan secara optimal, maka hal ini secara tidak langsung dapat mengurangi target total pencapaian penyerapan hingga akhir tahun anggaran.

SASARAN STRATEGIS 3
Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional
INDIKATOR 3.5:
Peringkat pada <i>Asean Paragames</i>

Asean Paragames yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2021 di Vietnam mengalami penundaan karena pandemi Covid-19, hal ini mengakibatkan target indikator kinerja ini tidak dapat dilakukan penilaian.

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator Peringkat pada *Asean Paragames*

Indikator	Realisasi 2017	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Peringkat <i>Asean Paragames</i>	1	N/A	1	N/A	N/A



Setelah ditiadakannya *Asean Paragames* (APG) Filipina 2019 dan Vietnam menolak menjadi tuan rumah APG 2022 sehingga Indonesia ditetapkan sebagai tuan rumah *Asean Para Games XI* berdasarkan surat keputusan *Asean Para Sport Federation* (APSF) pada 14 Januari 2021. *Asean Paragames* rencananya akan diadakan pada 20 s.d. 31 Juli 2022 di Kota Solo dan beberapa daerah sekitar. Salah satu tantangan yang terbesar saat ini adalah pandemi yang masih melanda sehingga mengakibatkan program/kegiatan perlu dilakukan adaptasi dengan kondisi saat ini.

Beberapa solusi yang dapat dilakukan terkait berbagai kendala tersebut antara lain:

1. Perlunya peningkatan sinergitas tata kelola antar Kementerian/Lembaga dan sinkronisasi regulasi pelaksanaan olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade;
2. Penambahan anggaran untuk pembinaan olahraga prestasi;
3. Peningkatan kompetensi SDM dan tenaga keolahragaan;
4. Optimalisasi setiap program, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi;
5. Percepatan implementasi Perpres No 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional.

Sesuai dengan amanat Perpres 95 tahun 2017 bahwa Pemerintah wajib fasilitasi untuk pelaksanaan program pembinaan cabang olahraga kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga. Untuk meningkatkan prestasi olahragawan maka perlu diciptakan lingkungan keunggulan latihan, yaitu memenuhi

INFOGRAFIK

Solo tuan rumah ASEAN Para Games 2022

© Jumat, 28 Januari 2022 13:38 WIB



Proses pembinaan atlet andalan nasional juga mengalami dinamika dengan adanya pandemi ini, namun dengan keterbatasan dan permasalahan yang ada pencapaian target dalam ajang Asean Games tetap terus diupayakan.

kebutuhan atlet baik teknis maupun non teknis, secara teknis lingkungan keunggulan latihan berupa standar honorarium, kesempatan *try out*, *try in* dan *training camp* dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dalam program latihan, untuk olahraga permainan sebagai contoh Bulutangkis dan tenis jumlah ideal *try out* per tahun

antara 30-40 turnamen selain untuk meningkatkan kemampuan, juga untuk meningkatkan ranking. Sementara untuk olahraga terukur rata-rata memerlukan *try out* 10-20 kejuaraan per tahun.

Penyaluran bantuan dilaksanakan dalam bentuk uang yang disalurkan kepada Cabang Olahraga Pelatnas dan NPC. Setelah itu diadakan Monitoring dan Evaluasi untuk melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program latihan, hal ini diperlukan untuk menjamin keterlaksanaan program yang telah dilaksanakan.

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Presiden yang menjadi visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 adalah: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi aktor utama yang melaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional. Berkaitan dengan visi Presiden tersebut, untuk mewujudkan tujuan tercapainya visi

pembangunan nasional maka Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai visi tahun 2020-2024 “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.

Penyusunan Desain Besar (*Grand Design*) Kemenpora 2021-2032 merupakan upaya mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Di mana tujuannya adalah membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter.

Untuk mencapai hal tersebut salah satu kebijakan yang dilakukan adalah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing. Salah satu indikator keberhasilannya

adalah pencapaian prestasi olahraga di *Olympic Games*, *Paralympic Games*, *Asian Games* dan *Asian Para Games*. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelola SDM bertalenta. Khususnya pengembangan

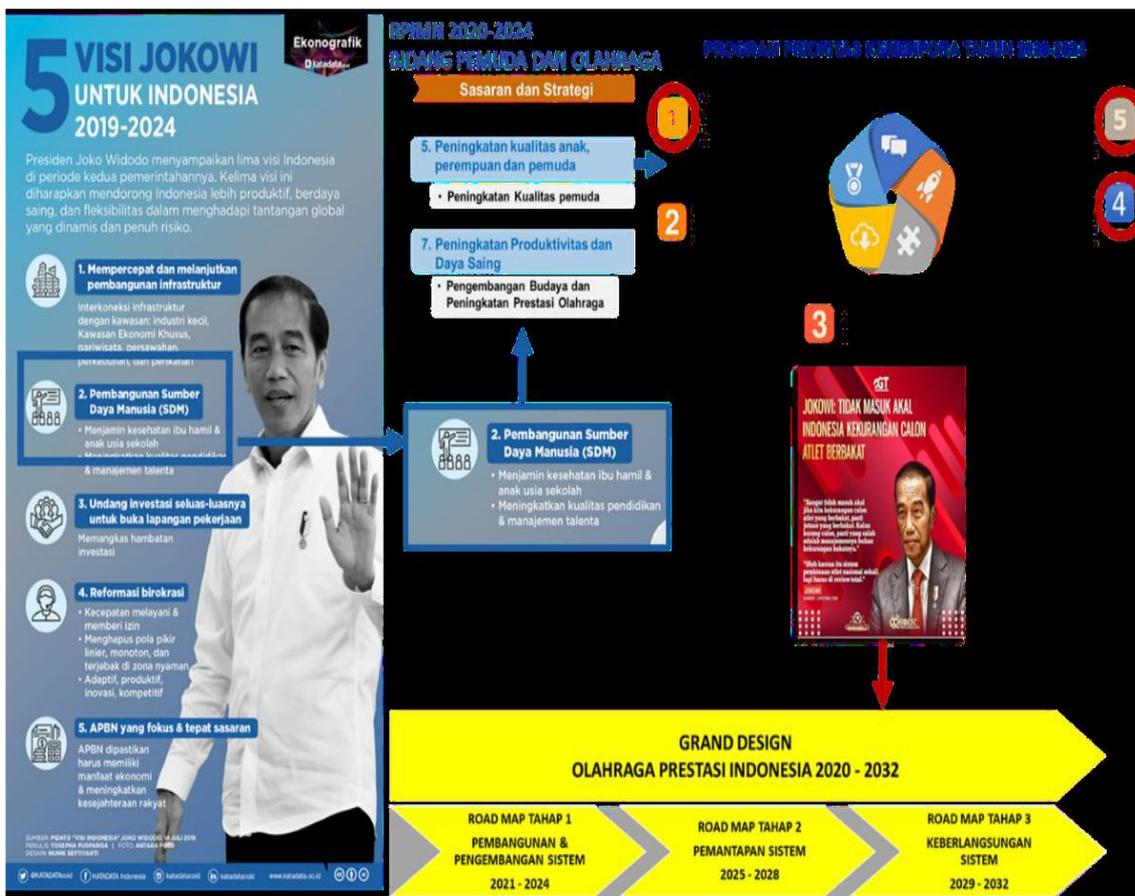
manajemen talenta di bidang olahraga yang mampu berprestasi di tingkat internasional.

Desain Besar (*Grand Design*) Olahraga disusun dengan memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan secara virtual pada saat peringatan Hari Olahraga Nasional pada tanggal 9 September 2020.



Gambar 3.32 Arahan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Hari Olahraga Nasional pada Tanggal 9 September 2020





Gambar 3.33 Keterkaitan DBON dengan Visi Misi Presiden dan Kemenpora

Berdasarkan Visi Presiden Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan arahan Presiden saat Hari Olahraga Nasional tahun 2020 maka Menteri Pemuda dan Olahraga membuat arah kebijakan terkait keolahragaan yaitu:

1. Perbaikan Tata Kelola Kelembagaan, Kompetensi ASN, Penyederhanaan Regulasi, Penyesuaian Birokrasi dan Peningkatan Kecepatan Pelayanan Publik.
2. Pemassalan dan Pemasyarakatan Olahraga yang Menimbulkan Kegemaran untuk Hidup Lebih Sehat dan Bugar di Kalangan Masyarakat.
3. Pembinaan Usia Dini dan Peningkatan Prestasi Atlet yang Terencana dan Berkesinambungan.

Keterkaitan Desain Besar (*Grand Design*) dengan Visi Kemenpora mengimplementasikan Arahan Presiden tersebut dengan

Desain Besar Olahraga Nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 pada tanggal 9 September

2021. Bertepatan dengan hari olahraga nasional yang ke-38. Desain Besar Olahraga Nasional disusun dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Pakar

dan Akademisi. Kegiatan ini terlaksana dengan sukses dan sangat baik dengan hasil capaian target 1 NSPK.

CAPAIAN KINERJA LAINNYA KEOLAHRAGAAN

SPORT DEVELOPMENT INDEX (SDI)

Sport Development Index (SDI) adalah metode pengukuran keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia. Tahun 2003-2007, Kemenpora pernah mengimplementasikan SDI dengan 4 dimensi, yaitu ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran jasmani. Dan tahun 2021 ini dimensi tersebut disempurnakan menjadi 9 dengan menambahkan literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi.

Pengumpulan data SDI 2021 mencakup 34 provinsi, 246 kabupaten/kota, 594 kecamatan, 667 desa/kelurahan, dan 20.010 responden serta melibatkan 2561 personil pengumpul data. Laporan SDI tersebut akhirnya disosialisasikan kepada perwakilan Dinas Pemuda dan Olahraga dari seluruh provinsi di Indonesia serta kepada Kementerian/Lembaga terkait pada acara sosialisasi SDI yang berlangsung di Jakarta pada 15 Desember 2021.

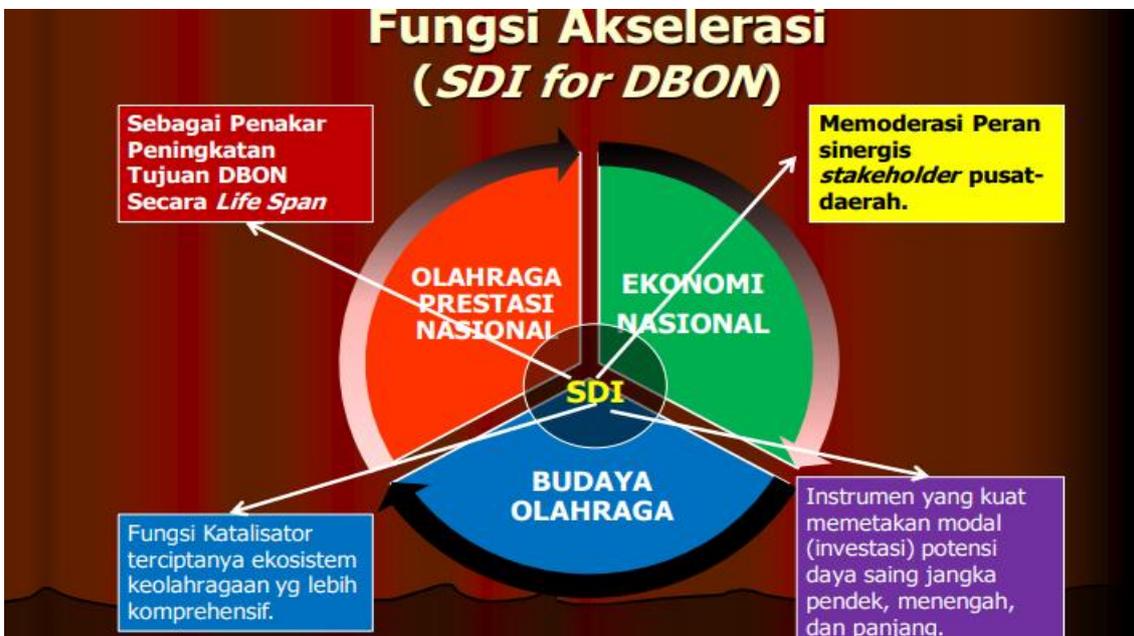
Adapun sinergitas antara Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan SDI dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.34 Sinergitas DBON dan SDI

SDI menjadi bagian integral dari DBON dan SDI perlu didukung dan diimplementasikan sebagai alternatif model pengukuran pembangunan olahraga masa kini dan masa akan datang. SDI adalah produk Indonesia dan dikembangkan pertama kali di dunia oleh putera Indonesia. SDI mengaktualisasikan olahraga sebagai instrumen pembangunan dan sekaligus memposisikan Pemerintah (Kemenpora) sebagai *leading sector*

yang memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), khususnya dalam era COVID-19 dan *New Normal*. SDI merupakan data strategis karena selain mengukur kinerja pemerintah (Kemenpora) dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan setiap tahun serta pengajuan anggaran berbasis data empirik sesuai *Key Performance Indicators*



Gambar 3.35 Fungsi Akselerasi SDI dan DBON

Pembaharuan SDI tahun 2021 yang berhasil dicapai oleh Kemenpora antara lain:

1. SDI sebagai Instrumen baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan olahraga yang komprehensif. SDI pertama kali (SDI I) digagas dan dikembangkan oleh Putera Indonesia (tahun 2003-2007);
2. SDI II dikembangkan tahun 2020 dan diimplementasikan tahun 2021 sebagai INSTRUMEN Pengukur yang reliabel dan Valid untuk mengukur hasil Pembangunan Olahraga secara Komprehensif melingkupi: Olahraga, Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi;

3. SDI selaras dengan Paradigma Baru Pembangunan Olahraga yang mengintegrasikan Development of Sport and Development through Sport dengan orientasi berbasis Output dan Outcome (Dampak Olahraga);
4. SDI memiliki cakupan lebih luas dibandingkan *Sport Culture Index* (Malaysia, 2019) yang memusatkan pada Pembudayaan Olahraga dengan 5 dimensi (Partisipasi/keterlibatan, Belanja/spending Kecintaan, Kesukarelaan, dan fasilitas);
5. SDI dikembangkan oleh Putera Indonesia sejak tahun 2003 melalui riset menghasilkan SDI I (2003-2007) dengan 4 Dimensi: SDM, Ruang Terbuka, Partisipasi, & Keguagaran Jasmani. SDI II dikembangkan melalui penelitian menjadi 9 Dimensi. Tambahkan 5 Dimensi mencakup: Literasi Fisik, Perkembangan Personal, Kesehatan, Performa dan Ekonomi;
6. SDI menjadi ICON & LEGACY KEMENPORA sebagai leading sektor Pembangunan Olahraga secara berkelanjutan.

Pengukuran SDI diambil melalui 9 (sembilan) dimensi yaitu SDM Olahraga, Ruang Terbuka, Literasi Fisik, Partisipasi, Kebugaran, Perkembangan Personal, Kesehatan, Ekonomi dan Performa. Pengambilan sampling data SDI dilakukan di 34 (tiga puluh empat) provinsi, 246 (dua ratus empat puluh enam) kabupaten, 667 (enam ratus enam puluh tujuh) kelurahan/desa/kampung dan dengan 20.010 responden *sampling*. Karena besarnya jumlah data yang diambil, Kemenpora membutuhkan kepanjangan tangan Dinas/Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan olahraga di wilayah provinsi dan kabupaten sebagai pengumpul data di daerah. Pengumpul data disini yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga dibagi dalam berbagai tingkat dari provinsi, kabupaten, desa/kecamatan, sedangkan responden diambil dari

masyarakat umum yang ada di desa yang menjadi *sampling*.

Dalam pengukuran pembangunan olahraga melalui SDI langkah-langkah yang tempuh melalui sebagai berikut: (i) Koordinasi dan Sosialisasi Pengambilan Sampling Data SDI; (ii) Bimbingan Teknis (Bimtek) SDI; (iii) Pengumpulan Data melalui Aplikasi SISDI; (iv) Analisis SDI; dan (v) Sosialisasi SDI. Koordinasi dan sosialisasi pengambilan data SDI bertujuan untuk memberikan informasi awal terkait pengambilan data SDI kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi dan dilanjutkan ke Kabupaten/Kota. Pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis pada Juli s.d Oktober 2021 dilakukan secara *luring* dan juga *daring* menyesuaikan pemberlakuan PPKM pada saat itu.



SPORT DEVELOPMENT INDEX (SDI) TAHUN 2021

9 Dimensi tolak ukur SDI

- SDM Olahraga
- Ruang Terbuka
- Literasi Fisik
- Partisipasi
- Kebugaran
- Perkembangan Kesehatan
- Ekonomi
- Performa




Metode sampling: Random Sampling

Nasional: 34 Provinsi

Kabupaten/Kota: Kab/Kota ke-3, Kab/Kota ke-246

Desa/Kelurahan: Desa/Kel ke-3, Desa/Kel ke-2, Desa/Kel ke-667

TRW, TRT

PEMUDA MAJU OLAHRAGA JAYA

Target SDI 2021:
34 Provinsi, 246 Kab/Kota, 667 Desa/Kel, 20.010 Responden

No	Provinsi	Kab/Kota Sampel	Desa/Kel Sampel	Jml Resp
1	DKI Jakarta	3	26	780
2	Banten	4	32	960
3	Jawa Barat	14	123	3.690
4	DI Yogyakarta	3	10	300
5	Jawa Tengah	18	86	2.580
6	Jawa Timur	19	99	2.970
7	Bali	5	11	330
8	NTB	5	13	390
9	NTT	11	14	420
10	Maluku	4	4	120
11	Maluku Utara	3	3	90
12	Papua	8	8	240
13	Papua Barat	2	2	60
14	Gorontalo	3	3	90
15	Sulawesi Barat	3	3	90
16	Sulawesi Selatan	12	22	660
17	Sulawesi Tengah	7	8	240
18	Sulawesi Tenggara	7	7	210
19	Sulawesi Utara	6	6	180
20	Nangroe Aceh D.	12	13	390
21	Sumatera Utara	17	36	1.080
22	Riau	6	17	510
23	Sumatera Barat	10	14	420
24	Jambi	6	9	270
25	Bangka Belitung	4	4	120
26	Kepulauan Riau	4	5	150
27	Sumatera Selatan	9	21	630
28	Bengkulu	5	5	150
29	Lampung	8	21	630
30	Kalimantan Barat	7	13	390
31	Kalimantan Selatan	7	11	330
32	Kalimantan Tengah	7	7	210
33	Kalimantan Timur	5	9	270
34	Kalimantan Utara	2	2	60

Dimensi, Subdimensi, Instrumen, dan Sumber Data SDI

Dimensi	Subdimensi	Instrumen	Sumber Data
1. Literasi Fisik	Pengetahuan, Sikap, dan Predisposisi		
2. Partisipasi	Frekuensi, Durasi, dan Intensitas		
3. Perkembangan Personal	Resilien dan Modal Sosial	Angket/Skala	Responden
4. Kesehatan	Fisik dan Psikis		
5. Ekonomi	Belanja Barang dan Jasa Olahraga		
6. Ruang Terbuka	Indoor dan Outdoor		Pengukuran Lapangan
7. SDM Olahraga	Guru, Pelatih, Instruktur, dan Relawan	Format lisan Terbuka	Dikho/NDRI Kecamatan
8. Performa	Medal dan Populasi Atlet		Dikho/NDRI Provinsi
9. Kebugaran	Daya tahan kardiovaskuler	Tes Lapangan (MFT)	Responden



OLAHRAGA UNTUK INVESTASI PEMBANGUNAN MANUSIA

www.kemenpora.go.id | @kemenpora | @KEMENPORA_RI | Kemenpora RI



s.id/sdiwil



s.id/sdisurvei



Password : 123456

Gambar 3.36 Proses Pengukuran SDI

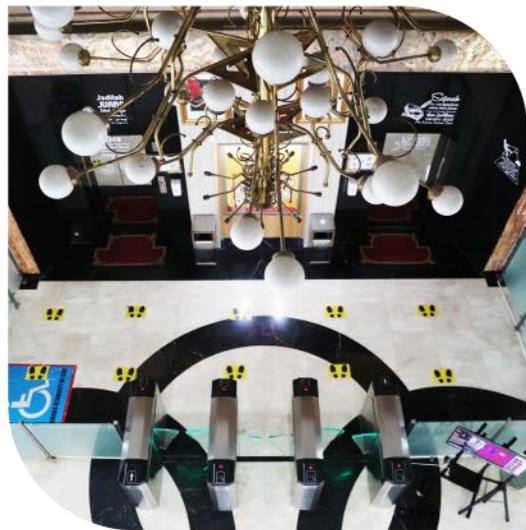
Dalam pelaksanaan koordinasi dan bimbingan teknis melalui daring/zoom memang lebih membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman dibandingkan pemberian penjelasan melalui luring. Ini tidak lepas dari masih banyaknya daerah yang kualitas jaringan komunikasi datanya tidak memadai, waktu pemaparan terbatas, narasumber/pemberi materi tidak bisa secara langsung menilai sejauh mana para peserta menerima dan memahami atas penjelasannya. Kondisi ini menyebabkan dilakukan berulang-ulang bimbingan teknis secara daring pada satu daerah yang sama.

Dalam teknis pengumpulan data, para tim kota/kabupaten melalui pencacah yang berasal dari daerah lokasi sampling melakukan pengumpulan

data dengan mengumpulkan 30 orang responden per desa yang terpilih sebagai desa sampling. Data yang terkumpul kemudian dimasukkan dalam aplikasi SISDI yang telah disiapkan oleh Asdep Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. Selanjutnya tim pusat melakukan verifikasi data yang dilanjutkan dengan analisis. Kemudian hasil data yang telah terkumpul dan telah melalui verifikasi data diolah oleh Tim Ahli SDI. Hasil ini telah disosialisasikan di Hotel Holiday Inn Kemayoran Jakarta pada 14 s.d. 16 Desember 2021 dengan mengundang 34 Dinas Provinsi dan 5 K/L yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Pusat Statistik.



ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG KESEKRETARIATAN



SASARAN STRATEGIS 4:
Meningkatnya manajemen tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih
INDIKATOR 4.1:
Indeks Reformasi Birokrasi

Secara umum Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan adanya perbaikan meskipun pelaksanaannya belum merata di seluruh unit kerja. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator terhadap seluruh unit kerja eselon I, implementasi Reformasi Birokrasi masih dianggap sebagai penugasan semata belum melekat pada pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kementerian Pemuda dan Olahraga pun telah menetapkan nilai organisasi yaitu Akuntabel, Profesional, Integritas, Kreatif (APIK) sebagai bagian yang mewarnai nilai dan perilaku pegawai di lingkungan Kemenpora. Telah dilakukan internalisasi terhadap nilai-nilai tersebut, namun belum diimplementasikan oleh seluruh pegawai Kemenpora. Selain itu juga melakukan evaluasi kelembagaan dan penataan tatalaksana organisasi secara internal dengan hasil terdapat tumpang tindih tugas fungsi diantara unit kerja, menyusun rumusan ukuran kinerja pegawai secara

:

berjenjang, pengukuran kinerjanya secara elektronik di seluruh level organisasi dipantau secara berkala melalui pengisian *logbook* dengan menggunakan aplikasi berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 4 Tahun 2019, namun belum digunakan sebagai alat ukur pemberian tunjangan kinerja dan survei telah dilaksanakan pada unit kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Hasil survei menyebutkan bahwa area pelayanan publik yang masih perlu dilakukan pengembangan adalah terkait penggunaan teknologi informasi. Sebagai bagian dari komitmen transparansi untuk menuju Reformasi Birokrasi yang lebih baik, saat ini telah tersedia informasi Reformasi Birokrasi Kemenpora yang dapat diakses melalui portal www.rb.kemenpora.go.id.

Adapun capaian Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2020 berdasarkan nilai masing-masing area perubahan sebagai berikut

Tabel 3.29
Capaian indeks RB tahun 2018-2020 Kemenpora per Area Perubahan

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	HASIL PENILAIAN MENPAN RB		
			2018	2019	2020
A	Pengungkit				
1	Manjemen Perubahan	5.00	2,04	2,10	1,78
2	Penataan Deregulasi Kebijakan	5.00	3,34	3,36	1,90
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6.00	4,04	4,09	2,13
4	Penataan Tatalaksana	5.00	3,11	3,20	1,85
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15.00	12,27	12,35	2,79
6	Penguatan Akuntabilitas	6.00	3,32	3,35	2,08
7	Penguatan Pengawasan	12.00	3,18	3,21	2,03
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6.00	1,92	2,42	1,90
	Sub Total Komponen Pengungkit Kementerian	60.00	33,21	34,08	36,61*
B	Hasil				
1	Akuntabilitas Kinerja Organisasi	10.00	12,15	13,70	7,63
2	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10.00	7,27	9,37	9,25
3	Kualitas Pelayanan Publik	10.00	8,00	8,73	8,95
4	Kinerja Organisasi	-	-	-	5,11
	Sub Total Komponen Hasil	40.00	27,41	31,79	30,94
	Total Indeks Reformasi Birokrasi	100.00	60,62	65,87	67,55

Catatan: *Sub Total Komponen Pengungkit Kementerian pada Tahun 2020 berbeda perhitungannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika pada tahun sebelumnya total pengungkit merupakan hasil dari aspek pemenuhan, tahun 2020 total pengungkit merupakan akumulasi dari 3 (tiga) aspek yaitu Pemenuhan (20), Hasil Antara Area Perubahan (10) dan Reform (30), dengan total bobot 60 dan rincian bobot per aspek. Indeks Reformasi Birokrasi didukung pula oleh beberapa indeks lain yang dinilai oleh instansi pembina, diantaranya:

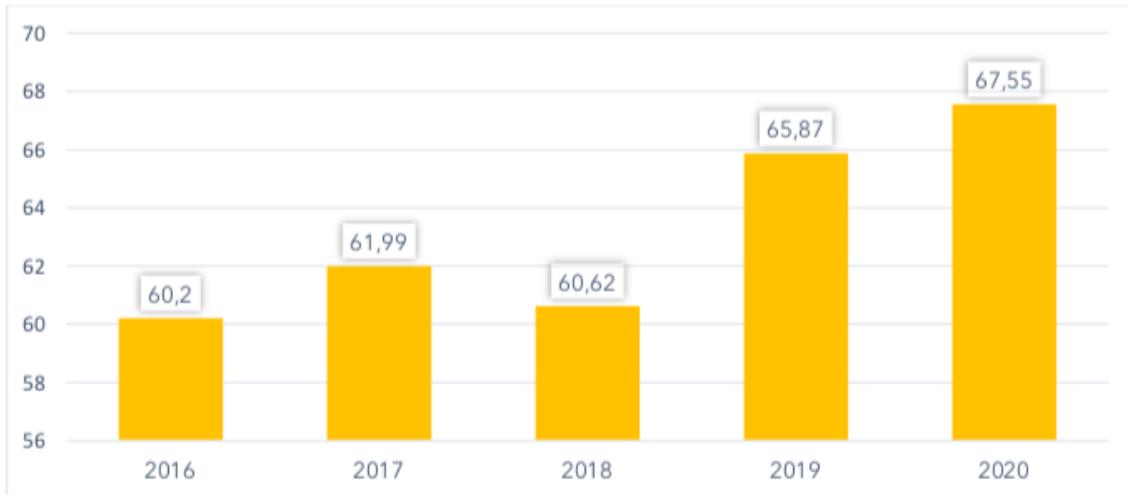
Tabel 3.30 Indeks Hasil Antara

NO	INDEKS HASIL ANTARA	KETERANGAN
1	Kualitas Pengelolaan Arsip	Penilaian menggunakan Hasil Pengawasan Kearsipan (Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019)
2	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Penilaian menggunakan Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh LKPP
3	Kualitas Pengelolaan Keuangan	Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan
4	Kualitas Pengelolaan Aset	Penilaian menggunakan Hasil Indeks Pengelolaan Aset yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan
5	Merit System	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dan Manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah (Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019)
6	ASN Profesional	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019)
7	Kualitas Perencanaan	Penilaian menggunakan Indeks Perencanaan yang dilakukan oleh Bappenas
8	Maturitas SPIP	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP (Perka BPKP Nomor 4 Tahun 2016)
9	Kapabilitas APIP	Penilaian menggunakan instrumen tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP (Perka BPKP Nomor 16 Tahun 2015)

NO	INDEKS HASIL ANTARA	KETERANGAN
10	Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik	Penilaian merupakan hasil survey kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 dengan membagi 3 tingkat kepatuhan (tinggi, sedang, rendah). Dilaksanakan berdasarkan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Tabel 3.31 Rincian Bobot pada Komponen Penilaian Reformasi Birokrasi Kementora

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	16,45
1.	Manajemen Perubahan	2,00	1,78
2.	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,90
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	3,00	2,13
4.	Penataan Tatalaksana	2,50	1,85
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	3,00	2,79
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,08
7.	Penguatan Pengawasan	2,50	2,03
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,90
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,55
	III. Reform	30,00	15,60
1.	Manajemen Perubahan	3,00	1,89
2.	Deregulasi Kebijakan	3,00	1,87
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	4,50	2,20
4.	Penataan Tatalaksana	3,75	1,66
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	4,50	2,26
6.	Penguatan Akuntabilitas	3,75	1,35
7.	Penguatan Pengawasan	3,75	2,50
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	1,88
	Total Komponen Pengungkit	60,00	36,61
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,63
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,95
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,25
4.	Kinerja Organisasi	10,00	5,11
	Total Komponen Hasil	40,00	30,94
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	67,55



Gambar Grafik 3.37 Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2020

Merujuk pada grafik di atas, capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan, tetapi ditahun 2018 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2019-2020 mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dikarenakan *support* dan komitmen pimpinan yang sangat berpengaruh pada pergerakan dari Tim Reformasi Birokrasi Kemenpora.

Di bawah ini terlampir target dan capaian Kementerian Pemuda dan Olahraga pada indikator kinerja:

Tabel 3.32 Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian %
Indeks Reformasi Birokrasi	73,1%	N/A	N/A

Bedasarkan tabel di atas, capaian indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2018-2020 mengalami kenaikan yang sangat baik setiap tahunnya, merujuk pada nilai indeks dua tahun terakhir yang mengalami kenaikan bisa ditargetkan untuk indeks tahun 2021 ini bisa mencapai 70%.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah

dilaksanakan juga pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pembangunan Zona Integritas mengalami perkembangan yang di tandai dengan jumlah usulan yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2020 hanya satu unit yang melaksanakan zona integritas yaitu

Asdep Peningkatan IPTEK dan IMTAQ. Namun perbaikan terhadap integritas dan kualitas layanan pada unit kerja di lingkungan Kemenpora

masih perlu di tingkatkan dikarenakan belum adanya unit kerja yang berhasil meraih predikat WBK/WBBM ditahun 2021.

Berikut ringkasan hasil evaluasi atas usulan Zona Integritas Kementerian Pemuda dan Olahraga:

Tabel 3.33 Hasil Evaluasi atas Usulan Zona Integritas Kemenpora

No.	Tahapan Evaluasi	Jumlah	Keterangan
1.	Unit kerja diusulkan	5	Lima unit kerja menuju WBK
2.	Unit kerja memperoleh predikat WBK/ WBBM	0	Belum ada unit kerja yang memperoleh predikat WBK/WBBM
3.	Unit kerja tidak memperoleh predikat WBK dan WBBM		
	a. Unit kerja tidak memenuhi seleksi administrasi	0	a. Opini minimal WDP untuk predikat menuju WBK dan opini minimal WTP untuk predikat menuju WBBM b. LHKPN,LHKASN, dan TLHP minimal 100% c. Bobot nilai per area minimal 60% pada semua area pengungkit untuk predikat menuju WBK dan 75% untuk predikat menuju WBBM
	b. Unit kerja tidak memenuhi kriteria survei	3	a. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) WBK > 3,2 WBBM > 3,6 Indeks Persepsi Anti Korupsi WBK > 3,6 WBBM > 3,6 b. Jumlah Responden survei minimal 30 c. Validitas pelaksanaansurvei
	c. Unit kerja tidak lolos evaluasi	2	Unit kerja yang berdasarkan hasil evaluasi tidak memenuhi syarat, termasuk clearance dari instansi terkait

Saran perbaikan atas evaluasi Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021:

1. Meningkatkan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan nilai-nilai organisasi melalui dialog dan *sharing vision* antara pimpinan dengan pegawai di seluruh tingkatan organisasi;
2. Mengoptimalkan system pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya *fraud* (KKN);
3. Meningkatkan kapasitas dan peran Tim Penilai Internal dalam mengawal pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga agar mampu memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh masing-masing unit kerja.

Pada indikator Indeks Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, total pagu anggaran adalah sebesar Rp. 1.239.481.000. Dengan realisasi sebesar Rp.1.237.245.123 atau 99,82%. Dengan realisasi tersebut, harapannya efisiensi anggaran dapat terwujud pada implementasi Reformasi Birokrasi.

INDIKATOR 4.2:

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek Kebijakan Pelayanan, aspek Profesionalisme SDM, aspek Sarana Prasarana, aspek Sistem Informasi Pelayanan

Publik, aspek Konsultasi dan Pengaduan, dan aspek Inovasi.

Merujuk pada aspek dimaksud, KemenPANRB melakukan evaluasi setiap tahun kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dengan hasil evaluasi berupa nilai Indeks Pelayanan Publik dan kategori penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.34 Nilai indeks pelayanan publik dan kategori

RENTANG NILAI	KATEGORI	MAKNA
0 – 1,00	F	Prioritas Pembinaan
1,01 – 1,50	E	
1,51 – 2,00	D	
2,01 – 2,50	C-	Cukup (DC)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (DC)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Adapun target dan capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga pada rentang Tahun 2019 hingga 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35 Capaian dan Target Indeks Pelayanan Publik Kemenpora

Indikator	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Target 2021	Capaian 2021
Indeks Pelayanan Publik	3.05	3.83	4.00	N/A
Kategori	C (Cukup)	B- (Baik DC)	B (Baik)	

**Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021 belum dipublikasi oleh KemenPANRB*

Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalami peningkatan yang baik setiap tahun. Merujuk pada nilai Indeks Pelayanan Publik Tahun 2019 dan Tahun 2020 terdapat kenaikan nilai sebesar 0.78 poin. Nilai tersebut menjadi baseline sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2021 ditargetkan mencapai nilai 4.00.

Unit pelayanan publik yang diusulkan dan dievaluasi Tahun 2019 dan 2020 adalah Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Nasional (PPITKON) yang merupakan unit pelayanan teknis pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga. Sedangkan Tahun 2021, unit pelayanan publik yang diusulkan dan dievaluasi adalah Pusat Pemberdayaan

Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) yang merupakan unit pelayanan teknis pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda. Pergantian unit pelayanan publik yang diusulkan bertujuan untuk mendorong setiap unit pelayanan publik di Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki kualitas pelayanan publik yang setara dan prima.

Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga belum diketahui nilainya dikarenakan Laporan Hasil Evaluasi dari

Kementerian PAN dan RB belum di publikasi secara resmi kepada setiap Kementerian/Lembaga/Daerah disebabkan situasi pandemi Covid-19 yang mengalami lonjakan. Akan tetapi, Kementerian Pemuda dan Olahraga optimis bahwa nilai target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021 dapat tercapai dengan merujuk kepada trend penilaian Indeks Pelayanan Publik Kemenpora Tahun 2019 dan 2020 serta Berita Acara Evaluasi Pelayanan Publik KemenPAN RB Tahun 2021.

Dalam mencapai target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan strategi pencapaian target sebagai berikut:

1. Telah disusun dan direviu Standar Pelayanan pada PP-PON dengan berpedoman kepada PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 melalui Forum Konsultasi Publik dengan melibatkan unsur-unsur stakeholder terkait;
2. Telah dilakukan publikasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada ruang layanan, media sosial, website, dan sistem informasi pelayanan publik nasional;
3. Pegawai pada PP-PON telah mengenakan seragam khusus, identitas nama, PIN/logo unit pelayanan, dan menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun);
4. Sarana dan prasarana penunjang bagi pengguna layanan, termasuk pengguna layanan disabilitas, telah disediakan untuk menunjang pelayanan prima;
5. Telah melengkapi fitur website dengan profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan pengelolaan pengaduan;
6. Pemutakhiran data layanan pada media sosial dimutakhirkan setiap minggu;
7. Telah disediakan media untuk proses konsultasi dan pengaduan pelayanan berupa ruangan khusus konsultasi dan pengaduan pelayanan dengan petugas khusus, korespondensi melalui persuratan, aplikasi percakapan, email, telepon, website, dan media sosial;

Capaian dan rekomendasi hasil evaluasi pelayanan publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

Tabel 3.36 Capaian dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Kemenpora tahun 2021

NO	ASPEK PELAYANAN PUBLIK	CAPAIAN	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Pelayanan telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala PP-PON meliputi 6 jenis layanan; • Standar Pelayanan yang disusun telah mengacu kepada PermenPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 serta telah dipublikasikan pada ruang layanan, media sosial dan website; • Penyusunan Standar Pelayanan telah melibatkan perwakilan dari unsur Dinas Pemuda dan Olahraga, akademisi, tokoh kepemudaan, tokoh keolahragaan, dan masyarakat umum; • Maklumat Pelayanan telah ditetapkan dan dipublikasikan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017; • Menyampaikan bukti pendukung hasil pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat.
2	Profesionalisme SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan Perilaku dan Kode Etik Pegawai telah dipayungi dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2020; • Aturan Perilaku dan Kode Etik Pegawai telah dipayungi dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2020; • Penerapan pemberian penghargaan dan sanksi dilaksanakan mengacu pada Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi Petugas Layanan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; • Saat pelayanan pegawai sudah mengenakan seragam khusus, identitas nama, PIN/logo unit pelayanan, dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi aturan kode etik pegawai; • Membuat aturan mekanisme pemberian penghargaan dalam satu tahun ketetapan;

NO	ASPEK PELAYANAN PUBLIK	CAPAIAN	REKOMENDASI
		menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun);	
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya tempat parkir di area kantor dan parkir khusus bagi disabilitas; • Ruang tunggu telah dilengkapi fasilitas yang memadai; • Tersedia jalur landai, toilet khusus, dan kursi roda bagi pengguna layanan kebutuhan khusus; • Tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti kantin, mesin fotocopy, ruang laktasi, dan area bermain anak; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah sarana prasarana berkebutuhan khusus (mengacu SE KemenPANRB Nomor 66 Tahun 2020);
4	Konsultasi dan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia <i>front office</i> layanan konsultasi dan pengaduan dalam ruangan khusus; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan informasi petunjuk atau papan informasi konsultasi dan pengaduan; • Mempublikasikan tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan; • Meningkatkan sarana pendukung pelaksanaan konsultasi dan pengaduan; • Meningkatkan pengelolaan pendokumentasian hasil konsultasi dan pengaduan untuk menjadi referensi bagi pengguna layanan yang mudah diakses;
5	Sistem Informasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi pelayanan publik elektronik berupa website PPPON dan media sosial (Instagram dan facebook) yang mutakhir setiap minggu; • Tersedia media konsultasi dan pengaduan berupa ruangan khusus, alamat surat, aplikasi percakapan, email, telepon, 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambahkan aplikasi layanan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik;

NO	ASPEK PELAYANAN PUBLIK	CAPAIAN	REKOMENDASI
		website, media sosial, dan petugas khusus;	
6	Inovasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Inovasi berupa Diklat dan Webinar Online Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> Membangun inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan mengikutsertakan ke dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

Dalam mendukung pencapaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021, total anggaran yang telah dirancang Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 1.228.593.000 (Satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

dengan realisasi sebesar Rp. 1.076.678.000 (Satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dikelola oleh unit kerja yang memiliki fungsi terkait aspek-aspek Pelayanan Publik serta unit pelayanan publik.

INDIKATOR 4.3

Opini BPK

Tabel 3.37 Capaian Kinerja Opini BPK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya manajemen tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih	4.3 Opini BPK	WTP

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan. Opini dapat mencerminkan kepercayaan masyarakat bahwa di lembaga tersebut tata kelola pemerintahan berjalan baik, pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya bagus. Opini

pun dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah dan

akan berpengaruh pada kredibilitas entitas tersebut.

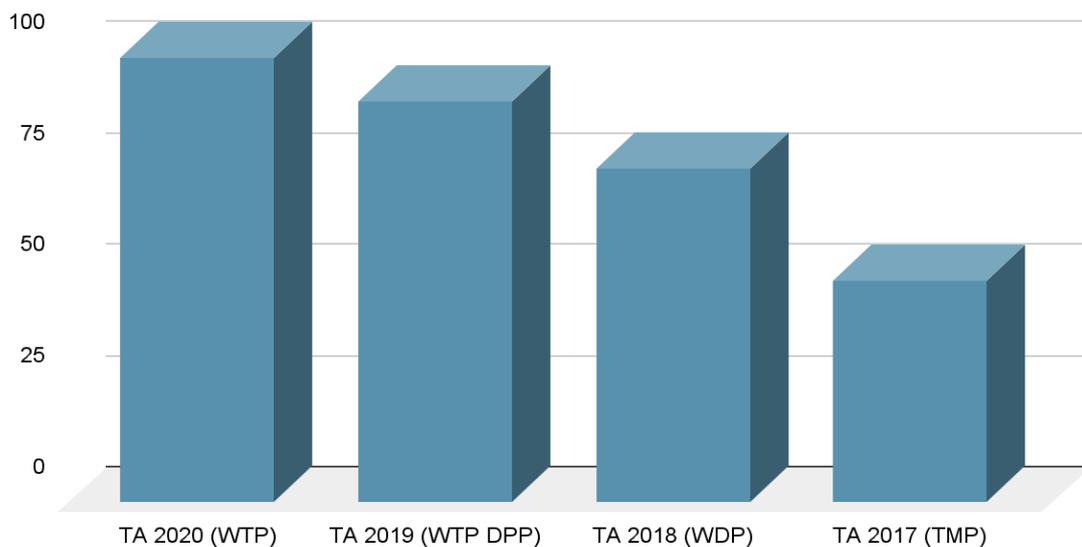
Opini BPK didasarkan pada kriteria antara lain:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Interen (SPI)

Empat Jenis Opini BPK

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3. Opini Tidak Wajar (TW)
4. Opini Tidak Memberikan Pendapat(TMP)/ *Disclaimer*

STATUS OPINI BPK ATAS LK KEMENPORA



Gambar 3.38 Grafik Opini BPK atas LK Kemenpora

Terdapat 2 (dua) Indikator terpenting dalam rangka mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga TA 2020 yaitu:

- a. Peningkatan mutu laporan keuangan (peningkatan kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP dan IKPA).
- b. Peningkatan pengawasan internal yang akuntabel dan transparan

a. Peningkatan mutu laporan keuangan (peningkatan kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP dan IKPA)

Sampai saat ini yang menjadi landasan atau dasar dari penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lemabaga adalah Peraturan Kementerian Keuangan Nomor: 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga menyebutkan bahwa Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga kepada Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu lembaga pemerintah, Kementerian Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan secara berkala yang dilaporkan/disampaikan ke Kementerian Keuangan. Berikut adalah laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga;

1. Laporan unaudited (tahun anggaran berjalan);
2. Laporan Audited (tahun anggaran sebelumnya);
3. Laporan Semester (tahun anggaran berjalan);
4. Laporan Triwulan III (tahun anggaran berjalan); dan
5. Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN.

Laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana tersebut di atas disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan operasional;
4. Laporan perubahan ekuitas; dan
5. Catatan laporan keuangan.

Tabel 3.38 Laporan Keuangan Kemenpora tahun 2021

NO.	DESKRIPSI KINERJA	VOLUME	TENGGAT WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
1	Laporan unaudited (TA. 2020)	1 Dok	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Tepat waktu

NO.	DESKRIPSI KINERJA	VOLUME	TENGGAT WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN	WAKTU PENYAMPAIAN	KETERANGAN
2	Laporan audited (TA. 2020)	1 Dok	Sesuai jadwal	Sesuai jadwal	Tepat waktu
3	Laporan Semester I (TA. 2021)	1 Dok	Sesuai jadwal	29 Juli 2021	Tepat waktu
4	Laporan Triwulan III (TA. 2021)	1 Dok	Sesuai jadwal	1 Oktober 2021	Tepat waktu
5	Rekon Bulanan (TA. 2021)		Sesuai jadwal yang ditentukan		Tepat waktu

Penyajian laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan disampaikan ke Kementerian dengan tepat waktu. Berikut adalah jadwal dan waktu penyampaian laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketercapaian indikator kinerja di atas di dukung oleh program/kegiatan sebagai berikut;

1. Koordinasi pelaksanaan administrasi keuangan;
2. FGD pengelolaan keuangan;
3. Rapat koordinasi dan evaluasi pertanggungjawaban APBN;
4. Rekonsiliasi dan penatausahaan LPJ Bendahara Satker;
5. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan SAIBA;
6. Penyusunan laporan keuangan unaudited tingkat UAKPA pada Satker;
7. Reviu dan finalisasi penyusunan laporan keuangan unaudited tingkat UAKPA;

Walaupun realisasi target kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala/hambatan dan permasalahan, yaitu sebagai berikut;

1. Masih terdapat pengungkapan yang belum memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
2. Penataan aset yang belum optimal;
3. Pengelolaan BMN dan aset tak berwujud belum optimal;
4. Kepatuhan dalam menyelesaikan pekerjaan kontraktual;
5. Pengelolaan bantuan pemerintah;

Untuk mengatasi kendala/hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Melakukan pembinaan terhadap Satker dengan melakukan FGD pengelolaan keuangan, rapat koordinasi dan evaluasi pertanggungjawaban APBN, rekonsiliasi dan penatausahaan LPJ Bendahara Satker, serta melaksanakan rapat kerja pengelolaan PNBPN;
2. Melakukan asistensi penyusunan laporan keuangan pada Satker di lingkungan Kemenpora untuk membantu perkembangan penyusunan laporan keuangan pada tingkat Satker dan menginventarisasi permasalahan terkait dengan penyusunan LK;

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/ Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Adapun Standar penilaian atas IKPA adalah;

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Gambar 3.39 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator penilaian IKPA pada tahun 2021 terdiri dari 13 Indikator, yaitu; 1). Revisi DIPA, 2). Deviasi Halaman III DIPA, 3). Pagu minus, 4). Data kontrak, 5). Pengelolaan UP dan TUP, 6). LPJ Bendahara, 7). Dispensasi SPM, 8). Penyerapan anggaran, 9). Penyelesaian tagihan, 10). Capaian output, 11). Retur SP2D, 12). Renkas, 13). Kesalahan SPM. Adapun Capaian IKPA Kementerian

Pemuda dan Olahraga tahun 2021 adalah 86,22 atau termasuk dalam kategori cukup ($70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$).

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa hal yang menyebabkan Nilai IKPA Kementerian Pemuda dan Olahraga masih mendapatkan nilai cukup yaitu;

1. Satuan kerja masih kurang memperhatikan sistem penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan baik
2. Terhambatnya kegiatan pemantauan penilaian nilai IKPA ke satker di lingkungan Kemenpora dari jadwal yang telah direncanakan setiap triwulan akibat terjadinya pandemi Covid-19;
3. Kurangnya SDM yang menguasai materi penilaian 13 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pembinaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemenpora;
4. Indikator penyerapan anggaran masih menjadi fokus utama bagi Satker dalam implementasi kinerja pelaksanaan anggaran sehingga implementasi nilai indikator lainnya kurang menjadi perhatian yang menyebabkan nilai masing-masing indikator tidak maksimal.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut, yaitu:

1. Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan dan Evaluasi Capaian IKPA Tahun 2022 yang melibatkan Pengelola Keuangan di Lingkungan Kemenpora;
2. Mengamati perkembangan pelaksanaan anggaran Satker di lingkungan Kemenpora dengan melakukan pemantauan atas perkembangan Nilai KPA satker;
3. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran ke Satker yang mempunyai nilai IKPA sangat rendah atau dibawah target setiap triwulan baik dilakukan secara video conference/online maupun monitoring langsung ke Satker;
4. Melakukan penyusunan instrumen penilaian IKPA sebagai bahan untuk penilaian IKPA di lingkungan Kemenpora, serta mengadakan kegiatan rekonsiliasi dengan pengelola keuangan secara berkala;
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan satker agar tidak hanya berfokus kepada penyerapan anggaran namun juga 13 indikator lainnya yang saling terkait satu sama lain.

b. Pengawasan internal yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka meningkatkan mutu atas pengawasan program dan kegiatan pada Tahun 2021 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan pengawasan atas program dan kegiatan melalui pengawasan yang bersifat rutin yaitu:

1. Reviu laporan keuangan Kemenpora.
2. Reviu PNBP.
3. Reviu Laporan Kinerja Kemenpora.
4. Reviu RKA-KL.
5. Evaluasi Lakip Eselon I dan II.
6. Reviu buka blokir atas DIPA Kemenpora TA 2021.
7. Reviu Perencanaan Program dan Kegiatan T.A 2022.
8. Reviu atas revisi anggaran satuan kerja yang memerlukan telaah Inspektorat.

Disamping pengawasan yang bersifat rutin, Kemenpora juga telah melakukan pengawasan atas program dan kegiatan yang menjadi prioritas pimpinan melalui pendampingan, reviu dan monitoring untuk kegiatan:

1. Pengawasan atas bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada PB PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua TA 2021;
2. Pengawasan atas bantuan pemerintah dalam bentuk uang dari PPOK pada Asdep Olahraga Prestasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga kepada cabang-cabang Olahraga dan NPC TA 2021;
3. Pengawasan pelaksanaan kegiatan atas Program Prioritas Kementerian untuk kegiatan Hari Olahraga Nasional dan Hari Sumpah Pemuda TA 2021;
4. Reviu atas catatan Laporan Keuangan LPDUK Semester III dan LPJ Bantuan Kemenpora kepada KONI Pusat.

Selain pengawasan atas hal-hal di atas Kemenpora telah melakukan upaya perbaikan atas temuan temuan pengawasan oleh BPK RI khususnya temuan pada Laporan Keuangan Kemenpora TA 2020.

Tabel 3.39 Rekomendasi temuan pada laporan keuangan kemenpora TA 2020

NO	REKOMENDASI TEMUAN	KETERANGAN
1	Temuan atas Sistem Pengendalian Intern atas Pengelolaan PNBP di Kemenpora	Progress tindak lanjut hampir tuntas, pengajuan atas sewa tarif PPPON dan sewa kantin tinggal menunggu persetujuan Kementerian Keuangan,

NO	REKOMENDASI TEMUAN	KETERANGAN
2	Temuan atas belanja Perjadin TA 2020 Kemenpora	Tuntas
3	Temuan atas belanja barang untuk diserahkan kepada Pemda, Masyarakat dan Organisasi	Tuntas
4	Temuan atas pengelolaan BMN Kemenpora	a. Telah dilakukan sensus BMN Kemenpora TA 2021 b. Penyelesaian pajak atas aset Inasgoc (masih on proses). c. Penelusuran atas BMN Kemenpora yang hilang dan Rusak (masih on proses) d. Penelusuran atas barang habis pakai yang memerlukan BAST (masih On proses)

Kemenpora pada tahun anggaran 2021 telah melakukan perbaikan atas tata kelola khususnya pada hal-hal yang menjadi kewajiban Kemenpora atas ketaatan pelaporan dalam rangka dukungan transparansi publik dan peningkatan SPIP :

1. Sosialisasi dan penilaian *baseline* atas Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi. Dari target Maturitas SPIP Kemenpora dengan target level 2 TA 2021, Kemenpora memperoleh capaian penilai SPIP Terintegrasi pada level 2,716 untuk TA 2021.
2. Pelaporan LHKPN/LHKASN tahun 2021 pada Kemenpora tepat waktu (LHKPN 99,52% dan LHKASN 100%).
3. Monitoring atas rekomendasi KPK terkait pengelolaan dan perbaikan kinerja atas bantuan pemerintah khususnya transparansi dan perbaikan juknis atas bantuan pemerintah dibidang keolahragaan dan kepemudaan serta penggunaan sistem pengajuan proposal online.
4. Perbaikan sistem dalam rangka pencegahan korupsi dan nepotisme melalui:
 - Keputusan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kesekretariatan Nomor 1.26.2/KPA.SATKER 418135/B.III/2022 Tentang Pengangkatan Penunjukan Tim Penyusun Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kesekretariatan Kemenpora;
 - Peningkatan kualitas SDM dengan usulan penetapan/pelantikan pejabat fungsional PBJ (usulan melalui Nota Dinas kepada Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi PL.01/8.5.8/BIII/VIII/2021 tgl 5 Agustus 2021

- Rapat berkala monitoring tindak lanjut temuan BPK RI antar Satuan Kerja dan Inspektorat;
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Permenpora sampai dengan Laporan LKJ TA 2021 dibuat belum menerima hasil opini atas LK TA 2021 dari BPK RI. Hal ini terjadi karena proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenpora masih berlangsung. Berdasarkan uraian atas upaya Kemenpora dalam rangka meningkatkan mutu atas Laporan Keuangan Kemenpora TA 2021 dan upaya pengawasan yang ada serta perbaikan atas tata kelola yang telah dilakukan Kemenpora optimis bahwa ***estimasi atas opini laporan keuangan kemenpora untuk TA 2021 adalah WTP***,

adapun hal yang menjadi catatan adalah permasalahan LPJ atas bantuan Kemenpora untuk PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua.

Dalam rangka peningkatan atas pengawasan program dan anggaran serta peningkatan tata kelola pelaporan keuangan Kemenpora sesuai dengan SAP, Kemenpora telah melakukan upaya pelayanan melalui penyediaan SDM terkait pengawasan dan SDM pengelolaan pelaporan keuangan dan BMN di Kemenpora.

Tabel 3.40 Penyediaan SDM pengawasan pelaporan keuangan dan BMN

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Auditor Kemenpora	15 Orang	analisis beban kerja 15 auditor berbanding 8 Satuan Kerja yang di awasi (7 Satker Pusat & Satuan Kerja Dekonsentrasi) =0,53
2	Petugas UAKPA	7 Orang	SK atas petugas UAKPA mengikuti aturan dalam SBM RKA/KL (satu satuan kerja 1 orang) hal ini dirasa masih kurang.
3	Petugas UAKPB	7 Orang	SK atas petugas UAKPB mengikuti aturan dalam SBM RKA/KL (satu satuan kerja 1 orang) hal ini dirasa masih kurang.
4	Petugas Verifikasi Anggaran		SK atas petugas verifikator pada masing-masing unit kerja tidak seragam. Perlu adanya analisis jumlah SDM pengelola
	a. Sekretariat Pusat	7 Orang	

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
	b. Deputi I	5 Orang	verifikasi anggaran berbanding beban kerja pada masing-masing Satker.
	c. Deputi II	3 Orang	
	d. Deputi III	7 Orang	
	e. Deputi IV	4 Orang	
	f. UPT & LPDUK		

a. Informasi keuangan Pendukung Opini BPK

Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak menganggarkan secara khusus untuk capaian target Opini BPK atas LK Kemenpora. Namun demikian secara teknis ada beberapa kegiatan yang berkaitan erat dengan capaian opini yaitu :

Tabel 3.41 Unit pelaksanaan capaian opini BPK beserta anggaran

NO	UNIT PENGAMPU	ANGGARAN
1	Anggaran Pengawasan Inspektorat	Rp2.650.000.000
2	Anggaran Pelaporan LK Sekretariat Pusat	Rp1.703.155.000
3	Anggaran Verifikasi Sekretariat Pusat	Rp2.887.500.000
4	Anggaran Pengelolaan BMN dan Penghapusan BMN	Rp2.625.712.000
5	Anggaran Pengelolaan LK pada Deputi I	Rp88.000.000
6	Anggaran Pengelolaan LK pada Deputi II	Rp537.600.000
7	Anggaran Pengelolaan LK pada Deputi III	Rp649.920.000
8	Anggaran Pengelolaan LK pada Deputi IV	Rp1.428.528.000
9	Anggaran Pengelolaan LK pada UPT & LPDUK	Rp354.940.000
T O T A L		Rp12.925.355.000

b. Perbandingan anggaran Kemenpora dengan anggaran penunjang Opini BPK RI Kemenpora.

Anggaran Kemenpora TA. 2021 sebesar Rp.2.515.044.006.000, sedangkan anggaran untuk penunjang opini BPK RI Kemenpora sebesar Rp12.925.355.000 atau 0,51%.



Capaian Realisasi penyerapan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun anggaran 2021 adalah 95,11% dari total pagu sebesar Rp 2.669.304.730.000, persentase realisasi ini mengalami penurunan sebesar 0,03% dibanding tahun 2020 yang mencapai 95,14%, berikut adalah rincian realisasi anggaran Per Satker untuk tahun 2021;

Tabel 3.42 Rincian realisasi anggaran per satker tahun 2021

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI		SISA	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Sekretariat	280.142.595.000	277.968.595.276	99,22%	2.173.999.724	0,78%
2	Deputi I	36.689.566.000	36.363.788.258	99,11%	325.777.742	0,89%
3	Deputi II	73.460.259.000	72.299.212.185	98,42%	1.161.046.815	1,58%
4	Deputi III	206.638.151.000	203.784.241.578	98,62%	2.853.909.422	1,38%
5	Deputi IV	1.897.423.435.000	1.800.700.035.563	94,90%	96.723.399.437	5,10%
6	UPT	19.690.000.000	19.574.552.221	99,41%	115.447.779	0,59%
7	BLU LPDUK	71.000.000.000	48.037.329.352	67,66%	22.962.670.648	32,34%
8	Dekon 34 Provinsi	84.260.724.000	80.151.484.708	95,12%	4.109.239.292	4,88%
	JUMLAH	2.669.304.730.000	2.538.879.239.141	95,11%	130.425.490.859	4,89%

Berikut adalah penjelasan atas tabel realisasi anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2021:

1. Berdasarkan tabel tersebut di atas, pada Satker Sekretariat masih terdapat sisa dana sebesar Rp1.965.228.142 yang berasal dari efisiensi perjalanan dinas yang tidak terserap karena kondisi pandemi Covid-19, dan berasal dari hasil efisiensi belanja (sisa belanja) yang tidak terpakai.
2. Pada Satker Deputi 1, Deputi 2, Deputi 3 dan Satker UPT, serta Satker LPDUK sisa dana yang tidak terserap di tahun 2021 berasal dari hasil efisiensi belanja kegiatan.
3. Untuk Satker Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sisa dana yang tidak terserap sebesar Rp96.723.399.437 berasal dari efisiensi lelang untuk bantuan, efisiensi kegiatan PON tahun 2021, dan hasil efisiensi dari kegiatan rutin Satker.





D. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Kementerian Pemuda dan Olahraga dituntut dapat menyesuaikan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan reformasi pengelolaan sektor publik melalui *new public management* dengan tiga prinsip utamanya yaitu profesional, transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut dimaknai dengan mereformasi manajemen keuangan melalui perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan (pelaksanaan anggaran dan pelaporan, dan pertanggungjawaban).

Bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga anggaran berfungsi

sebagai alat perencanaan sekaligus alat pengendalian. Sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja atau dapat diperoleh dari aplikasi e-Smart DJA Kementerian Keuangan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.43 Definisi Operasional dan Perhitungan Efisiensi

ANALISIS ISTILAH	PENGERTIAN	RUMUS	KETERANGAN
Efektivitas	Mardiasmo (2013:132) efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (<i>spending wisely</i>).	$E = \frac{RAB}{AB} \times 100\%$	E = Efektivitas RAB = Realisasi Anggaran belanja AB = Anggaran Belanja

Kemudian dengan merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.



Gambar 3.40 Grafik Efisiensi Anggaran Kemenpora Tahun 2018-2021

Berdasarkan pada grafik di atas Tahun 2021 per tanggal 10 Januari 2022, tingkat efisiensi anggaran sebesar 0,50 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,62. Dari standar efisiensi yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar 20. Nilai efisiensi tersebut merupakan nilai sementara dan belum final. Selanjutnya akan diperbaharui setelah hasil resmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

2. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA)

Berdasarkan kondisi sumber daya manusia aparatur/pegawai di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2021 dapat disampaikan analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) sebagai berikut:

1. Masih terdapat 35,65% pegawai yang berpendidikan SMA ke bawah yang mempengaruhi kompetensi dan profesionalitas dari pegawai. Selanjutnya perlu pengembangan dan peningkatan pendidikan dan kompetensi pegawai yang masih rendah.
2. Sebaran pegawai masih belum merata, masih terdapat unit kerja yang kekurangan pegawai dikarenakan sebagian besar pegawai masih aktif sebagai pelatih dan atlet di luar kantor.
3. Diperlukan penyebaran pegawai secara merata yang disesuaikan dengan beban kerja pada masing-masing unit kerja.

4. Sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan pegawai secara berkelanjutan, sesuai dengan tugas fungsi dan kemampuan masing-masing pegawai.
5. Kompetensi pegawai masih tergolong rendah, maka diperlukan analisis kebutuhan diklat (pelatihan).

Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat pula indikator kinerja lainnya yang mendukung tercapainya IKU, yaitu Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Pemuda dan Olahraga meraih kategori Cukup Informatif berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat. Penganugerahan tersebut

dilaksanakan secara virtual dan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin. Berdasarkan hasil penilaian Monev, menunjukkan bahwa kepatuhan dan komitmen Kemenpora dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi sudah cukup baik dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan capaian tersebut. Adapun capaian nilai monev KIP tahun 2021 yang diperoleh Kemenpora adalah 75,94.



NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	75,94
2	KEMENTERIAN SOSIAL	72,61

Gambar 3.41 Nilai monev KIP tahun 2021

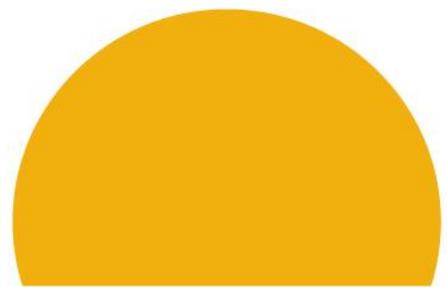
Adapun hasil pelaksanaan Monev KIP tahun 2021 menunjukkan bahwa Badan Publik dengan kategori Informatif berjumlah 83, kategori Menuju Informatif berjumlah 63, kategori Cukup Informatif berjumlah 54, kategori Kurang Informatif berjumlah 37, serta Badan Publik dengan kategori Tidak Informatif berjumlah 100.



LAPORAN KINERJA 2021

BAB IV

PENUTUP



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kemenpora berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kemenpora Tahun 2021 disusun sebagai wujud nyata komitmen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah khususnya kepada publik dan untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran dan tujuan. Secara umum, Kemenpora telah berupaya dengan

serius-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dengan segala sumber daya yang ada.

Adapun untuk pencapaian atas kinerja Kemenpora Tahun 2021 di masa pandemi ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut di sebabkan beberapa indikator membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen. Langkah-langkah kedepan yang perlu dilakukan oleh Kemenpora dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi kemitraan lintas sektor kepemudaan dan keolahragaan.
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kinerja hingga pelaporan
3. Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara
4. Membakukan formula pengukuran seluruh indikator yang ada agar dapat diuji relevansi antara angka indikator yang dihasilkan dengan sasaran kinerja yang diwujudkan
5. Mempercepat terlaksananya Merit Sistem sebagai penerapan dari Permenpan RB No.40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN seperti pola karir dan manajemen talenta.





Kami harap, Laporan Kinerja (LKj) ini dapat memberi gambaran capaian kinerja Kemenpora berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja. Karena sejatinya, laporan ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Kemenpora dalam melaksanakan berbagai tugas yang diemban dalam memenuhi harapan masyarakat. Kemenpora dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini perlu dievaluasi dan terus dicari solusi yang tepat secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Akhirnya, kami harapkan akan muncul umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya



**KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Gerbang Pemuda no.3
Senayan, Jakarta Pusat